PEREBUTAN PENGUASAAN SUMBER DAYA POLITIK ETNIS SEMENDE PADA PEMILU 2019 DI WILAYAH HUTAN KEMASYARAKATAN TANGGAMUS

DISERTASI

Oleh:

Handi Mulyaningsih
NPM 2036011011

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

PEREBUTAN PENGUASAAN SUMBER DAYA POLITIK ETNIS SEMENDE PADA PEMILU 2019 DI WILAYAH HUTAN KEMASYARAKATAN TANGGAMUS

OLEH:

HANDI MULYANINGSIH
NPM 2036011011

DISERTASI
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor
Studi Pembangunan

Pada
Program Studi Doktor Studi Pembangunan
FISIP Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

PEREBUTAN PENGUASAAN SUMBERDAYA POLITIK ETNIS SEMENDE PADA PEMILU 2019 DI WILAYAH HUTAN KEMASYARAKATAN TANGGAMUS

Oleh

Handi Mulyaningsih

Etnis Semende merupakan etnis minoritas di Lampung yang sebagian tinggal di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Pada pemilu tahun 2019 ada 4 (empat) orang dari Kecamatan Pulau Panggung yang terpilih sebagai anggota DPRD Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perebutan penguasaan sumberdaya politik etnis Semende di internal partai PKB; serta menjelaskan kontribusi lembaga adat dan kekerabatan Etnik Semende pada pemenangan kandidat partai PKB.

Tipe penelitian ini kualitatif yang berada dalam paradigma *konstruktivistik*, dan pendekatan fenomenologi. Data dianalisis untuk memahami makna yang mendalam (*verstehen*).

Hasil penelitian menunjukkan perebutan penguasaan nomor urut terjadi melalui persaingan dan kontravensi namun tidak berkonflik. Sedangkan perebutan suara terjadi melalui persaingan, kontravensi dan konflik. Perebutan terjadi antara calon laki-laki dengan laki laki-laki, tidak terjadi antara calon laki-laki terhadap perempuan, dan antara calon perempuan dengan perempuan. Apabila calon dari keluarga maka keluarga mendukung sepenuhnya; apabila ada calon laki-laki dan perempuan dari satu keluarga maka prioritas dukungan pada calon laki-laki; apabila terdapat dua calon laki-laki dari satu keluaga maka dukungan pada calon yang posisinya lebih tinggi; apabila caon bukan dari keluarga maka tidak didukung meskipun menggunakan money politik baik *patronase* maupun *klientelisme*. Penelitian ini menghasilkan temuan baru bahwa struktur Adat Etnis Semende sangat menentukan pemenangan calon, dan mampu mengeliminir struktur eksternal patronase dan klientalise pada perebutan sumberdaa politik EtnisSemende.

Kata Kunci: Etnik Semende, perebutan penguasaan, Lembaga Adat, Strukturasi

STRUGGLE FOR CONTROL OF POLITICAL RESOURCES
SEMENDE ETHNICITY IN THE 2019 ELECTION CASE
IN COMMUNITY FOREST TANGGAMUS AREA

ABSTRACT

By

HANDI MULYANINGSIH

Semende ethnic group is an ethnic minority in Lampung, who live in Pulau Panggung District, Tanggamus Regency. In 2019 election, four people from Pulau Panggung District were elected as members of the Tanggamus DPRD. This research aims to explain the struggle for control of Semende ethnic political resources within PKB party; as well as explaining the contribution of traditional institutions and kinship of Semende ethnic group to the victory of PKB party candidate.This research is qualitative that uses a constructivist paradigm, and the approach is phenomenological. The collected data is analyzed to understand the deep meaning (verstehen). The results of the research show that the struggle for control of serial numbers occurs through competition, contradiction but not conflict. Competition occurs between male and male, male and female, and female candidates. If the candidate is from the same family, the family will fully support it; if there are male and female candidates, the priority is for the male candidate to be selected; If there are two male candidates from one family, the choice is determined based on considerations of position in customary law. If a candidate is not from the family, they will not be selected even if they use money politics, patronage or clientelism. This research produced new findings that the traditional structure of the Semende ethnic group greatly determines the candidate's victory, and is able to eliminate external structures of patronage and clientelism in the struggle for control of political resources of the Semende ethnic group.

Keywords: Semende ethnicity, choice, struggle for control, traditional institutions.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Disertasi	:	**PEREBUTAN PENGUASAAN SUMBERDAYA POLITIK ETNIS SEMENDE PADA PEMILU 2019 DI WILAYAH HUTAN KEMASYARAKATAN TANGGAMUS**
Nama Mahasiswa	:	**Handi Mulyaningsih**
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2036011011**
Program Studi	:	**Doktor Studi Pembangunan**
Fakultas	:	**ISIP**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Promotor	Co-Promotor
Prof. Dr. Hartoyo, M.Si	**Prof. Dr. Syarief Makhya**
NIP 19601208198902001	**NIP 195908031986031003**

2. **Ketua Program Studi Doktor Studi Pembangunan**

Dr. Bambang Utoyo, M.Si
NIP 196302061988031002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	: Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
Sekretaris	: Dr. Roby Cahyadi Kurniawan, M.A
	: Prof. Dr. Bagong Suyanto (Penguji Eksternal)
	: Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si (Ketua Prodi PDSP/Penguji Internal
Penguji Internal	: Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A (Penguji Internal)
	: Dr. Tina Kartika, S.Pd, M.Si (Pernguji Internal)
	: Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si (Penguji Internal)
	: Prof. Dr. Syarief Makhya (Co-Promotor)
	Prof. Dr. Hartoyo, M.Si (Promotor)

Dekan FISIP UNILA

Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP 196108071987032001

Direktur Pasca Sarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Disertasi: **14 Juni 2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Nama	:	**Handi Mulyaningsih**
Tempat dan Tanggal Lahir	:	**Kudus, 16 Desember 1963**
Program Studi	:	**Doktor Studi Pembangunan**
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2036011011**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2024
Yang membuat pernyataan,

Handi Mulyaningsih
NPM 2036011011

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk almarhum Ibunda dan Ayahanda yang sejak kecil memotivasi agar saya meraih pendidikan terbaik. Bahwa keterbatasan tidak menghalangi untuk memperoleh pendidikan terbaik.

…….untuk suami tercinta atas kesabarannya…….
untuk anak-anak, menantu, cucu,
agar kelak mencapai pendidikan tertinggi dan terbaik

Semoga Allah SWT selalu menjaga Iman dan Taqwa kami

Nashrun Minallah Wa Fathun Qariib

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatakan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya disertasi ini dapat diselesaikan. Disertasi dengan judul "Perebutan Penguasaan Sumberdaya Politik Etnis Semende Pada Pemilu Tahun 2019 Di Wilayah Hutan Kemasyarakatan Tanggamus" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu pembangunan pada Program Studi Doktor S3 Studi pembangunan FISIP Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi di Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Dekan FISIP Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Bapak Dr. Deddy Hermawan, M. Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Bapak Dr. Robi Cahyadi K, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung,
4. Bapak Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si selaku Penguji dari Program Studi Doktor Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP selaku Sekretaris Program Studi Doktor Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat selama menempuh studi.

5. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si, selaku Ketua Penguji, terima kasih atas masukannya.
6. Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M.Si selaku Promotor dan Bapak Prof. Syarief Makhya, M.Si selaku Co-Promotor atas saran, kritik dan semangatnya selama penulis menyelesaikan disertasi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Bagong Suyanto selaku doses penguji eksternal atas masukan, saran dan kritiknya.
8. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A, Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si, Ibu Dr. Tina Kartika, M.Si selaku tim penguji disertasi, atas arahan serta masukan dalam penyelesaian disertasi ini.
9. Bapak Dr. Roby Cahyadi, selaku Sekretaris Tim Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran untuk penyelesaian disertasi ini.
10. Seluruh dosen Program Studi S3 Studi Pembangunan FISIP Unila atas ilmu pengetahuan yang diberikan dalam menem puh dan menyelesaikan pendidikan ini
11. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung serta Bapak Damar Wibisono, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung atas dukungannya selama ini, serta Seluruh dosen Jurusan Sosiologi terima kasih atas doa dan dukungannya
12. Seluruh Staf Program Doktor Studi Pembangunan dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung
13. Teman teman rekan sejawat di FISIP Universitas Lampung,
14. Teman teman seperjuangan angkatan 2020 Program Doktor Studi Pembangunan FISIP Universitas Lampung, terima kasih untuk doa, semangat dan dukungannya.
15. Semua informan penelitian, diantaranya Bapak Amin, Kiki, Linda, Agis, Sheila, yang selalu menemani penelitian di Kecamatan Pulau Panggung, serta seluruh informan penelitian. Terima kasih pada Bapak Zulki Kurniawan dan bapak Irsi Jaya, Adinda Habibi, Puyang Amana, Irsi Jaya, Aseptina, Mamak Elpis, Istri Zulki, Usnita, Senau, Lini, Muhaidi, Septa, Ariadi, Hertanto, Fatoni, Dedy Fernando, Ria Sari Samatha, Nova Aryani, Muhadi, Welly Apriani, Sumiyati, Chandrawansah, Ali Usman, Firdaus

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaiana desertasi.
17. Suamiku Hertanto, M.Si yang sabar, dan semua anak-anakku, cucu-cucu, penyemangat dan penghibur dalam penyelesaian disertasi ini.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga desertasi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, Juni 2024

Penulis

Handi Mulyaningsih

Riwayat Hidup

Lahir tanggal 16 Desember 1963 di Kota Kudus, Jawa Tengah
Ibunda Siti Amanah
Ayahanda Hadi Moelyono (Mayor Purnawirawan TNI AD).

Anak ke enam dari Sembilan bersaudara: Bambang Hartono, Bambang Sugeng Haryanto, Handi Kusmiati, Handi Hastuti, Handi Sukomurwati, Handi Mulyaningsih, Handi Sri Winarti, Handi Sri Subekti, Bambang Hartoyo

Menikah dengan Hertanto, Ph. D pada tahun 1987
4 (empat) Anak:
Tantra Ikhlas Nalendro,
Tantri Liris Nareswari,
Tantri Andaru Warih,
Tantra Adiprasetyo Pamungkas

Sekolah di SD Kajeksan Kudus,
SMP Negeri 1 Kudus,
SMA Negeri 1 Kudus.
S1 di Jurusan Pemerintahan Universitas Diponegoro lulus tahun 1987
S2 di Jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1997
S3 di Prodi Studi Pembangunan FISIP UNILA tahun 2020

Bekerja sebagai PNS Dosen di Universitas Lampung sejak tahun 1989.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung (2008-2019)

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN PERSETUJUAN.....iii
PENGESAHAN..... iv
PERNYATAAN.....v
PERSEMBAHAN.....vi
Riwayat Hidup.....vii
ABSTRAK.....viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Perumusan Masalah 10
1.3. Tujuan dan Manfaat 10
1.3.1. Tujuan Penelitian 10
1.3.2. Manfaat Penelitian 10
1.4. Keaslian (Orisinalitas) Penelitian 12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 13
2.1. Sumberdaya Politik..... 13
2.2. Modal Sosial, Modal Ekonomi, Modal Politik, Modal Simbolis 14
2.3. Agen dan Struktur Dalam Perebutan Sumberdaya Politik..... 14
2.4. Perebutan dan Penguasaan..... 20
2.5. Kompetisi, Kontravensi, Konflik..... 21
2.6. Konsep Perebutan Penguasaan Sumberdaya Politik Berbasis Etnik....30
2.7. Klientelisme, Patronase, Primordialisme..... 33
2.8. Budaya dan Politik..... 39
2.9. Matrilianisme dan Kelemahan dalam Kontestasi 41

2.10. Kerangka Pikir 42
BAB III. METODE PENELITIAN 45
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 45
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 46
3.3. Fokus Penelitian..... 47
3.4. Jenis Dan Sumber Data..... 48
3.5. Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data 52
3.5.1. Pengumpulan Data..... 52
3.5.2. Uji Keabsahan Data 54
3.5.3. Pengolahan Data Kualitatif..... 58
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 61
4.1. Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus..... 61
4.2. Kondisi Kependudukan 66
4.3. Kondisi Kesehatan..... 71
4.4. Layanan Keluarga Berencana di Lingkungan Etnis Semende..... 72
4.5. Keagamaan dan Fasilitas Beribadah Di Lingkungan Etnis Semende. 73
4.6. Kondisi Mata Pencaharian..... 73
4.7. Sejarah Pemilu di Kecamatan Pulau Panggung..... 79
4.8. Sejarah Etnis Semende di Pulau Panggung 85
4.8.1. Migrasi Menuju Pulau Panggung 85
4.8.2. Adat Istiadat Etnis Semende 87
4.8.3. Struktur Adat Etnis Semende.....100
4.9. Kehidupan Etnis Semende di Hutan Kemasyarakatan Lampung 102
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 105
5.1. Hasil Penelitian.....105
5.1.1. Perebutan Penguasaan di Internal Partai Politik PKB 105
a. Perebutan Dalam Konstelasi Politik Nasional dan Lokal..... 105
b. Perebutan Penguasaan Sumberdaya Politik Antar Parpol.....111
c. Perebutan di Internal Partai Kebangkitan Bangsa.....122
d. Perbandingan Modalitas Antar Calon.....137
1. Perebutan Nomor Urut 1.....122
2. Perebutan Suara di Internal Partai Kebangkitan Bangsa.....125

5.1.2. Kontribusi Lembaga Adat dan Kekerabatan Dalam 161
Pemenangan Kandidat
a. Kekerabatan di Kecamatan Pulau Panggung 161
b. Problem Perebutan Penguasaan Sumberdaya Politik Etnis..... 165
Semende
c. Para Calon Berada Di Parpol yang Berbeda.....166
d. Suatu Keunikan Etnis Semende Bahwa Politk Adalah Untuk 169
Memperjuangkan Kepentingan Keluarga
5.1.3. Pola-Pola Pemenangan 182
a. Model Calon Dari Keluarga..... 182
b. Model Dua Calon Dari Satu Keluarga..... 187
c. Model Calon Bukan Anggota Keluarga atau Kerabat..... 189
d. Model Dukungan Terhadap Calon Laki-Laki dan Perempuan. 190
e. Menolak Patronase, Klientelisme, Menerima Primordialisme 192
1. Menolak Patronase, Menabung Kebaikan..... 192
2. Menolak Uang, Memilih Persaudaraan..... 196
5.1.4. Persaingan, Kontravensi dan Konflik..... 197
5.2. Pembahasan 208
5.2.1. Perebutan Penguasaan Sumberdaya Politik di Internal PKB 208
5.2.2. Kontribusi Lembaga Adat dan Kekerabatan Pada 250
Pemenangan Kandidat: Pola-Pola Kontribusi Keluarga
Dalam Pemenangan Kandidat
BAB VI. IMPLIKASI TEORITIK.....259
6.1. Pendahuluan.....259
6.2. Temuan Penelitian.....259
6.2.1. Perebutan Penguasaan Sumberdaya Politik Terbagi dalam 259
Perebutan Nomor Urut dan Suara
a. KeberuntungN Meraje.....259
b. Struktur Enabling Bagi Laki-Laki, Constraining Bagi.....261
Perempuan
6.2.2.Kontribusi Lembaga Adat Dalam Pencalonan..... 262
a. Adaptasi Struktur Adat 262

b. Praktek Produksi Dan Reproduksi yang Setada Dalam 262
Dalam Pencalonan
c. In Group Terpecah……..….263
6.2.2.Temuan Tentang Kontribusi Lembaga Adat dan Kekerabatan 262
Pada Pemenangan
a. Berebut Tanpa Konflik Manifest.....263
b. Mempedomani Budaya, ...265
c. Kompetisi, Kontravensi, Konflik.....270
d. Patronase, Klientelisme, Primordialisme.....273
e. Ambiguitas Adat Etnis Semende.....276
f. Struktur dan Agensi Berkelindan..... 278
6.3. Temuan Kebaruan Studi Sosiologi Budaya..... 280
1. Pola-Pola Pemenangan Calon..... .280
2. Aktor Tetap Tunduk Pada Adat.....281
3. Kekuatan Struktur Adat..... 281
4. Stagnasi Proses Perubahan..... 282
5. Dasar Penentuan Pola-Pola Pemenangan..... 282
6.Temuan Utama.....285
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN 287
7.1. Kesimpulan.....287
7.1.1. Perebutan Penguasaan Sumber Daya Politik Etnis Semende.....287
pada Pemilu 2019 di Internal PKB 287
7.1.2. Kontribusi Lembaga Adat dan Kekerabatan Pada Pencalonan.....287
7.2. Saran 290
DAFTAR PUSTAKA.....292

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model Koalisi 29
Tabel 2. Informan Penelitian 50
Tabel 3. Luas Daerah dan Jumlah Desa di Kecamatan Pulau Panggung, 2020.(Km2) 63
Tabel 4. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten (km), 2020. 65
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk (etnis Semende) di Kecamatan Pulau Panggung 2010-2020. 67
Tabel 6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Pulau Panggung. ... 68
Tabel 7. Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah di Kecamatan Pulau Panggung, 2018, 2019, 2020. 69
Tabel 8. Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman Di Kecamatan Pulau Panggung (kwintal), 2019–2020 74
Tabel 9. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Pulau Panggung (ha), dan Jumlah Produksi (Ha), 2019 – 2020. 75
Tabel 10. Perolehan Kursi DPR DPRD Provinsi dan DPRD Tanggamus Pada Pemilu Tahun 2014 82
Tabel 11. Jumlah Kursi Parpol DPR, DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Tanggamus Tahun 2019 84
Tabel 12. Persebaran Etnis Semende Sebagai Calon Partai Politik Pada Pemilu 2019 113
Tabel 13. Perolehan Suara Antar Parpol, Pemilu 2019 di Kecamatan Pulau Panggung. 114
Tabel 14. Calon Terplih Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil 4 Tahun 2019 berdasarkan Etnis 118
Tabel 15. Perebutan Penguasaan Nomor Urut Calon Laki-laki dan Perempuan Tahun 2019. 122
Tabel 16. Perolehan Suara di Internal PKB Pada Pemilu 2019 125
Tabel 17. Perbandingan Aksesibilitas Perebutan Penguasaan Sumberdaya 128
Tabel 18. Perbandingan Perolehan Suara Calon di Internal PKB Pada 3 (tiga) Kecamatan di Daerah Pemilihan 4 (Empat) Kabupaten Tanggamus Pada Pemilu 2019 129
Tabel 19. Perbandingan Modalitas Calon 137
Tabel 20. Persaingan, Kontravensi dan Konflik pada Perebutan Nomor Urut di Internal PKB 209
Tabel 21. Perebutan Suara di Internal PKB Pada Pemilu Tahun 2019 222
Tabel 22. Kontravernsi Zulki dan Ashari Dalam Perebutan Sumberdaya Politik 231

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir 44
Gambar 2. Peta Kecamatan Pulau Panggung 62
Gambar 3. Struktur Tunggu Tubang dan *Meraje* 96
Gambar 4. Payung Jurai *Meraje* 100
Gambar 5. Hubungan *Meraje* dan *Anak Belai* 116
Gambar 6. Kekerabatan Etnis Semende 162
Gambar 7. Lembaga Adat Etnis Semende 164
Gambar 8. Pola Pemenangan Calon Bukan Keluarga 189
Gambar 9. Modal dukungan keluarga Terhadap Calon Laki-laki dan Perempuan 190

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Etnis Semende merupakan salah satu etnik yang ada di Lampung. Etnis Semende[1] mendiami wilayah yang berada di perbukitan jalur Bukit Barisan Selatan seperti Sumberjaya, Way Tenong, dan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Etnis Semende yang tinggal di Kecamatan Pulau Panggung sebanyak 40.658 (BPS, 2022) atau 6,295% dari total penduduk di Kabupaten Tanggamus yaitu 645.807 (BPS 2022). Meskipun minoritas, namun mampu meraih 7 (tujuh) kursi atau 15,55% anggota DPRD dari 45 anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Serentak tahun 2019. Tujuh anggota DPRD dari Etnis Semende tersebut semuanya terpilih dari Daerah Pemilihan (dapil empat) Kabupaten Tanggamus yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu kecamatan Pulau Panggung- Air Naningan-Ulu Belu. Bahkan dari 8 (delapan) anggota DPRD tersebut ada 4 (empat) yang semuanya berasal dari Kecamatan Pulau Panggung.

[1] Dari 656 suku bangsa, salah satu masyarakat (suku bangsa) di Indonesi adalah masyarakat Semende yang mendiami beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Orang Semende mengakui bahwa pusat kebudayaan Semende berada di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di daerah Semende Darat. Orang Semende (dalam beberapa literatur disebut juga Semendo), adalah salah satu suku bangsa yang wilayah adatnya berada di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan. Mitologi Semende mengatakan bahwa mereka berasal dari sebaran salah satu kelompok Basemah yang ada di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan (Iskandar, 2003), yang dalam perkembangan kemudian juga akhirnya mendapat pengaruh dari Kesultanan Palembang. Menurut Moyer (1984) komunitas Semende termasuk komunitas yang suka melakukan migrasi sehingga keberadaan mereka juga banyak ditemukan di berbagai wilayah, seperti Bengkulu, Lampung, Jambi, dan beberapa daerah lain di Provinsi Sumatra Selatan. Di wilayah migran, komunitas Semende cende rung mengelompok dengan tetap mempertahankan adat istiadatnya, khususnya adat tunggu tubang (dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 22 No. 2 Tahun 2020)

Pada perebutan penguasaan sumberdaya politik etnis Semende di kecamatan Pulau Panggung pada pemilu tahun 2019, tidak terlihat adanya konflik yang muncul, padahal pada pemilu tahun 2019 banyak konflik yang terjadi dan meninggalkan residu seperti konflik antara pendukung calon presiden yang viral dengan sebutan ”cebong” dan ”kampret” sebagai ekspresi sinisme politik (Tarzi, 2019) yang berlebihan atas perseteruan antara dua pihak, kelompok, atau identitas yang sulit untuk didamaikan. Pada pemilu 2019, politisasi identitas menguat di media *on line* (Farida & Yoedtadi, 2019). Penggunaan media on line ini membuat penyebaran politisasi indentitas menjangkau banyak kalangan yang aktif dalam menggunakan media sosial.

Problem yang muncul dari politisasi identitas adalah polarisasi isu dan terpecahnya masyarakat. Pemilu yang berasaskan memilih seorang pemimpin secara langsung bagi setiap pemilih dimobilisasi melalui politisasi identitas untuk memilih calon yang sesuai dengan identitasnya. Perasaan satu identitas dieksploitasi untuk kemenangan seorang kandidai yang satu identitas secara etnisitas, agama, ras, gender (Puskapol UI, 2019). Politisasi etnis dilakukan Kepala Suku Moskona Utara dengan mengarahkan pilihan masyarakat mengakibatkan konflik legitimasi elite dan jaringan identitas (Fathudin et al., 2020). Politik identitas semakin banyak digunakan oleh para politisi dan penguasa di tingkat lokal untuk mendapatkan segmentasi kekuasaan politik maupun ekonomi. Politik identitas telah menjadi sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sebagaimana terjadi di pilkada Kalimantan Tengah (R. Triana & Liska, 2020), komunitas Bali Kabupaten Banyuasin (Sari & Rochmiatun, 2020), berwajah agama (Herianto & Wijanarko, 2022), yang mengakibatkan instabilitas politik dan disintegrasi (Frenki, 2021).

Sebagaimana hasil penelitian Heller (2001) maupun Horowitz (1986), hingga Hikmawan (2017) politik identitas merupakan politik berbedaan, antara nasionalisme dan agama (Lestari, 2018), perbedaan SARA (Tutukansa, 2022), yang dilakukan millenial di media sosial (Soenjoto, 2019)

Kajian tentang politik identitas merupakan gerakan politik untuk membangun kembali "narasi besar"[2] yang secara prinsip ditolak (Beyme, 2008). Bagi etnis minoritas, politik identitas diharapkan dapat membangun citra diri dan menegakkan harga diri diantara etnis, budaya, agama yang ada (F. Muhammad & Paskarina, 2018). Politik identitas dijadikan sebagai alat untuk menggalang solidaritas kaum minoritas dalam melawan hegemoni dan represi kelompok penguasa (Firdaus & Andriyani, 2021)

Politik identitas etnis minoritas dalam perkembangan bisa berdampak pada perpolitikan yang semakin plural atau disintegrasi sosial (Davidson et al., 2010); melahirkan etnosentrisme dan konflik (Nawir, 2019). Misalnya konflik-konflik antar etnis di Lampung disebabkan lemahnya implementasi manejemen pra konflik (Hartoyo, 2019) yang di Lampung disebut *Muakhi* ; *Ngebettten* (Ratnasari et al., 2020) atau *Nengah Nyapur* (Syani, 2021); *Sakai Sambayan*. (Syani et al., 2020). Konflik antar etnis Munculnya identitas yang dipersenjatai (*weaponized identity*); *siberbalkanisasi;* dan menguatnya konservatisme (Hertanto et al., 2021). Selain itu, normalisasi budaya partisan, marginalisasi, isu kepercayaan, pandangan ekstremis, aktor politik yang melegitimasi dan membagikan ketidaksukaan, rendahnya pemahaman politik, kontravensi suku - agama, hoaks, ujaran kebencian, dan tak ada *trust* publik yang mengancam perpecahan, kerusuhan, dan populisme (Abadia et al., 2023).

Selain politik identitas, kunci kemenangan para kandidat adalah *klientelism*, *patronase* (Sukmajati & Aspinal, 2015) yang terjadi di banyak pilkada; transaksional (Hertanto. Sulaiman Ahmad, 2009). Wujud patronase dan klientelisme seperti pemberian kartu tani setelah Pilgub Jateng 2018 (Ladini & Yuwanto, 2019); Pilgub Lampung, Program Keluarga Harapan di Jawa Timur, di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Okhtariza, 2019), pilkada Kota

[2] Narasi besar adalah istilah yang dimunculkan oleh Jean-François Lyotard (1984). Menurutnya, salah satu yang mencirikan masyarakat modern adalah adanya kepercayaan yang sangat tinggi terhadap wacana-wacana besar berbagai ilmu pengetahuan, termasuk sejarah, yang telah dianggap sebagai sumber kebenaran yang memiliki kaitan langsung secara objektif dengan kenyataan. Wacana-wacana ini, yang disebut Lyotard sebagai narasi besar, berada di ranah publik dan menempatkan narasi kecil, seperti pengalaman-pengalaman subjektif pribadi dan mitos yang tidak rasional, ke dalam ranah domestic (Aritonang, 2024).

Padang (Winanti, 2020); pilkada Kota Palembang (Mahsun, 2020); pilkada kabupaten Sleman ((Harjanta, 2021); Pilkada kabupaten Tulung Agung tahun 2018 (Saputra, 2019). Bahkan terjadi pada pilkades di Sulewesi dan NTB (Fathudin et al., 2020) dan (Tome et al., 2021). Patronase dan klientelisme berakibat pada terjadinya sengketa pada pemilihan (Novareza et al., 2023).

Problem lain dikemukakan oleh Makhya (2015) bahwa pilkada merupakan kompetisi yang melibatkan elit politik, birokrat, dan pengusaha, *money politic*, pragmatisme pemilih, rendahnya kualitas penyelenggara pemilu di kabupaten/kota, kondisi jalan rusak, geografis yang luas. Para pemenang pilkada melakukan praktek patronase seperti praktek *power sharing* (berbagi kekuasaan), praktik *rent seeking*, jabatan dibagikan kepada PNS yang menjadi tim sukses, program-program bantuan sosial, pembangunan jalan disalurkan kepada konstituen. Pola ini berkontribusi bagi para *incumbent* pada pemilihan selanjutnya karena pola ini membuat keberlanjutan hubungan patron klien atau *reciprocikal* Dalam hal biaya pemilihan yang berasal dari pengusaha, maka setelah keterpilihan calon para pengusaha memanen berbagai fasilitas sebagai bayaran selama pemilihan atas system ijon. (Setiawan et al., 2022).

Di dalam buku "*Democracy for Sale*", yang ditulis Erdward Aspinall dan Ward Berenschot (2019) dijelaskan bahwa klientelisme merupakan kolaborasi politisi-pengusaha dalam memenangkan pilkada atau pemilu. Di dalamnya terdapat praktek pertukaran barang atau kepentingan antara pemilih (*voters*) dan calon untuk memperoleh dukungan politik. Namun, biaya atau modal untuk membeli suara diperoleh dari pengusaha sehingga dapat dikatakan pemilu atau pilkada merupakan arena "pertempuran" antar patron (*cukong*). Para cukong menentukan siapa pemenang (Risal et al., 2022). Menurut (B. D. Kurniadi, 2022) dan (Stokes 2009), incumbent menggunakan *pork barrel*[3]

[3] pork barrel politic atau politik gentong babi adalah upaya politik distributif yang dilaksanakan di lokasi yang berkaitan dengan politisi, menggunakan anggaran negara untuk meningkatkan keterpilihan calon tertentu. Politik pork barrel bersifat regional atau konteks kewilayahan yang menjadi basis suaranya menjadi target untuk basis keempat, bersifat diskriminatif, tidak bersifat mengikat konstituennya untuk memilih incumbent. Ini berbeda

untuk menjaga relasi patron dan klien sebagai strategi pemenangan berikutnya. Hasil observasi pada beberapa anggota legislatif yang sudah menjabat minimal 1 (satu) periode, 2 periode dan, 3 periode menggunakan pola *pork barrel* (Handi Mulyaningsih, 2020-2023) untuk menjaga hubungan dengan konsttituen yang didistribusikan di daerah-daerah dimana suaranya didulang.

Praktek *patronase*[4], *klientelisme*[5], *primordialisme*[6], *olygarkhi*[7] pada pemilu dapat berdampak pada menurunya nilai-nilai kesetaraan (*egalitarian*), keragaman (*pluralisme*), *toleransi*, dan hak-hak asasi manusia (Huda, 2010). Prinsip-prinsip tersebut diatur di dalam konstitusi, bahwa setiap warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Selanjutnya diatur bahwa pemilu didasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hak politik setiap individu dalam memilih yang bebas dan rahasia telah tergadaikan dengan politik uang. Meskipun dilarang ada politik uang, politisasi identitas, keberpihakan PNS dan jabatan-jabatan tertentu namun praktek tersebut terus berlangsung. Realita politik uang dianggap kebiasaan, salah tetapi diterima sebagai bukan kesalahan. Politik uang iibarat angin yang dapat dirasakan namun tidak nampak wujudnya telah menjadi

---

dengan patronase yang bersifat mengikat yaitu distribusi sumber daya dilakukan jika konstituen telah memilih incumbent (Saragintan & Hidayat, 2017).

[4] Patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/ Komunitas. Dana yang dibagikan dapat bersumber dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara) atau dari dana publik (misalnya, proyek-proyek pork barrel yang dibiayai oleh pemerintah) (Aspinall, 2015).

[5]Klientalisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.Klientelisme merupakan ‘relasi kekuasaan yang personalistik‘ (Hutchcroft 2014: 177), dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik.

[6] Ikatan Primordial menurut Geertz (Berger, 2006; Fionna, 2016; Hadiz, 2017; Miedema, 2010; Weiss, 2010) adalah ikatan yang berasal dari unsur-unsur bawaan, atau lebih persis lagi unsur-unsur bawaan yang diandalkam dari kehidupan sosial, hubungan langsung dan terutama hubungan kekerabatan, komunitas religius tertentu, bahasa tertentu, dialek, dan mengikuti praktek-prakter sosial tertentu.

[7] Oligarki merupakan sistem politik di mana pihak yang memerintah terdiri atas sekelompok orang (elit). Mereka menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasai. Aristoteles mengatakan oligarki adalah sebuah sistem pemerintahan oleh sedikit orang kaya yang biasa disebut kaum aristokrat, bertujuan demi kepentingan pribadi mereka dan tanpa keadilan ((Suteki, 2022)

sumberdaya politik yang merusak kejujuran hati nurani dan kesadaran pemilih. Seperti memilih karena faktor "NPWN atau Nomor Piro Wani piro".

Praktek politik politik uang, politisasi indentitas itu merusak pembangunan multikultur (Fathudin, etc, 2020). Padahal pembangunan multikultur sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan (Levitsky & Ziblatt, 2019). Apalagi bagi Indonesia yang sangat multikultur selain merupakan kekayaan juga potensial terjadinya kerawanan. Pada pemilu serentak 2019, multikultur telah dijadikan alat pencari dukungan yang berdampak pada fenomena politik kebencian (Angareini et al., 2021). Politisasi identitas tersebut menunjukkan bahwa demokrasi gagal dalam memperhatikan pluralisme sebagaimana dinyatakan Schmitt (dalam Hargens, 2015). Menurut Laclau-Mouffe demokrasi mengandung paradoks antara nilai persamaan dan keadilan umum, gagal memahami pluralisme dalam artikuralime politik (dalam Hargens, 2015).

Deskripsi tentang perebutan sumberdaya politik telah banyak dilakukan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dan banyak penelitian lain yaitu munculnya etnosentrisme etnosentrisme dan konflik.; munculnya polarisasi etnis (Muhammad et al., 2022); praktek politik identitas dalam masyarakat multikultur (Baidawi, 2022); Strategi pemenuhan hak elektoral kelompok minoritas suku Anak Dalam (Hertanto et al., 2021); Perebutan penguasaan terkait pemekaran wilayah (Roth 2009; Tanasaldy (2009); Tanasaldy 2012) dalam (Abdulkadir-sunito et al., 2017); Untuk memperoleh pengaruh dalam ekonomi politik lokal (Aragon 2009; Sjaf 2014). Telah banyak penelitian tentang perebutan sumberdaya politik etnis terkait dengan modal sosial yaitu konsep klientelisme (T. Hilgers, 1999); Patronase, klientelisme dan politik identitas (Fathudin et al., 2020); Hubungan patron klien pada pilkada (Nastain & Nugroho, 2022); Patronase di Indonesia (Berenschot, 2018); Strategi pemenangan partai Gerindra (Rosyid Halimur, 2019).

Meskipun telah banyak penelitian tentang perebutan sumberdaya politik pada etnis minoritas, tetapi yang terkait dengan etnis Semende belum banyak

dilteliti, apalagi dilakukan di internal partai politik. Tentang Etnis Semende, telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa Etnis Semende realitasnya ada, dan memiliki karakteristik etnis yang khas diantaranya memiliki bahasa lisan dan tulis dan kearifan tradisional yang mampu membuatnya melakukan teknik perkebunan yang tidak merusak hutan. Hal ini didasari nilai-nilai kolektivitas *Tunggu Tubang* yang membuat tanah warisan tidak terpecah karena tanah warisan tidak dibagikan tetapi diturunkan dari generasi ke generasi. Kehidupan sosial etnis Semende ini penting diteliti apalagi dikaitkan dengan perebutan kekuasaan. Kalaupun telah banyak penelitian tentang perebutan kekuasaan pada saat pemilu, tetapi penelitian tentang perebutan kekuasaa antar calon pada etnis minoritas di internal partai politik juga masih belum pernah dilakukan. Padahal sangat penting untuk mengetahui bagaimana etnis yang kohesivitasnya tinggi melakukan perebutan suara diantara mereka, bagaimana kontribusi lembaga adat pada pemenangan, sehingga hingga kini tidak terjadi polarisasi sosial dan politik. Sedangkan banyak peristiwa sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa etnis minoritas menjadi ajang perebutan kekuasaan.

Oleh karena itu, penting melakukan penelitian pada etnis minoritas, agar semakin banyak diperoleh fakta-fakta sosial tentang kontribusi Etnis minoritas. Terdapat paling tidak dua hal penting sebagai argumentasi. Pertama Indonesia sangat multikultural, yang pada masa orde lama digunakan sebagai alat untuk tujuan revolusi. Pada masa orde baru, diarahkan untuk mendukung program pembangunan, diintegrasikan untuk persatuan nasional. Pada era reformasi, individu dan atau komunitas budaya memperoleh hak-hak kultural tradisionalnya, hukum adat serta tanah ulayat, memperoleh otonomi khusus seperti provinsi Aceh dan Papua Barat, dan menjadi modal bagi pemberdayaan masyarakat (Prasisko, 2019). Pada sisi lain, hasil penelitian menunjukkan budaya tidak ada korelasinya dengan pembangunan. Sehingga tidak dikhawatirkan melaksanakan pembangunan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang multikutur. Dalam banyak hal, multikulturalisme dapat memberikan kontribusi positif bagi Pembangunan (Nuryana, 2002)

Terkait dengan hal tersebut di atas, penelitian tentang etnis minoritas dalam perebutan sumberdaya politik terutama di internal partai politik semakin penting. Selama ini penelitian tentang perebutan sumberdaya politik telah dilakukan tetapi menggunakan perspektif komunikasi (Gunanto et al., 2020); Relasi *money politic* antara calon dan pemilih (Alfitri, 2014); Preferensi pemilih (Azizurrahman, 2020). Sedangkan penelitian tentang Etnis Semende yang telah dilakukan adalah tentang Tunggu Tubang (Efrianto (2017); Harsuno et al. (2018); Mobilitas, desa, sawah (Rahmat & Iskandar, 2015); Pewarisan (Velinda et al., 2017; Manangin et al., 2020; Roryan et al., 2020); perkawinan (A. Mukhlishin et al., 2017); Pendekatan Syiyasah pada pemilihan kepala desa dengan intimidasi dan politik uang (Disanto, 2019). Dengan demikian kebaruan penelitian dengan tema perebutan penguasaan sumberdaya politik etnis Semenende di internal partai poltiik sangat signifikan untuk diteliti.

Pada sisi teoritik, penelitian yang menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens juga telah digunakan khususnya terkait politik, kekuasaan, dan agen. Tentang agen, telah dilakukan penelitian dalam hubungannya sebagai agen perubahan, penguasaan, di ruang publik terkait budaya, hukum, teknologi. Hasil pengkajian dengan metode Nvivo menunjukkan bahwa penelitian tentang kekuasaan dengan teori strukturasi telah dilakukan pada tataran implementasi, pendekatan, organisasi, fenomenologi, kualitatif, pendekatan kasus, meneliti agen dan struktur, di desa dan di kota. Penggunaan teori strukturasi banyak dilakukan terkait etnis minoritas tetapi dalam hubungannya dengan Agama Islam, transindividual, dilakukan dengan metode kualitatif, studi kasus. Penelitian tentang etnis minoritas telah dilakukan pada *cluster agency*, etnis minoritas, gender, etnis tionghoa; *cluster agent*, *chang*e dan etnik; mayoritas, dan struktur. Empat *cluster* tersebut belum terhubung dengan teori strukturasi, dan budaya meskipun telah terhubung dengan struktur dan agensi.

Penelitian dalam disertai ini fokus pada perebutan penguasaan sumberdaya politik yang terjadi di internal partai politik pada etnis Semende sebagai etnis minoritas, menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens. Penggunaan teori strukturasi ini berbeda dengan teori-teori yang menggunakan pendekatan fenomenologis atau naturalistik yang menafsirkan realitas dan berusaha membangun teori berdasarkan apa yang dialami oleh subyek. Hal ini juga berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang memulainya membangun teori atau hipotesis dan berusaha membuktikan kebenarannya. Sedangkan teori Strukturasi menekankan dualitas bahwa struktur membentuk perilaku agen, dan sebaliknya agen membentuk struktur. Dalam hal ini, struktur struktur tidak bersifat *constrained* (kekangan) tetapi merupangan kekangan (*constraining*) tetapi juga *enabling*. Sehingga individu bukanlah aktor yang bebas sepenuhnya dari pengaruh struktur, bahkan dapat mempengaruhi bagi terbentuknya struktur. Keduanya membentuk praktek sosial secara dualita.

Dengan demikian teori strukturasi tepat untuk menganalisis peristiwa pemilu 2019 dimana ada 4 calon dari etnis Semende terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Kecamatan Pulau Panggung. Namun bagaimana perebutan dilakukan, dan bagaimana kontribusi lembaga adat dan kekerabatan pada perebutan sumberdaya politik. Penelitian ini bukan studi kasus. Pilihan terhadap partai Politik PKB bukan karena kasus khusus, karena yang diteliti adalah struktur dan agensi pada perebutan sumberdaya politik. Pilihan pada partai PKB karena argumentasi salah satu calon di partai PKB memperoleh suara terbanyak (10%) dari total perolehan suara PKB. Memang PDIP memperoleh dua kursi tetapi tidak dari Kecamatan Pulau Panggung, PPP memperoleh satu kursi (9,1%) suara, dari PAN memperoleh satu kursi (3,8% suara); partai Nasdem memperoleh 1 kursi (11%) suara namun setelah 6 bulan anggota DPRD tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di partai PKB dengan argumentasi perolehan suaranya terbanyak di Kecamatan Pulau Panggung, dan memungkinkan untuk diteliti terkait perebutan suara antar calon di internal partai politik.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian tentang perebutan penguasaan sumberdaya politik pada etnis minoritas sudah banyak dilakukan terutama kaitan perebutan dengan politik identitas, dampak perebutan terhadap konflik, agama, ras dan etnis. Namun penelitian tentang perebutan penguasaan sumberdaya politik Etnis Semende oleh para kandidat dari Etnis Semende di internal partai politik PKB belum pernah diteliti. Pada penelitian ini masalahnya dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah perebutan penguasaan sumberdaya politik etnis Semende di internal partai politik PKB pada pemilu 2019 ?
b. Bagaimanakah kontribusi pada lembaga adat dan kekerabatan Etnik Semende di dalam pemenangan kandidat partai PKB pada pemilu 2019?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis perebutan penguasaan sumberdaya politik etnis Semende di internal partai politik PKB pada pemilu 2019.
b. Untuk menganalisis kontribusi Struktur dan Agen pada lembaga Adat dan kekerabatan di dalam pemenangan kandidat partai PKB pada pemilu 2019.

1.3.2. Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritik penelitian ini berkontribusi pada:

a. Pengembangan konsep pembangunan terutama pembangunan masyarakat multikultural terutama kultur etnik minoritas yang selama ini masih termarginalisasi oleh desain bernarasi besar. Sejatinya konsep pembangunan idealnya inklusif, tidak hanya menuju struktur narasi besar, tetapi juga kental narasi etnisitas.

b. Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk menjelaskan bahwa masih ada pola perebutan penguasaan sumberdaya politik pada etnis minoritas yang tidak sepenuhnya dipengaruhi aspek-aspek patronase dan klientelisme. Kuatnya kekerabatan pada etnis minoritas yang kohesivitasnya tinggi, hidupnya berpegang pada nilai-nilai, norma-norma kekeluargaan, telah membawa relasi struktur dan agensi pada perebutan kekuasaan yang tidak mengedepankan patronase, klientelisme. Primordialisme menjadi nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam perilaku politik yang mampu mengeliminir perebutan sumberdaya politik yang melalui politik uang.

c. Penelitian ini memberikan manfaat teori strukturasi Anthony Giddens (2011) bahwa struktur dapat mengekang (*constraining*) dan membebaskan. Manusia melakukan tindakan secara sengaja untuk mencapai tujuan-tujuan , pada saat yang sama, tindakan manusia memiliki *unintended consequences* (konsekuensi yang tidak disengaja) dari penetapan struktur yang berdampak pada tindakan manusia selanjutnya. Teori ini menjelaskan bahwa manusia adalah agen yang memiliki tujuan yang didasarkan alasan-alasan atas aktivitas-aktivitasnya dan mampu menguraikan alasan itu secara berulang-ulang. Penelitian ini memberikan kontribusi pada teori strukturasi Anthony Giddens bahwa struktur itu membebaskan (*enabling)* namun juga mengekang (*constraining*). Struktur tidaklah netral, struktur *constraining* pada perempuan, *enabling* pada laki-laki. Struktur yang demikian berakibat pada terhambatnya proses memproduksi dan mereproduksi struktur yang diharapkan.

2. Manfaat Praktis:

a.Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan bahwa masih ada pola perebutan penguasaan alternatif dari kebuntuan perebutan kekuasaan yang dipenuhi dengan wacana politik uang dengan pola patronase dan klientelisme. Setidaknya, walau primordialisme juga mengandung kelemahan dalam pembangunan multikultural, namun primordialisme

mampu meminimalisir politik uang yang memiliki kemampuan merusak kearifan tradisional Etnis Semende.

b.Untuk memperbaiki regulasi kepemiluan yang dapat mengatur perebutan penguasaan sumberdaya di internal partai politik. Diperlukan regulasi yang menjamin kesetaraan antar calon sehingga tidak terjadi kesenjangan modalitas yang tinggi diantara calon. Kesetaraan antar calon di internal partai politik akan mengurangi efek negatif perebutan sumberdaya politik yang sarat dengan persaingan, kontravensi dan konflik di internal partai politik dengan cara-cara yang melampaui batas norma-norma.

c.Penelitian disertasi ini memberikan manfaat praktis berupa ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami sosiologi kebudayaan terutama pada etnis minoritas dalam perebutan sumberdaya politik. Ketersediaan sumberdaya ini akan membantu penyelesaian pembangunan dari aspek sosial, mengiringi pembangunan fisik.

1.4. Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

Penelitian ini asli atau tidak merupakan jiplakan karya peneliti lain, baik dari sisi ide, tema, metode penelitian, teori yang digunakan, lokasi penelitian, hingga hasil dan pembahasan, *novelty*, dan kesimpulan. Penelitian ini mereferensi hasil-hasil penelitian, buku, jurnal, yang dikutip sesuai dengan tata cara yang telah diatur.

BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sumberdaya Politik

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat berwujud (*tangible*), tetapi juga tak berwujud (*intangible*) (Wlkipedia, 2022). Di dalam kamus Ensiklopedia Webster didefinisikan sumberdaya adalah kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, sumber persediaan, penunjang atau bantuan, sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang (Sitorus & Sojanah, Grima dan Berkes (1989). Fauzi (2006) mendefinisikan sumber daya sebagai aset untuk menentukan kepuasan atau utilitas manusia.2018). Sumber daya yang membentuk materi politik identitas, yaitu bahasa dan praktik kultural. Semuanya dibentuk secara berbeda pada konteks kultural yang berbeda pula.

Politik menurut Miriam Budiardjo (1983), adalah aktivitas terkait kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian. Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lain. Politik adalah aktivitas individu atau kelompok-kelompok untuk mengambil keputusan kolektif dengan cara damai.

Sumber daya politik adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. manusia yang terlibat dalam politik, yang melekat di dalamnya nilai-nilai yang potensial untuk mencapai tujuan politik. Blau mengatakan bahwa sumber kekuasaan adalah kontrol atas ketidakpastian atau kuasa untuk mengatur. Menurut Bourdeau, sumber daya politik adalah modal budaya, modal sosial, modal ekonomi dan modal simbolis. Menurut (Aspinall & Sukmajati, 2015), yang disebut politik uang merupakan sumber kekuasaan. Politik uang adalah praktik distribusi uang (uang tunai atau barang) dari kandidat kepada

pemilih di saat pemilu. Ada dua model politik uang yaitu patronase dan klientelisme.

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015), patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara) atau dari dana publik (misalnya, proyek-proyek pork barrel yang dibiayai oleh pemerintah). Meskipun demikian, kami membedakan patronase dengan materi-materi yang bersifat programatik (programmatic goods)[8], yaitu materi yang diterima oleh seseorang yang menjadi target dari program-program pemerintah, misalnya, program kartu pelayanan kese hatan yang menawarkan perawatan gratis untuk penduduk miskin.

2.2. Modal Sosial, Modal Ekonomi, Modal Politik, Modal Simbolis

Menurut Bourdieu terdapat empat modal politikyaitu modal ekonomi yaitu modal berupa alat-alat produksi, kekayaan materi dan uang. Kedua, modal budaya berupa pendidikan formal maupun keluarga. Ketiga, modal sosial atau jaringan yang dimiliki individu dan keempat yaitu, modal simbolis segala bentuk status, otoritas dan legitimasi. Modal sosial adalah sumber daya yang ada di masyarakat berupa aturan-aturan atau norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi dasar dalam membangun interaksi sosial antara individu-individu. Modal sosial tersebut memberi kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat.

> *Menurut Coleman (1999), modal sosial adalah kapasitas sosial untuk berkolaborasi agar ada tujuan yang sama, di dalam berbagai kelompok dan institusi. Burt (1992), mendefinisikannya sebagai kapasitas sosial dalam kerjasama antara individu dengan individu sehingga menjadi*

8

power dalam ekonomi dan sosial. Menurut Prusak L (Field, 2010:26), modal sosial ada karena ada keyakinan (trust), saling memahami (mutual understanding), dan nilai-nilai bersama (shared value) yang membuat anggotagrup melakukan aktivitas bersamana untuk mencapai tujuan. Menurut Hasbullah (2006), modal sosial adalah totalitas sumber-sumber daya, nyata pada seseorang dan bertahan lama dan telah diinstitusikan berdasarkan pengetahuan dan pengenalan timbal balik. Menurut Partha dan Ismail (2009), modal sosial adalah hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam skala yang luas, menjadi perekat sosial (social glue) anggota kelompok.

Berdasarkan definisi tersebut ada 4 (empat) komponen modal sosial yaitu trust, jaringan, norma-norma, nilai-nilai:

a. **Trust atau (kepercayaan)**.

Trust atau kepercayaan bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama. Kepercayaan bukan dimensi penjumlahan dan kalkulasi rasional kognitif, tetapi ukuran penyangga antara keinginan yang sangat dibutuhkan dan harapan secara parsial. Kerjasama harus didasarkan adanya saling percaya di antara pihak yang terlibat dan dapat meningkatkan toleransi terhadap ketidakpastian (Damsar, 2009:202)

b. Nilai dan Norma (Norms)

Nilai merupakan bagian penting dari kebudayaan, suatu tindakan dianggap sah apabila harmonis dan selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan tersebut dilakukan (Setiadi dan Kolip, 2011:119). Norma-norma yaitu aturan-aturan yang fungsinya untuk menjaga agar masyarakat hidup tertib (Setiadi dan Kolip, 2011:131). Norma tumbuh melalui pembiasaan, sejarah, tokoh yang membangun tata cara perilaku individu dalam mengatur kepentingan diri sendiri dan kelompok (Fukuyama, 1996).

c. Jaringan

Fukuyama (2002: 324) menjelaskan bahwa jaringan merupakan landasan untuk timbulnya keeratan sosial karena memotivasi anggota masyarakat untuk bekerjasama untuk mendapatkan manfaat timbal balik (Field, 2010).

Sedangkan (Kimberly L. Casey.2008) menyebutkan terdapatb7 (tujuh) modal dalam kontestasi yaitu pertama modal politik, yaitu modal lembaga yaitu suatu aturan dan pola relasi antar individu yang terikat satu sama lain. Kedua, modal sosial jaringan yaitu hubungan jaringan seseorang untuk bisa mendapatkan posisi daalam kelompok sosial. Ketiga, modal manusia sumber daya yaitu kepemilikan kemampuan intelektual atau kualitas seorang aktor itu sendiri. Keempat, modal ekonomi berupa potensi dana atau biaya. Kelima, modal simbolik merupakan simbol yang dimiliki oleh seseorang dan diketahui oleh orang banyak. Modal simbolik berkaitan erat dengan modal budaya seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, status tinggi, dan keluarga ternama. Keenam, modal budaya budaya berupa tingkat pengetahuan yang dapat mempengaruhi ide dan gagasan seseorang. Ketujuh, modal moral merupakan suatu daya tarik yang penting oleh aktor yang ingin menarik hati ebutkan

Modal simbolik merupakan bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional atau non-institusional. Modal simbol memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas, sehingga mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan tentang realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah bangsa. Kekuatan modal simbolik merupakan derajat akumulasi prestise, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan, dan dibangun di atas dialektika pengetahuan (*connaissance*) dan pengenalan (*reconnaissance*). Modal simbolik tidak lepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan dukungan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi.

Tentang modal ekonomi, modal sosial, modal simbolik, modal budaya dijelaskan sebagai berikut:

a. Modal Ekonomi merupakan mudah dikonversi ke dalam bentuk-bentuk modal lainnya, bahkan dapat diwariskan (Abd. Halim). Menurut Bourdieu modal ekonomi sebagai milik pribadi mudah dipertukarkan secara langsung, relatif

paling independen dan fleksibel dalam penggunaannya (Nanang Krisdinanto, “Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai”).

b. Menurut Bourdieu, modal sosial terdiri dari tiga elemen: pertama institusi-institusi, norma, nilai, konvensi, konsep hidup, *codes of condust*, dan sejenisnya. Kedua, pola pengelolaan modal sosial berupa nilai produktif yang fungsinya untuk membangun keeratan sosial (*sosial cohesiveness*). Ketiga, keberfungsian modal sosial dalam berinteraksi, negosiasi dan adaptasi.

c. Modal sosial ada di dalam diri seseorang misalnya kerjasama dalam institusi baik keluarga, organisasi, dan semua hal yang mengarah pada kerjasama. Modal sosial merupakan potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok, untuk saling memperhatikan, membangun kepercayaan, berjaringan, membangun norma dan nilai dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok (Bourdieu, n.d.); (Field, 2010); (Sulaeman & Homzah, n.d.) menyatakan apabila modal sosial dikelola dengan baik, modal sosial menguntungkan kandidat, sebaliknya apabila salah dalam pengelolaan akan merugikan kandidat. (Sumarno et al., 2013).

d. Akumulasi modal sosial kandidat tergantung pada keluasan jaringan yang mampu dimobilisasikan dan tergantung pada akumulasi modal lainnya (ekonomi, kultural dan simbolik) yang dimiliki kandidat lain. Menurut Francis Fukuyama, modal sosial yang penting adalah kepercayaan (trust) karena menjadi dasar pengikat terbangunnya kerjasama (*cooperation)* dan koordinasi (*coordination*). Kepercayaan memunculkan adanya hubungan timbal balik dan aksi massa yang bersifat *genuin*, yang disebabkan motivasi bersama yang dapat menggerakkan modal sosial yang terpendam. Dalam hal ini Giddens mengklasifikasikan dua tipe kepercayaan yaitu *abstract systems*, yakni kepercayaan yang terbangun sebagai implikasi dan berfungsinya istitusi-institusi publik dengan baik; dan kepercayaan terhadap personal, yang terbangun sebagai implikasi adanya interaksi intim dan terus menerus antar individu.

Menurut Lin (1999),[9] (Burt, 2000)[10], Coleman[11] (1988) modal sosial perlu diperkuat dan diproduksi sebagai investasi sosial dalam jejaring sosial. Innvestasi sosial ini menurut Bourdieu dan Putnam dapat diproduksi dengan saling memberikan penghargaan dan pengakuan. Menurut Putnam, dalam masyarakat yang homogen, jaringan ini bersifat intim, kuat, melekat atau *bonding.* (Santoso, 2020), tetapi *bridging* dalam masyarakat ini longgar, terbuka, plural. Para teoritisi sosial sepakat bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang penting dalam memperkuat dan mereproduksi modal sosial.

Ada tiga cara untuk mengukur kekuatan modal sosial. Pertama, menghitung dukungan kelompok kolektif dibandingkan dengan jumlah dukungan kandidat lain, dan menghitung dukungan seseorang. Asumsinya, dukungan seseorang akan membawa pada dukungan kolektif. Kedua, ikatan calon kelompok-kelompok dengan kandidat. Pengukuran ketiga adalah seberapa dikenal calon dalam pemilihan (Santoso, 2020).

2.3. Agen dan Struktur Dalam Perebutan Sumberdaya Politik

Teori strukturasi mencoba menengahi problem dualism (pertentangan) antara teori struktural fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis. Giddens menolak pandangan struktural-fungsional yang naturalistik yang meniadakan agen. Giddens juga menolak konstruksionisme-fenomenologis yang meniadakan peran struktur. Giddens menengahi bahwa struktur tidak disamakan dengan kekangan *(constraint*) namun selalu mengekang *(constraining)* dan membebaskan *(enabling)*. Struktur tetap memiliki kekuatan untuk mengintervensi individu melalui ruang dan waktu diluar kesadaran individu. Hubungan struktur dengan agensi bukan dualism melainkan dualitas.

[9] proses pembentukan modal sosial dan manfaatnya bagi individu melalui bagan yang dikenal dengan model modal sosial. Model modal sosial Lin terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: ketidaksetaraan, pembentukan modal sosial dan dampak modal sosial

[10]Modal manusia hanya efektif dalam konteks sosial dan belum tentu dalam kontek yang lain

[11]Modal sosial terbangun dari berbagai struktur sosial yang melibatkan hubungan antar pihak. Hubungan antar pihak atau actor disebut sebagai struktur-struktur sosial yang selanjutnya dikenal sebagai sumberdaya modal sosial.

Menurut Giddens, struktur dan agensi bukan dua aspek yang terpisah. Keduanya memiliki hubungan yang tidak terpisah (dualitas) seperti dua sisi mata uang yang bisa dibedakan tetapi tak bisa dipisahkan. dipandang sebagai dualitas (duality), dua sisi mata uang yang sama. Antara struktur dan agen memiliki saling keterhubungan timbal balik atau bersifat dialektik atau saling mempengaruhi y sepanjang waktu dan ruang tanpa henti (Giddens,1984 dalam Hidayat, 2000:440).

2.3.1 Agen Dalam Perebutan Sumberdaya Politik

Menurut Giddens, "agensi" adalah individu yang melakukan *sosial practices ordered across space and time.* Sebagai agen, manusia bertindak dalam kesadarannya untuk mencapai tujuan, tindakannya memiliki *unintended consequences* (konsekuensi yang tidak disengaja) struktur yang ada. Manusia menurut teori strukturasi yaitu agen pelaku yang memiliki tujuan dengan alasan-alasan atas aktivitas-aktivitasnya dan mampu menguraikan alasan itu secara berulang-ulang. Agen bisa mempengaruhi struktur, untuk mengimplementasikan apa yang dikehendaki aktor secara berkelanjutan berdasarkan sumberdaya yang dimiliki. Lalu agen-agen mereproduksi kognisi, mendukung atau bahkan menggerus struktur.

Menurut Giddens, agen tidaklah bebas sepenuhnya dari struktur tetapi tetap mengikuti dan dalam pantauan struktur. Menurut Giddens setiap manusia merupakan agen yang betujuan *(purposive agent)* karena sebagai individu memiliki dua kencenderungan, yakni memiliki alasan-alasan untuk tindakan-tindakannya dan kemudian mengelaborasi alasan-alasan ini secara terus menerus sebagai bertujuan, bermaksud dan bermotif (Susilo, 2008: 413). Sedangkan agensi mengacu pada perbuatan, kemampuan atau tindakan otonom untuk melakukan apa pun (Argyo, 2013).

2.3.2. Struktur Pada Perebutan Sumberdaya Politik

Menurut Giddens, struktur ada di luar tindakan individu (eksternal) bagi tindakan manusia, yang mengekang kekuasaan individu secara otonom. Struktur membuat individu berada di titik kritis antara agen atau bukan (Giddens, 2011: 20)**.** Wisnu

mengambil pendapat Mc Anulla yang mendefinisikan struktur sebagai aturan, norma, dan kepercayaan yang membentuk karakter pada kehidupan sosial. Sementara itu, agen diartikan sebagai perilaku sosial dan interaksi manusia, yang keduanya kemudian dikenal dengan istilah dualitas struktur (https://fisipol.ugm.ac.id/diskusi-kontribusi-pemikiran-giddens-dalam-ilmu-komunikasi).

Konsep struktur menurut Giddens bukanlah sebagaimana dijelaskan Durkheim. Struktur menurut Durkheim berasal dari luar individu yang memaksa aktor. Struktur menurut Giddens (2011), struktur adalah yang membentuk dan menentukan kehidupan sosial tetapi bukan struktur itu sendiri yang membentuk dan menentukan kehidupan sosial itu. Struktur dalam pengertian Giddens adalah *rules and resources* yang dipakai pada sistim produksi dan reproduksi. Struktur sebagai aturan dan sumber daya digunakan oleh agen dalam interaksi. Aturan (rules) adalah prosedur yang digeneralisasi dan metodologi yang dimiliki oleh agent reflektif dalam "*stocks of knowledge*" yang impilisit dan digunakan sebagai formula bagi tindakan dalam sistem sosial. Struktur juga melibatkan penggunaan sumber daya (*resources*) yang terdiri dari peralatan material dan kapasitas organisasional. Sumber daya merupakan hasil dari penguasaan peralatan material dan organisasi dan mereka yang memiliki sumber daya bisa memobilisasi kekuasaan.

2.4. Perebutan dan Penguasaan

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), bahwa perebutan dari asal kata rebut yang artinya mengambil dengan paksa. Berebut adalah berlomba-lomba (dahulu-mendahului) untuk mendapat kedudukan. Perebutan, dapat dilakukan berganti-ganti mengambil sesuatu (dengan kekerasan); dengan paksa. Perebutan adalah proses, cara, perbuatan merebut (merampas) untuk memperolah jabatan presiden, anggota legislatif, kepala daerah.

Penguasaan berasal dari kata dasar kuasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai

atau menguasakan. Penguasaan itu sinonim atau memiliki kesamaan makna dengan pemilikan; aneksasi, pencaplokan, pendudukan, penyerobotan, perebutan; penaklukan, penundukan; kebisaan, kecakapan, kemahiran, kemampuan, keterampilan, kompetensi.

Dalam Bahasa Inggris, penguasaan adalah *domination, authority, command, control, mastery*. Adapun makna menguasai adalah perbuatan untuk menggunakan atau memanfaat, bukan untuk memiliki. Definisi atau arti kata penguasaan berdasarkan KBBI Online adalah kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan; wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) sesuatu.

Jadi penguasaan adalah proses atau perbuatan atau kemampuan untuk menguasai atau memanfaatkan sesuatu. Penguasaan itu dilakukan penguasa atau orang yg berkuasa (untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah, dan sebagainya). Misalnya sikap gotong royong masyarakat kerap dimanfaatkan oleh para penguasa untuk membangun lingkungan desa. Perebutan penguasaan sumberdaya politik adalah proses atau cara merebut sumberdaya politik. Pada pemilu legislatif, para calon berebut sumberdaya politik dalam satu partai dan antar calon partai dengan calon partai yang lain.

2.5. Kompetisi, Kontravensi, Konflik

Perebutan penguasaan sumberdaya politik tidak hanya membutuhkan modal sosial, namun membutuhkan strategi. Dalam kondisi sumberdaya politik yang terbatas, persaingan perebutan sumberdaya politik dilakukan melalui kompetisi, kontravensi dan konflik.

2.5.1. Konsep Kompetisi (Persaingan/*Competitive*)

Menurut Schattscheneider (1942) demokrasi merupakan sistem yang berbasis persaingan antar partai politik dan pemilihlah yang menentukan, sebagai pihak yang berada di luar sistem dan orgaisasi partai. Menurut Firmanzah (2010) konsep

persaingan politik penting dalam memenangkan perebutan sumberdaya politik. Dalam persaingan digunaka prinsip ‘zero sum’ bahwa kemenangan satu pihak merupakan kekalahan dari pihak lain. Prinsip yang harus dipegang teguh dalam kompetisi adalah sejauh mana kontestan dapat ‘merebut hati’ rakyat melalui program kerja yang ditawarkan. Dalam kompetisi, kontestan harus aspiratif dan solutif bagi pemecahan masalah. Sehingga semakin meningkat persaingan maka kehidupan semakin baik. Strategi untuk memenangkan persaingan tentunya harus dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan standar dan ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku.

Deutsch (1973) mengemukakan Teori Kerjasama dan Persaingan (*Cooperative VS Competitive*) dan jenis tindakan yang diambil (*Bunggling Action VS Effective Action*). Ada tiga konsep untuk terjadinya persaingan atau kerjasama yaitu bagaimana tindakan seseorang mampu memenuhi niat orang lain, *cathexis* (disposisi individu untuk mengevaluasi diri atau lingkungannya), dan i*nducibility* (kesiapan individu untuk menerima pengaruh orang lain) (Deutsch, dalam Dudija, 2015). Deutsch (1973) mengasumsikan bahwa anggota tim bekerja untuk memajukan kepentingan diri mereka dengan berjuang untuk mencapai tujuan mereka. Akan tetapi, mengejar kepentingan pribadi tidak menghalangi perkembangan hubungan yang produktif dan kerja sama tim. Deutsch berpendapat bahwa tujuan yang dianggap terstruktur menentukan bagaimana orang berinteraksi, dan pola interaksi ini akan menentukan hasil.

2.5.2. Kontravensi

Kontravensi termasuk salah satu tipe interaksi sosial yang memiliki sifat disosiatif. Di dalam tipe interaksi sosial disosiatif terdapat konflik, kontravensi, persaingan. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kontravensi berarti mekanisme terjadinya kompetisi dan perseteruan yang ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tak menyenangi yang disembunyikan pada kepribadian seseorang. Contravention atau kontravensi ialah salah satu wujud proses sosial yang berada diantara kompetisi dengan perselisihan. Kontravensi dapat dilihat dengan timbulnya gejala-gejala

ketidakpastian pada diri seseorang atau pada sebuah rencana, perasaan tak menyenangi yang tersimpan dalam hati, kebencian, atau keragu-raguan kepada kepribadian seseorang. Kontravensi bisa tertuju pada suatu pandangan, pikiran, keyakinan, atau agenda yang dikemukakan oleh seseorang atau kategori lain (Ricky, 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontoversi ialah suatu perdebatan, persengketaan dan pertentangan. Oleh karena itu, kontravensi dapat diartikan sebagai perdebatan yang berlangsung di masyarakat, yang hangat diperbincangkan dan dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kontravensi ialah fenomena yang tanpa disadari sering terjadi di masyarakat. Misalnya kontravensi politik yang sering dibicarakan (Intan et al., 2015).

Kontravensi pada hakikatnya adalah suatu bentuk proses sosial yang berada antara pertentangan, persaingan serta pertikaian (Madani et al., 2016). Kontravensi memiliki bentuk yang beragam yaitu:

a. Perbuatan penolakan
b. Menyangkal pertanyaan
c. Melakukan penghasutan
d. Berkhianat
e. Mengejutkan lawan

Tipe Umum Kontravensi dalam (Noor Nizar Zulkimi Khuzaini, 2016) :

a. Kontravensi generasi masyarakat ialah kontravensi yang sangat umum terjadi terutama di era perubahan yang sangat cepat
b. Kontravensi seks merupakan perselisihan tentang hubungan suami istri dalam keluarga
c. Kontravensi parlementer merupakan perselisihan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan hubungan antara lembaga legislatif, keagamaan, pendidikan dan lain-lain.

Kontravensi dibagi menjadi 5 bentuk dalam (Noor Nizar Zulkimi Khuzaini, 2016) yaitu :

a. Bentuk kontravensi umum meliputi perlawanan, penolakan, kekerasan, protes, menolak pernyataan orang lain, pencemaran nama baik, dll.
b. Bentuk kontravensi intensif yaitu perbuatan mengahsut dan menyebarkan rumor yang mengecewakan atau merugikan pihak lain sehingga menimbulkan kontravensi yang intens.
c. Bentuk kontravensi rahasia yaitu suatu bentuk pengkhianatan atau pengungkapan rahasia pihak lain.
d. Bentuk kontravensi taktis yaitu mengejutkan lawan, menganggu dan menyebarkan propaganda, sehingga membingungkan pihak lain.
e. Bentuk kontravensi memaksa pihak lain untuk mengikuti kecenderungan intimidasi, provokasi dan kekerasan

Bentuk *contravention* menurut Leo von Wiese dan Howard Becker (1932:19) ada 5, yaitu :

a. Proses kontravensi pada umumnya mencakup tindakan-tindakan seperti penolakan, ketidaksukaan, konfrontasi, menghalang-halangi, protes, kekerasan, dan tindakan mengacaukan agenda pihak lainnya.
b. Terdapat juga bentuk kontravensi yang simpel, misalnya menyanggah pernyataan orang yang lain di muka umum, mengumpat orang lain, mencerca, memfitnah, atau meminta pembuktian terhadap pihak lain.
c. Ada juga bentuk kontravensi intensif yang meliputi penghasutan, menebar desas-desus, atau mengecewakan pihak yang lain.
d. Kontravensi yang bersifat rahasia, contohnya adalah menyebarkan rahasia orang lain dan berkhianat.
e. Kontravensi yang bersifat taktis misalnya adalah mengagetkan musuh, menakuti atau memusingkan kubu lawan (Ricky, 2014).

2.5.3. Konflik Dalam Perebutan Sumberdaya Politik

Konflik menurut Karl Marx disebabkan perbedaan akses terhadap sumber kekuasaan, yakni modal. Dalam masyarakat kapitalis, hal tersebut berakibat

pada dua kelas yang saling bertentangan, yakni kelas borjuis dan proletariat. Teori konflik melihat hubungan sosial sebagai sumber ketegangan dan konflik, sedangkan teori fungsionalisme struktural melihat hubungan sosial sebagai sumber kerjasama dan integrasi

Konflik merupakan proses sosial yang melibatkan individu-individu atau faksi-faksi yang saling mengajak berkelahi dengan ancaman kekerasan. Tujuannya untuk memperoleh profit dan menaklukkan pesaingnya. Konflik adalah benturan kekuatan dan kepentingan dalam proses perebutan sumber ekonomi, politik, sosial, budaya, yang disebabkan keterbatasan sumberdaya (Lawang, 1994).

Konflik politik disebabkan perbedaan, persaingan, pertentangan antar individu, kelompok, organisasi untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Menurut Hidayat (2002) konflik disebabkan kuatnya perbedaan dan benturan kepentingan antar pihak. Penyebabnya adalah perbedaan latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya; perbedaan pemikiran; adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak; faktor lingkungan yang tidak menyenangkan tetapi tidak dapat ditinggalkan; adanya harga diri yang terlalu besar sehinga ada keinginan untuk melakukan rekayasa dan manipulasi (Wahyudi, 2009).

Konflik terdiri dari dua yaitu konflik laten dan konflik manifest (nyata atau terbuka). Konflik laten adalah suatu keadaan yang didalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan agar bisa ditangani. Sedangkan konflik manifest adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar sangat dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

Menurut Dahrendorf (Dewa Agung, 2015:168) bahwa konflik yang masih bersifat latent dapat berubah menjadi *manifest conflict*, apabila masing-masing

dari individu maupun kelompok sadar akan kepentingannya. Menurut Bagong Suyanto dan J Dwi Narwoko (2005), perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.

Selain itu Bagong juga menjelaskan bahwa perbedaan kebudayaan.tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola prilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayan (Narwoko dan Suyanto (2005)

Menurut Subakti (1992), ada konflik positif yaitu yang tak mengancam eksistensi sistem politik sehingga penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan regulasi; dan konflik negative yaitu yang mengancam eksistensi sistem politik. Menurut Paul Conn dalam Surbakti (1992), menyebutkan ada dua karakter konflik yaitu konflik menang-kalah (*zero-sum-conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zero-sum-confict*). Konflik menang kalah merupakan konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat diharmonikan atau ada yang mengalah. Sehingga pemenangnya hanya satu, dan pihak lain tidak memperoleh apa-apa dari konflik yang terjadi. Konflik menang-menang

merupakan konflik yang masih memungkan adanya kompromi dan kerjasaman sehingga masih ada keuntungan yang diperoleh dari sebuah konflik.

Lili Romli (2017) menyebutkan bahwa konflik sering terjadi di internal partai politik, karena problem pelembagaan partai terutama ideologi dan platform, keeratan dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan kaderisasi. Lemahnya kaderisasi disebabkan belum matangnya pendidikan politik. Akibatnya partai mengambil jalan pintas mengambil kader luar dalam rekrutmen politik, atau sebaliknya kadernya menjadi kutu loncat perpindah ke partai lain. Sehingga sering terjadi konflik perebutan kedudukan atau kekuasaan, karena kebijakan-kebijakan politik, dan karena perbedaan orientasi terhadap lembaga-lembaga politik (Romli, 2011).

Maurice Duverger menyatakan bahwa konflik politik didasari motif ekonomi dan altruistik. Motif ekonomi yang paling kuat adalah yang tertuang dalam teori Charles Darwin tentang "*struggle for life*". Apabila jabatan merupakan motif utama untuk bertahan hidup maka akan muncul konflik yang keras. Sedangkan konflik altruistik disebabkan dorongan pelayanan publik atau panggilan hidup dalam bahasa Max Weber. Weber juga mengatakan bahwa memasuki dunia politik karena kebutuhan pekerjaan. Hasilnya, berpolitik untuk pengabdian akan mengedepankan perjuangan nilai-nilai. Sedangkan yang kedua akan menghasilkan perjuangan yang penuh dengan pragmatisme dan oportunisme.

Giddens (Halimah Tunsyakdiah, https://www.academia.edu/11779094/Strukturasi_Antony_Gidden), perdebatan antara struktur atau kekuatan social terhadap pelaku tindakan social (agen) menjadi konflik, karena bagi Giddens struktural-fungsional mereduksi actor atau pelaku tindakan social didalam struktur karena agen-agen tidak bisa dengan bebas memutuskan untuk melakukan apapun yang mereka putuskan

2.5.4. Koalisi Dalam Perebutan Penguasaan Sumberdaya Politik.

Koalisi adalah sinergi lebih dari satu parpol untuk memperkuat pemerintahan dan sebaliknya memperkuat oposisi. Menurut Shar Kpundeh, koalisi dilakukan untuk membantu anggota koalisi dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan bersama (Tamma & Nadir, 2013).

Secara teoritis ada beberapan model koalisi yaitu koalisi pemenang minnimal, menunjuk pada pemerintahan yang mendapatkan dukungan mayoritas sederhana di parlemen. Katagori kedua, koalisi minoritas, koalisi pemerintahan dari partai-partai kecil dan karena itu tidak mendapat dukungan mayoritas sederhana diparlemen, dan katagori ke tiga. Koalisi besar, menunjuk pada koalisi pemerintahan yang didukung oleh mayoritas mutlak partai politik di parlemen (Haris, 2014)

Ada 3 alasan koalisi, pertama, bila koalisi berdarsarkan perolehan suara, hukum yang berlaku adalah parpol dengan perolehan suara lebih besar mempunya bargaining dari pada parpol dengan suara lebih kecil, kedua, bila koalisi berdasarkan kesamaan ideologi, akan terjadi koalisi parpol yang mengklaim berdasarkan ideologi nasionalis, ideologi kiri dan ideologi islam. Ketiga, kemungkinan terjadi koalisi berdasarkan *platfrom* yaitu yang penting menang. (Novi Rahmawanta, 2004).

Menurut Laver (1998), ada dua pendekatan untuk menjelaskan pembentukan koalisi, yaitu *office-seeking dan policy-seeking* (dalam Makhasin, 2016)). Pendekatan *office-seeking* didasarkan teori pilihan rasional dan teori permainan, yang berasumsi bahwa partai adalah entitas tunggal (*single entity*), kecenderungan kalkulatif untuk memperoleh suara atau kursi dan fokus untuk mendapatkan kekuasaan (Back, 2005 dalam Makhasin (2016). Koalisi dilakukan menggunakan *formula Minimum Winning Coalition* (MWC). Formula ini memiliki varian *Minimum Size Coalition* (MSC), *Minimum Number Coalition* (MNC), *Minimum Connected Winning Coalition*,

Bargaining Coalition (BC) dan sebagainya. Dalam MSC, partai politik cenderung memilih koalisi minimal agar terjaga soliditas koalisi. Sedangkan MNC adalah koalisi dengan jumlah parpol sedikit tetapi menang di parlemen.

Pada umumnya terdapat dua tipe koalisi, yaitu *policy blind coalition*, yaitu koalisi yang tidak didasarkan kebijakan, namun hanya memperbesar kekuasaan (*office seeking)*; dan *policy-based coalitions*, yaitu koalisi yang didasarkan kebijakan yang akan diimplementasikan (*policy seeking*).

Tabel 1. Model Koalisi

Policy Blind Coalitions Theory	*Policy Based Coalitions Theory*
▪ Menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi	▪ Menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan
▪ *Minimal winning coalitions* (William Riker)	▪ Minimal connected coalitions (Rober Axelrod)
▪ Asumsi partai bertujuan "*office seeking*" (memaksimalkan kekuasaa	▪ Asumsi partai bertujuan "policy seeking" (mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai)
▪ Loyalitas peserta koalisi sulit dijamin	▪ Loyalitas peserta koalisi secara minimal diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan
▪ Sulit diprediksi, ukuran jumlah partai sangat beragam.	▪ Koalisi sangat gemuk melibatkan partai-partai agar kebijakan mendapat dukungan mayoritas

Sumber: Sri Budi Eko Wardani

Tabel 1 di atas menunjukkan pembelahan koalisi *policy blind coalition*, yaitu koalisi yang didasarkan pertimbangan memaksimalkan kekuasaan (*office seeking*) berdasarkan jumlah kursi di tubuh parlemen. Koalisi *policy based coalitions*, yaitu koalisi berdasarkan tujuan kebijakan yang hendak direalisasikan *(policy seeking).* Secara umum, koalisi ini dilandaskan pada kesamaan dalam pereferensi dan kebijakan. Koalisi yang dibangun berdasarkan *office seeking* cenderung menuai konflik internal partai politik karena koalisi dibangun berdasarkan kepentingan pemerintahan yang akan terbentuk.

Menurut kategorisasi lama, partai politik di Indonesia terdiri dari partai Islam, nasionalisme radikal, sosialisme-demokrat, Komunisma dan tradisionalisme Jawa (Feith and Castles, 1970). Kategorisasi ideologis untuk menjelaskan kecenderungan pembentukan koalisi berbasis politik aliran yang berlangsung antara 1945 dan 1965. Namun, penghancuran kekuatan kiri oleh rezim Orde Baru membuat pengelompokan ideologis lama tidak lagi memberikan penjelasan tentang orientasi partai politik di Indonesia pasca Orde Baru. Berdasarkan kerangka yang dipakai Daniel Dhakidae, pengelompokan ideologis partai politik di Indonesia dapat ditarik dari dua kutub yang saling berlawanan yaitu sekuler-Islam dan kerakyatan-pro pasar (Sugiono dan Mas'udi, 2008: 21).

Sementara itu, Pratikno (2007: 430) menggunakan kategori populis-elitis untuk melengkapi kategori Sekuler/Barat-Islamis sebagai basis ideologis partai politik kontemporer di Indonesia. Menggabungkan kedua skema itu, orientasi ideologis partai politik di Indonesia, penggunaan kategori sekuler dan Islam masih masih tetap relevan digunakan, sedangkan Jawa dan luar Jawa tidak lagi relevan sebagai dasar pengelompokan basis kepartaian. Sebagai gantinya, orientasi kebijakan antara yang elitis dan pro pasar dan populis proteksionis melengkapi kategorisasi partai politik di Indonesia. namun demikian skema inipun tak mampu menjelaskan pengelompokan ideologis partai politik di Indonesia. Lay (2007: 71) misalnya menyatakan bahwa Pilkada langsung dan pembentukan koalisi lintas partai di Indonesia seringkali tidak mengikuti pola baku pengelompokan ideologis. Pratikno menyatakan bahwa era pilkada langsung membuat partai politik mengenyampingkan pertimbangan ideologis dan mengedepankan pertimbangan pragmatis sebagai dasar pembentukan koalisi (Pratikno, 2007: 431).

2.6. Konsep Perebutan Penguasaan Sumberdaya Politik Berbasis Etnik.

2.6.1. Pengertian Etnis

Etnis atau suku merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa.

Etnis adalah sekelompok individu yang sadar bahwa dirinya terikat pada kelompok, pengakuan akan kesatuan kebudayaan, yang seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa dan asal usul (Koentjaraningrat, 2007). Wilbinson dalam Koentjaraningrat (2007) mengatakan bahwa pengertian etnis mencakup warna kulit, asal usul, kepercayaan, status kelompok minoritas, kelas stratafikasi, keanggotaan politik bahkan program belajar. Sibarani menjelaskan, etnis merupakan identifikasi sosial, yang diciptakan karena ada ciri khas yang yang tidak sama antara etnis satu dengan lainnya.

Perbedaan antar etnis yang berlangsung sekian lama, membuat hubungan antara etnis adalah kekayaan di dalam etnis tersebut. Individu-individu dalam satu etnis terikat satu sama lain berdasarkan kesamaan agama, suku, bahasa, adat istiadat. Relasi tersebut dapat mengembang menjadi perilaku etnosentris, berkembang *prejudice* dan perilaku negatif lainnya yang tampak pada tindakan, Perbedaan antara etnisnya dengan lainnya lalu merupakan awal dari kesadaran etnis bahwa etnisnya kuat dan unggul dibanding etnis lainnya. Bahwa kesadaran ini berimplikasi pada ruang kontestasi politik. .

Untuk membahas etnisitas digunakan pendekatan primordialisme yaitu etnis karena keturunan dan serta pendekatan konstruksionis dan instrumentalis sebagaimana disampaikan Vick dan Ishiyama (2013) dalam (Deivid & Palenewen, 2021). Etnisitas merupakan konstruksi sosial dan instrument untuk mencapai tujuan, mengakses sumber daya serta meningkatkan status. Cohen (1974) menyatakan bahwa etnisitas merupakan instrument yang berasal dari produk simbol-simbol kebudayaan dan kekerabatan yang dimanfaatkan pelaku politik untuk memperoleh keuntungan politik. Instrumen etnisitas digunakan untuk pemenangan, dan dibranding atau dijadikan sebagai merk dalam marketing politik (dalam Muhammad et al., 2022)

2.6.2. Politik Etnisitas

Munculnya politik etnisitas di Indonesia tidak lepas dari pengaruh besar pemerintah Orde Baru sebagaimana ditegaskan Henk S Nordholt (2007), bahwa negara mengontrol warga negaranya dengan menunjukkan ‘siapa lawan’ dan ‘siapa kawan’. Alasannya, pertama tidak ada daerah asli di Indonesia; kedua pemerintah menghindari konflik SARA; ketiga untuk sukses pembangunan atau modernisasi; Keempat, untuk membangun negara yang kuat. Lucian W Pye menegaskan bahwa politik identitas disebabkan tindak kekerasan negara pada warga negaranya dan menguatnya desentralisasi yang memberikan ruang pada pencarian jabatan politik pada etnis lokal (dalam Haboddin, 2012)

Banyak kajian tentang politik (dan konflik) etnisitas dalam membahas perebutan sumberdaya politik, yaitu perebutan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan melalui pilkada /atau pemekaran wilayah (Roth 2009; Tanasaldy 2009; Tanasaldy 2012) dalam (Abdulkadir-sunito et al., 2017). Selain itu, untuk memperoleh pengaruh dalam ekonomi politik lokal (Aragon 2009; Sjaf 2014).

Penelitian menunjukkan bahwa politik etnisitas dikembangkan lewat sarana yang ada di basis etnis masing-masing. Seperti Dewan Adat Papua (DAP), yang dijadikan sebagai mesin politik oleh elite-elite local dalam perebutan kekuasaan. Mereka melakukan kampanye terselubung, seruan-seruan politik, statement-statement politik. Meskipun ada Dewan Adat Suku (DAS) Muyu dan Wambon sebagai representatif dari masing-masing etnis, dengan fungsinya yaitu mengawal nilai-nilai adat dari masing-masing etnis. Realita yang terjadi adalah DAS hadir sebagai kekuatan politik. Ikatan kolektivitas dan komunalistik yang kuat merupakan legitimasi etnis (Kayatu, 2022). Agnes Heller menjelaskan politik identitas membawa isu kebebasan, toleransi, menciptakan pola intoleransi, kekerasan, dan konflik etnis. Politik identitas dapat mencakup rasisme, biofeminisme, aktivisme lingkungan (politik isu lingkungan), dan konflik etnis.

Sebagai negara yang berbhineka yang demokratis, banyak kelompok kesukuan yang tidak terwakili dalam pengambilan keputusan sehingga (Baidawi, 2022) berkeinginan melepaskan diri dari negara pelindungnya, ingin menjaga keberadaan budaya dan citranya , serta keterwakilan etnisnya. Politik identitas dipergunakan untuk memperjuangkannya (Snanfi et al., 2018; Baidawi, 2022).

Di Indonesia, perjuangan etnis lokal mulai terjadi saat setelah reformasi yang membuka ruang lebar bagi partisipasi di negara demokrasi. Dalam kerangka teori strukturasi dijelaskan Anthony Giddens bahwa struktur dapat mengekang atau mengendalikan tetapi juga bisa memberdayakan. Di dalam struktur terdapat aturan dan sumberdaya yang melalui praktek sosial dapat mengekang atau memberdayakan. Struktur politik suatu negara dapat mengekang, namun pada suatu saat akan memberdayakan. Dalam teori strukturasi, agen tidak pasif namun dapat melakukan inovasi untuk terbentuk struktur baru. (Baidawi, 2022)

2.7. Klientelisme, Patronase, Primordialisme

2.7.1. Klientelisme

Klientelisme[12] adalah hubungan antara dua orang (diadik) yang statusnya tidak setara, namun interaksinya intensif dan relatif teratur. Pihak yang satu

[12] [12]Klientalisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.Klientelisme merupakan ‘relasi kekuasaan yang personalistik‘ (Hutchcroft 2014: 177), dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik. Hutchcroft, merujuk pada tulisan-tulisan sebelumnya, terutama Scott (1972), menekankan bahwa relasi klientelistik adalah relasi tatap muka secara langsung (face-to-face). Selanjutnya, Hicken (2011) menjelaskan bahwa definisi klientelisme setidaknya mengandung tiga hal. Pertama, kontingensi atau timbal balik; pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien merupakan respons langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain(Hicken 2011: 291). Biasanya,sumber-sumber material dipertukarkan dengan suara atau bentuk dukungan politik lainnya. Kedua, hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien. Ketiga, aspek pengulangan; pertukaran klientelistik belangsung secara terus-menerus (dalam Aspinal dan Sukmajati, 2014, dalam buku Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu 2014 di Indonesia).

statusnya tinggi atau lebih tinggi dari yang lain, sehingga terjadi pertukaran yang tidak seimbang. Satu pihak dapat mengakses barang dan jasa yang nilainya lebih tinggi sedangkan lainnya hanya mampu menawarkan dukungan politik. Hubungan diadik tersebut telah berlangsung lama, dan tidak berbalas tunai dalam jangka pendek. Keseimbangan hubungan yang tidak seimbang itu tidak jelas waktu pelunasannya. Hubungan tersebut tidak legal formal namun ada semacam kewajiban untuk membalas jasa agar tidak ada pihak yang dikecewakan yang berdampak pada putusnya hubungan (Scott, 1976).

Klientelisme pada awalnya merupakan relasi diadik antara petani petani yang membutuhkan sumber daya atau perlindungan dari tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya. Sebagai imbalan, petani memberikan tenaga kerja, rasa hormat, kasih sayang, dukungan politik, dan meningkatkan status. Klientelism terbangun karena ada rasa saling percaya (*trust)* bahwa kewajiban berbalas itu tidak akan diingkari (Roniger et al., 2004); (Louis, 1994). Interaksi yang tidal legal tersebut berimplikasi pada kebebasan dalam memilih patron, dan bebas mengakhiri hubungan jika tidak ada kepuasan mereka (Gouldner, 1977); (T. Hilgers, 1999).

Klientelisme menunjukkan adanya hubungan yang harmonis, tetapi terungkap juga watak eksploitatifnya berupa pelemahan kelas bawah untuk mempertahankan kekuasaannya (Singlemann et al., 1982). Ditemukan adanya ancaman berupa penarikan sumber daya jika klien tidak mampu memenuhi keinginan patron (Aureyo, 1999); (Ocantos et al., 2014).

Hubungan-hubungan klientelisme semakin longgar karena karena pemerintah semakin baik dalam melayani warga negara, dan patron semakin banyak (Norris, 1984). Weingrod (1977) menjelaskan bahwa hubungan patron dan klien di desa-desa bersifat pribadi dan berjangka panjang, bergeser menjadi berjangka pendek pada masa kampanye.

Klientelisme menurut Stokes (2007) adalah "penawaran barang-barang material sebagai imbalan atas dukungan pemilu. Piattoni (2001) mendefinisikannya sebagai pertukaran untuk memaksimalkan dukungan politik. Kitschelt dan Wilkinson (2007) mendefinikan sebagai "transaksi, pertukaran l suara dengan bayaran langsung atau akses berkelanjutan ke pekerjaan, barang, dan jasa."

Pembelian suara, *babi-barel*[13], penyuapan, korupsi, *klientelisme*, *patronase*, persahabatan, kekerasan dan mesin politik dianggap adil sebagai kemiripan keluarga (Collier & James E. Mahon, 1993). Klientelisme berbeda dengan korupsi, tetapi korupsi sarat dengan klientelisme (Mark, 1997). Klientelisme adalah kambing hitam demokrasi (M. Hilgers, 2009). Anehnya banyak literatur kontemporer yang diperlukan untuk membangun konsep klientelisme yang baik. (Gerring, 2012). Klientelisme merupakan pertukaran politik yang tidak adil dan anti-demokrasi (Schedler & Schaffe, 2002), yang dilakukan menjelang pemilihan, bahkan pemilih diberikan cara menandai surat suara. Dalam klasifikasi Weber disebut rasionalitas instrumental. Mengikuti logika Homans pembelian dilakukan karena politisi tidak mampu membangun loyalitas pemilih yang berkelanjutan.

Penjelasan Stokes (2005, 2007 dalam (Berenschot, 2018a) menyebutkan bahwa ada komitmen dalam pertukaran bahwa pemilih menggunakan hati nurani dalam memilih, maka kandidat juga mengingkari janji setelah memenangkan pemilihan. Hal ini berbeda dengan relasi yang telah berlangsung lama, dimana pemilih dan kandidat berada dalam jaringan sosial maka sebuah kesalahan apabila kandidat dan pemilih mengingkari janji (M. Hilgers, 2009).

[13] Cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali (Baca artikel CNN Indonesia "Asal Usul Politik Gentong Babi "https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240212123448-134-1061432/asal-usul-politik-gentong-babi-dan-sejarah-kelam-perbudakan-di-as.

2.7.2. Patronase

Istilah *klientelisme* dengan *patronase* sering dipertukarkan . Namun Aspinal dan Barenscot (Erdward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019) berhasil menjelaskan dan memisahkannya. *Klientelisme* menunjuk pada jenis pertukaran yang khas, sedangkan *patronase* menunjuk pada barang dan manfaat yang dipertukarkan. Klien adalah orang yang dengan sukarela membantu pekerjaan patron, yang dijanjikan memperoleh jabatan dan kekuasaan yang mutlak serta tetap. Patron adalah pihak yang berposisi untuk membantu klien-kliennya (Scott,1983:14).

Patronase merupakan pemberian uang atau barang dari politisi kepada pemilih, agar patron memperoleh manfaat politik yang didistribusikan melalui jaringan klientelistik (*patron-client*) yang berbasis relasi kekuasaan personal" (Erdward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019). Politisi memiliki otoritas untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya kepada pemilih melalui relasi yang personal dan subjektif, bukan melalui aturan yang objektif, adil dan terbuka. Aktivita ini sebagai imbalan kepada pemilih yang telah memberikan dukungan politik dan pengusaha yang memberikan dukungan finansial saat pemilihan. Hubungan ini *unbalances* karena patron menguasai sumberdaya utama (*first order resources*) berupa jabatan, pekerjaan, lisensi dan lain-lain. Diantara patron utama dan klien terdapat *broker* yang tidak memiliki sumber-sumber daya utama , tetapi memiliki akses terhadap sumberdaya utama (*second order resources*). Broker merupakan jembatan antara patron utama dengan klien.

Patronase bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi yang biasa dikenal dengan money politics dan *vote buying*) atau dana-dana publik seperti proyek *pork barrel* yang di biayai oleh pemerintah. Pendistribuasian dana pemerintah ini mengakibatkan korupsi (Riawati, 2015); (W. Setiadi, 2018). sehingga patronase itu merupakan tindakan malpraktek pemilu oleh para pejabat politik

untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok dengan cara menukar kepentingan publik (Sarah Birch dalam Setiadi, 2018). Pemberian yang bersifat material sebagai imbalan patron kepada klien yang telah memilihnya ; sedangkan yang non-material untuk menjaga hubungan-hubungan sosial dan melalui kekerabatan ataupun kedekatan secara personal.

2.7.3. Primordialisme

P**rimordialisme** adalah suatu perasaan-perasaan dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Primordialisme berasal dari kata bahasa Latin primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya tenunan atau ikatan. Dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), primordialisme adalah perasaan keetnisan yang berlebihan. Primordialisme merupakan pandangan atau ideology didasarkan atas ikatan diri individu, seperti etnis bangsa, ras, dan agama; sebagai jati diri atau identitas sebuah golongan atau kelompok sosial (Fred W Riggs) yang berfungsi mengikat golongan atau kelompok dalam menghadapi ancaman dari luar. Primordialisme bisa menyebabkan seseorang memiliki rasa kesetiaan yang tinggi terhadap budayanya.

Pada masyarakat yang *multicultural*[14], idealnya masing-masing budaya hidup berdampingan dalam kesetaraan. Namun *multikulturalisme* bukan kondisi yang mudah dicapai. Ada banyak perbedaan antar suku, agama, ras, yang menjadikan perbedaan itu sebagai alat untuk menguasai kultur satu atas kultur yang lain. Modernisasi telah memarginalisasikan budaya-budaya local . Pada awalnya disusun konsep pentingnya asimilisasi atas keragaman budaya dalam rangka menemukan budaya baru yang dapat diterima semua pihak. Dalam

[14] Akar kata Multikulturalime sendiri adalah kebudayaan, secara etimologis Multikulturalisme dibentuk dari kata Multi (banyak). Kultur (budaya) dan isme (paham, aliran)/ secara hakiki dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup di komunitas dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.(Mahdfud 2006), dalam ((Liata & Fazal, 2021)

realitasnya peleburan budaya merupakan konsep yang tidak dapat diterapkan. Konsep universalisme barat maupun ideology asimilasi perlu ditinggalkan, digantikan dengan konsep *multikulturalisme* (Agger et al., 2009). Dalam kacamata posmodern pemahaman atas perbedaan antar komunitas, etnis-etnis, kelompok-kelompok bahkan individu-individu lebih penting dari kesamaan. Dominasi kelompok dan sikap pemerintah dalam menegakkan hukum; pembakukan perbedaan; penguatan identitas disebabkan tiadanya ruang pengembangan kebudayaan untuk mempertahankan keaslian. Pemerintah idealnya memberikan ruang tersebut, namun dalam banyak penelitian, pemerintah menginginkan terbentuknya budaya tunggal secara nasional.

Perilaku kelompok dominan yang menempatkan kelompok minoritas sebagai "*the other*[15]" atau kelompok "liyan" atau yang lain, "situ dan kami"dimana yang satu mendominasi yang lain. Pada era reformasi mayoritas kelompok menguasai dan mengatur arah kebudayaan minoritas. Kelompok minorias diperlakukan represif namun dibiarkan oleh aparat keamanan bahkan pelaku dilindungi. Sikap intoleran dan pengingkaran multikulturalisme, pemaksaan kepentingan mayoritas mengakibatkan munculnya konflik-konflik (Rochadi, 2018): berdampak pada perlawanan diam-diam (Disyacitta, 2019)

Reformasi telah membuka struktur peluang politik (*political opportunity stukture*) dalam konsep Eisinger (1971) dan Sydney Torrow (1998). Kelompok-kelompok keetnisan, agama maupun budaya bereforia untuk mengaktualisasikan diri dan meningkatkan penguasaan sumberdaya. Kelompok minoritas yang pada masa pemerintahan Suharto bungkam dan apatis, pada era setelah reformasi menyampaikan kepentingan politiknya dan merebut ruang politik untuk membangun tatanan sosial ekonomi yang sesuai dengan panduan kebudayanya (Rochadi, 2018). Masyarakat di daerah berharap agar budaya

[15] **Liyan** atau "yang Lain" (bahasa Inggris: *the Other*) dalam fenomenologi digunakan dalam mengidentifikasi dan membedakan diri dengan yang lain dalam pengakuan mereka untuk menjadi *ada*. Oleh karena itu, liyan berbeda dan berlawanan dengan diri. Meskipun liyan terpisah dari diri, liyan merupakan realitas *ada* yang juga mengukuhkan keberadaan diri.[1] Pengalaman *ada* bersama yang lain ini membawa konsekuensi bahwa diri juga *ada* bagi yang lain.[2] (https://id.wikipedia.org/wiki/Liyan_(filsafat)

mereka dapat dipelihara kembali. Sebab mereka merasa bahwa kehidupan mereka justru lebih baik ketika masih menjaga tradisionalisme[16]. Hal ini diperkuat dengan struktur pembangunan yang berdampak pada kesenjangan ekonomi, kebijakan yang diskriminatif dan eksklusif sebagai faktor bagi kemunculan politik identitas yang membenarkan primordialisme sebuah kelompok. Konsep-konsep tidentitas dan bahkan identitas itu sendiri merupakan hasil interaksi yang dinamis dalam konteks dan konstruks (Eriksen, 1993).

Primordialisme dalam politik muncul dalam bentuk etnisitas, politik dinasti atau politik kekerabatan, kehadiran bangsawan lokal, dan pengaktifan adat sebagai norma dan identitas diri masyarakat lokal. Dalam pemilihan kepala daerah dan pengisian jabatan pemerintahan, primordialisme menjadi pertimbangan utama.

2.8. Budaya dan Politik

Menurut E.B Taylor dan Linton (Prasetya : 1998) kebudayaan merupakan keseluruhan yang komplek, baik ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Mengacu pada R Linton (Prasetya: 1998), kebudayaan adalah komposisi tingkah laku dan hasil tingkah laku yang dibentuk dan didukung serta diteruskan anggota masyarakat tertentu. Bagi Koentjaraningrat (2007), selain perilaku, kebudayaan berwujud ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya yang sifatnya abstrak berada di dalam pikiran manusia.seperti ide-ide dan gagasan; serta hasil karya manusia secara fisik berupa benda-benda dapat diraba dan dilihat.

Kebudayaan mengatur dan mengarahkan tindakan manusia; sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidup tertentu. Dalam keragaman budaya, Indonesia

[16] Tradisionalisme adalah ajaran yang mementingkan tradisi yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sebagai pegangan hidup.[1][2] Tradisi dapat berasal dari praktik hidup yang sudah berjalan lama, ini disebut tradisi kultural.[1] Dapat pula berasal dari keyakinan keagamaan yang berpangkal pada wahyu, ini disebut tradisi keagamaan.[1](https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisionalisme).

membangun budaya nasional, yang harus diikuti semua warganegara. Tod Jones (2015) menyebut Indonesia menerapkan kebijakan budaya otoritarian sejak era penjajahan hingga reformasi. Itulah sebabnya kebudayaan bukan struktur yang pasif tetapi hasill dialektika dengan manusia. Kebudayaan mengkooptasi kekuasaan tetapi juga meneguhkan kekuasaan. Yasraf Amir Piliang menegaskan bahwa kebudayaan merupakan sebuah preferensi yang dirancang, bukan proses evolutif berkembang secara "sirkuler" (Yudiaryani, 2009).

Bagian dari kebudayaan adalah budaya politik yang khas karakternya khas terutama terkait dengan legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Budaya politik mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber daya masyrakat (Yusuf, 2016). Almond dan Verba (1984) mendefinisikan budaya politik sebagai orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya. Warga negara mengidentikan dirinya dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan, perilaku tokoh-tokoh politik, keputusan-keputusan dari sistem politik, serta bagaimana seharusnya dalam sistem politik. Berdasarkan hal ini dapat dilihat pola orientasi tiap warga negara terhadap sistem politik sebagai dasar dalam penentuan klasifikasi tipe kebudayaan politik.

Orientasi warga negara meliputi aspek kognitif, afektif, dan evaluatif yang ditujukan kepada sistem politik, aspek-aspek input dan output, serta kepada sejumlah aktor politik. Orientasi kognitif merupakan pemahaman seseorang terhadap sistem politik maupun perilaku aktor politik, kebijakan yang diambil, implikasinya terhadap kepentingannya. Sedangkan orientasi afektif merupakan perasaan terhadap sistem politik; peranan, para aktor, dan penampilan. Orientasi evaluatif merupakan keputusan dan pendapat warga negara tentang obyek-obyek politik perilaku aktor-aktor, untuk menilai moralitas politik, pengetahuan, dan cara-cara membuat penilaian politik, serta dalam menyampaikan pendapat

Budaya politik ada pada masyarakat berskala besar dan berskala kecil; pada masyarakat modern,dan tradisional (Arbi Sanit, 1983). Setiap anggota suatu sistem politik akan mendukung salah satu budaya politik yang dia percaya, diantaranya budaya politik Parokhial (Parochial Political Culture); Budaya politik Kaula (Subject Political Culture); Budaya Politik Partisipan (Partisipan Political Culture), dan variasi-variasinya. Budaya politik tersebut merupakan hasil interaksi struktur dan agen.

2.9. Matrilianisme dan Kelemahan Dalam Kontestasi

Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak terhubung dengan ibu dan kerabat ibu berdasarkan kepada garis keturunan perempuan secara unilateral. Garis keturunan ibu ini dalam warisan akan memproleh lebih banyak dari garis bapak.

Sistem matrilinel dijumpai pada masyarakat Minangkabau serta Semando. Anak yang menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Garis ibu sangat penting karena menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang sangat akrab pada keluarga. Bahkan berkonsekuaensi pada kepemimpinan politik perempuan di Minangkabau yang ada dalam keluarga, kaum dan kekerabatan. KedudukanWalaupun demikian, kedudukannya sangat sentral, karena ia garis penentu dan pengontrol kekuasaan, sebenarnya pengaruhnya sangat besar. Kekuasaan perempuan minangkabau terlihat bahwa kekuasaan itu bukan sesuatu yang bersifat publik/ formal/ impersonal, tetapi *the personal is political.*

Posisi dan peran perempuan yang kuat dalam warisan menjadikan posisi perempuan memiliki kedudukan yang kuat secara sosial karena perempuan yang dianggap memiliki harta dalam keluarga. Kekuatan materi tersebut yang menjadikan perempuan di minangkabau memiliki kepercayaan diri untuk bisa menduduki posisi yang penting di ranah publik. Radjab dalam (Sukmawati, 2019) menyebutkan ada delapan karakteristik yang menggambarkan sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau, yaitu: 1) garis keturunan dihitung menurut garis

ibu; 2) suku dibentuk menurut garis ibu; 3) setiap orang diharuskan untuk menikah dengan orang lain dari sukunya; 4) pembalasan dendam adalah tanggung jawab seluruh suku; 5) menurut teori, ibu memiliki kekuasaan di dalam suku, tetapi jarang digunakan; 6) yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki dan kakak perempuan; 7) perkawinan bersifat matrilokal, artinya suami mengunjungi rumah isterinya; 8) hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu ke anak dari saudara perempuan (Dewi, 2023).

Materilineal di Minangkabau lebih kepada pemberian hak istimewa kepemilikan atau pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan dan melekatkan garis keturunan kepada jalur ibu/perempuan, sementara peran sentral dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kepemimpinan tetap dipegang oleh kaum laki-laki yang diwakili oleh mamak. Perempuan di Minangkabau tetap bersandar kepada keputusan-keputusan yang dibuat Niniak Mamak di dalam kaum dan Nagari atau Mamak Tungganai di dalam rumah (Putri et al., 2022)

2.10. Kerangka Pikir

Perebutan penguasaan sumberdaya politik etnis Semende ini dikerangkai asumsi bahwa budaya atau struktur menentukan perilaku berpolitik para agen, dan para agen mempengaruhi struktur.

a. Anthony Giddens menjelaskan bahwa perebutan kekuasaan terjadi karena kontribusi struktur dan agen. Agen tidak bebas karena dalam pengaruh struktur objektif. Agen memiliki kontribusi dalam merubah struktur walaupun terdapat struktur objektif yang membatasi dan mempengaruhi dorongan individu secara tak sadar. Pertemuan antara dua struktur menjadi habitus
b. Teori strukturasi menjelaskan bahwa struktur dapat mengekang (*constraining*) tetapi juga membebaskan (*enabling*) Posisi agen tidak pasif namun dapat melakukan inovasi untuk terbentuk struktur baru (Baidawi, 2022). Penstrukturan (*structuration*) adalah proses dimana sistem diproduksi, direproduksi , dan bertransformasi dari lingkungan

sosial melalui aturan dan sumber daya oleh anggota-anggotanya (Poole, Seibold, &McPhee, 1996 halaman 117)

Berdasarkan teori-teori tersebut maka diasumsikan:

a. Struktur Lembaga adat berkontribusi dalam memaksimalkan modal budaya, sosial, simbolis, ekonomi dalam perebutan sumberdaya politik etnis Semende. Dalam arena perebutan yang tajam maka struktur berkontribusi agar perilaku agen tetap mempedomani struktur sehingga tidak terjadi persaingan yang tajam sehingga muncul kontravensi dan konflik
b. Interaksi antara Struktur dan Agen berperan dalam membangun struktur baru yang lebih sesuai dengan harapan anggota yang berproses melalui produksi dan reproduksi nilai-nilai.
c. Struktur lembaga adat dan kekerabatan berkontribusi dalam pemenangan kandidat dan mengeliminir penggunaan struktur eksternal patronase dan klientelisme.
d. Semakin besar kontribusi struktur lembaga adat dan kekeluargaan dalam perebutan sumberdaya politik maka dapat dikesampingkan patronase dan klientelisme, namun tetap mempertahankan primordialisme.

Dalam penelitian ini disusun hipotesis pengarah (bukan untuk diuji)

H_1: Perebutan sumberdaya politik dikuasai agen yang memiliki kekuatan modal budaya, sosial, simbolis, ekonomi paling sehingga mempengaruhi struktur

H Semakin besar kontribusi struktur pada perebutan sumberdaya politik maka perilaku agen dapat diminamilisir untuk mengesampingkan patronase, dan klientelisme, serta mempertahankan primordialisme

Gambar 1. Kerangka Pikir

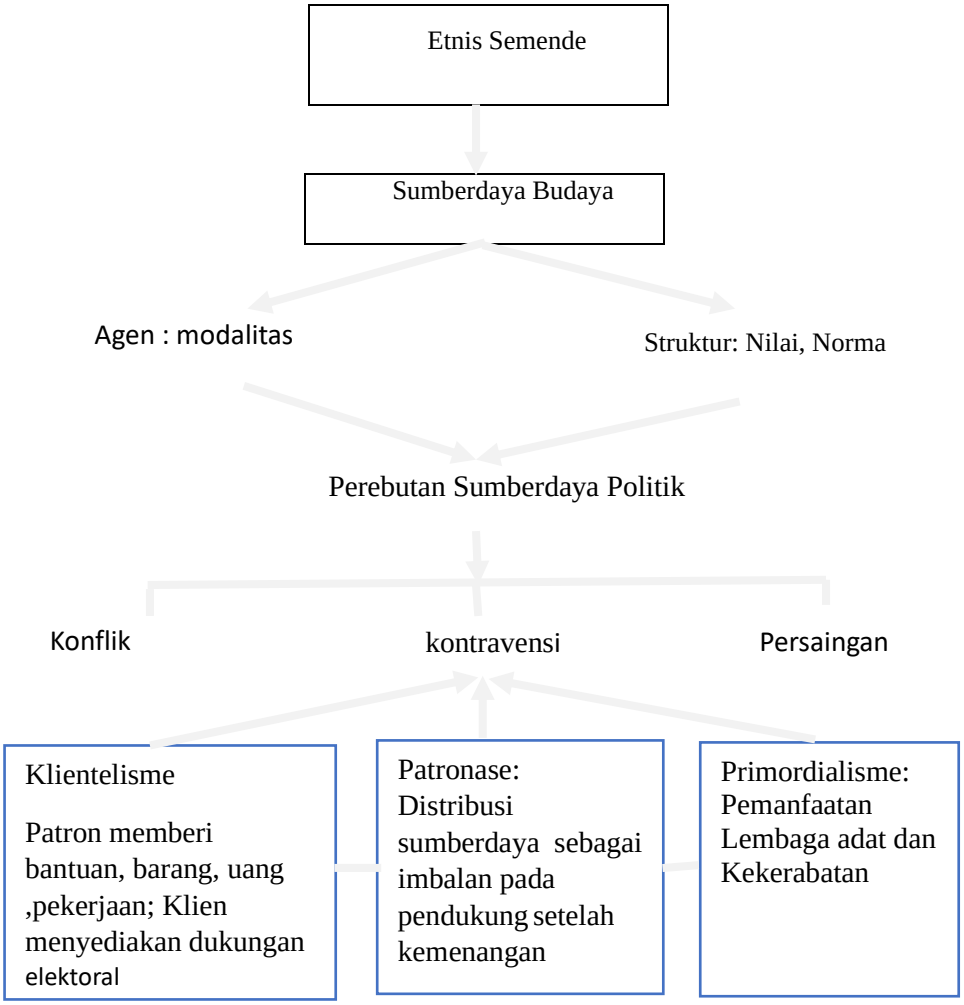

BAB III.
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada disertasi ini dipergunakan sebagai Penelitian ini berada dalam paradigma konstruktivistik. Konstrukstivisme meneguhkan asumsi bahwa individ-individu selalu berusaha memahami dunia dimana mereka hidup dan bekerja. Mereka mengembangkan makna-makna subjektif atas pengalaman-pengalaman mereka, makna-makna yang diarahkan pada objek-objek ataubenda-benda tertentu (Creswell, 2010:11). Bogdan dan Biklen dalam (Moleong 2014:49). Konstruktivis adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan konstruksi kognitif. Jadi tanpa pengalaman sebelumnya, seseorang tidak dapat membentuk pengetahuan.

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka yang telah dikembangkan oleh tiap-tiap individu, dari waktu ke waktu, hingga membentuk tanggapan mereka terhadap peristiwa dan pengalamannya dalam kehidupannya (Daymon dan Holloway, 2008:228). Edmund Husserl dalam (Kuswarno, 2009 : 10) menjelaskan bahwa dengan fenomenologi peneliti dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri. Fenomenologi tidak saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan datang, dilihat dari aspek-aspek yang terkait dengannya. Semuanya itu bersumber dari bagaimana seseorang memaknai objek dalam pengalamannya.

Pendekatan ini untuk menggali data kualitatif yaitu perebutan penguasaan sumberdaya politik khususnya etnik Semende di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pendekatan fenomenologis dapat dimulai dengan memperhatikan dan mengkaji fokus fenomena yang di teliti, yang menganalisis berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Kemudian peneliti melakukan pemaknaan objek terkait fenomena terkait.

Data yang diperoleh dari informan dikonstruksi berdasarkan atas sifat realitas yang ada. Prosesnya dimulai dari mencatat, menganalisis, mengungkap makna secara mendalam tentang perebutan penguasaan sumberdaya politik pada etnis Semende. Dengan demikian, tercapai tujuan utama penelitian kualitatif yaitu untuk menangkap arti (*meaning/understanding*) yang terdalam (*verstehen*) atas suatu peristiwa, gejala, fakta kejadian, realita, atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa (dalam Samsu, 2017).

Penelitian ini untuk memahami fenomena secara apa adanya (dari perspektif subyek) yang dideskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat sesuai konteks yang alamiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun fenomena yang diteliti di dalam penelitian ini adalah perebutan penguasaan sumberdaya politik etnik Semende. Terdapat fenomena yang khas di dalam riset ini, yang tidak dapat ditangkap dengan metode penelitian kuantitatif. Keberhasilan etnis minoritas Semende di dalam perebutan penguasaan sumberdaya politik merupakan realitas yang menentang konsep bahwa minoritas adalah yang termarginal dalam politik. oleh karena itu untuk menguak realitas politik ini digunakan pendekatan fenomenologi.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di komunitas etnis Semende di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus yang penduduknya mayoritas (99%) etnis Semende. Dari 21 desa yang ada di Kecamatan Pulau Panggung, maka ada 5

desa yang diteliti yaitu di Desa Tekad , Pulau Panggung, Gunung Megang, Gunung Meraksa, dan Batu Bedil.

Penelitian ini juga dibatasi waktu yaitu pada Pemilu Serentak tahun 2019. Penelitian hanya dilakukan pada calon-calon di internal Partai Kebangkitan Bangsa yang berasal dari Kecamatan Pulau Panggung. Pilihan atas Partai PKB ini diambil secara purposive dengan alasan bahwa sejak PKB mengikuti pemilu tahun 2014 di dapil 4 kabupaten Tanggamus hingga Pemilu 2019, PKB selalu memperoleh kursi . Pada pemilu 2019, PKB memperoleh satu kursi dan suara calon nomor satu mencapai 10%.

Penelitian dilakukan sejak tahun 2022 -2023. Selama 2 tahun, dilakukan pengambilan data, reduksi data, display, analisis data, yang prosesnya tidak linear. Lamanya penelitian itu diantaranya karena membutuhkan waktu untuk memperoleh informan penelitian yang memahami masalah penelitian. Selain itu dibutuhkan pendekatan penelitian agar informan dapan memberikan informasi yang diperlukan secara valid. Setelah pengambilan data dilakukan reduksi data, dan apabila ada kekurangan data maka dilakukan pengambilan data kembali, demikian seterusnya. Setelah display data, dilakukan analisis data, tetapi apabila ada data baru maka dilakukan reduksi data baru, lalu displai dan analisis baru.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada isu:

a. Perebutan penguasaan sumberdaya politik etnis Semende di internal partai politik PKB:

1. Deskripsi kekerabatan etnis Semende
2. Konstelasi politik nasional dan local
3. Jumlah dan nomor urut calon
4. Perolehan suara antar calon di tiap desa
5. Modal sosial calon
6. Modal ekonomi, politik, modal budaya, simbolis calon

b. Kontribusi lembaga adat dan kekerabatan di dalam pemenangan kandidat.

1. Struktur Etnis Semende: Nilai-nilai, norma-norma tentang relasi kuasa
2. Kontribusi Payung Jurai dalam pemenangan kandidat
3. Kontribusi *Meraje* dalam pemenangan kandidat
4. Kontribusi Tunggu Tubang dalam pemenangan kandidat.
5. Peran *Anak Belai* dalam pencalonan
6. Perebutan nomor urut calon beretnis Semende
7. Koalisi, kontravensi, konflik untuk memperoleh suara
8. Perbedaan perolehan suara calon beretnis Semende di tingkat TPS di internal PKB
9. Kesenjangan suara calon beretnis Semende di tingkat TPS di internal PKB
10. Perbedaan perolehan suara calon laki-laki dan perempuan di tingkat TPS di internal PKB.
11. Kesenjangan perolehan suara laki-laki dan perempuan etnis Semende di internal PKB
12. Koalisi antar calon etnik Semende pada penggalangan sumberdaya politik
13. Persaingan antar calon dalam pencarian suara
14. Konflik antar calon dalam pencarian suara
15. Perebutan jaringan Primordialisme
16. Perebutan jaringan klientelism
17. Perebutan jaringan patronase

c. Perebutan sumberdaya etnis Semende dalam menjaga kearifan tradisional.

1. Konsep politik etnis Semende (Struktur vs Agen)
2. Nilai-nilai konflik dan harmoni
3. Norma-norma dalam politik
4. Peran *Meraje* dalam menenggang konflik

3.4. Jenis Dan Sumber Data

3.4.1. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data penelitian adalah informan yang diperoleh melalui metode *snowball*.

3.4.2. Sumber data

Data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari informan penelitian. Data ini berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dan FGD. Data penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari informan yaitu actor (pelaku utama yaitu para calon, tim sukses, pemilih, penyelenggara pemilu). Adapun informan penelitian ini adalah yang sesuai dengan karakteristik:

a. Untuk menentukan siapa yang termasuk kategori aktor politik, maka terdapat tiga metode posisi aktor politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama negara. Kedua, menggunakan metode pangaruh yaitu orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan, memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik; Ketiga metode reputasi yaitu ditentukan bedasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat (Naser, 2014).

   Di dalam penelitian ini untuk menentukan aktor digunakan metode pengaruh, namun dipadukan dengan metode posisi dan reputasi. Hal tersebut mempertimbangkan lokasi penelitian tidak di dalam institusi atau lembaga, namun di dalam masyarakat yang di dalamnya ada banyak individu dengan beragam karakter, posisi, peran, yang membuat seseorang memiliki pengaruh karena sebagai pejabat pemerintah, namun ada pemimpin non formal yang memiliki pengaruh, ada individu yang memiliki reputasi dalam penyelesaian persoalan. Jumlah Informan di dalam penelitian ini ada 26, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Karakteristik
1	Irsi Jaya	Payung Jurai, anggota DPRD dari PPP, ketua Kutau Pulau Panggung
2	Linda Sukis	Tunggu Tubang, guru (PNS), sudah menjual rumah pusaka, pindah domisili, KTP Pulau Panggung
3	Zulki Kurniawan	Payung Jurai, anggota DPRD dari PKB 2019
4	Aseptina	Pembantu Rumah Tangga Zulki
5	Basri Amin	Mantan Kepala Desa Gunung Megang, *Meraje*, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat
6	Mamak Elpis	*Meraje*, tokoh Adat, Tokoh Masyarakat
7	Istri Zulki	*Anak Belai*
8	Puyang Amana	Sesepuh perempuan, Tunggu Tubang Tepang Bangkang, ibu rumah tangga, guru ngaji
9	Usnita	Anak Puyang Amana, *Anak Belai*, ibu rumah tangga
10	Senau	Adek Puyang Amana, *Anak Belai*, ibu rumah tangga
11	Lini	Adek Puyang Amana, *Anak Belai*, ibu rumah tangga
12	Muhaidi	Ketua Poktan HKm Talang Jawa, Tim Sukses Zulki, wiraswasta, suku Jawa
13	Septa	Ketua KPU Kota Metro, Payung Jurai, suku Semende
14	Ariadi	Tokoh Masyarakat, Payung Jurai, wartawan
15	Hertanto	Pengamat Politik, suku Jawa
16	Fatoni	Anggota KPU Kota Metro, Payung Jurai, etnis Semende
17	Dedy Fernando	Ketua Bawaslu Tanggamus, Payung Jurai, etnis Semende
18	Ria Sari Samatha	Perempuan, etnis Semende,, calon gagal, Calon Anggota DPRD dari PKB tahun 2019
19	Nova Aryani	Perempuan, etnis Semende, *Anak Belai*, etnis Semende, *Anak Belai*, Caleg PKB tahun 2019, calon gagal
20	Muhadi	Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat
21	Habibi	Tokoh Masyarakat, Payung Jurai, anggota KPU Tanggamus, etnis Semende, tinggal di desa Tekad Tanggamus.
22	Welly Apriani	Calon anggota DPRD dari PKB, *Anak Belai*, wiraswasta, ibu rumah tangga.
23	Shelia	Tunggu Tubang, wirasasta, tinggal di Pulau Panggung, ibu rumah tangga.

24	Agis	Tunggu Tubang, tokoh prempuan Pulau Panggung, PPS tahun 2019 di desa Tekad
25	Sumiyati	Anggota DPRD 2014 dari Demokrat, calon anggota DPRD dari Demokrat tahun 2019, gagal terpilih
26	Kiki	Anak *Meraje* Amin, broker
27	Chandrawansah	Etnis Semende, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
28	Ali Usman	Etnis Semende, anggota Bawaslu Tanggamus
29	Firdaus	PPK Kecamatan Pulau Panggung 2019/Panwascam 2024

Sumber Data: Penelitian 2022

b. Etnis Semende yang berposisi dan berperan sebagai Tim Sukses , Broker, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat jenis kelamin, anggota DPRD, serta agen lainnya yang diperoleh pada saat penelitian. Untuk memperoleh informan tersebut maka dilakukan dengan cara purposive. Untuk informan calon anggota DPRD tahun 2019 dari PKB diperoleh dari dokumen daftar calon tetap (DCT) yang dimiliki KPU Kabupaten Tanggamus. Calon anggota legislatif adalah calon yang terdaftar di Surat Keputusan Daftar Calon Tetap Kabupaten Tanggamus, dan yang nama serta fotonya tertuang di surat suara. Kemudian dilakukan pelacakan untuk memperoleh data anggota DPRD yang berasal dari Kecamatan Pulau Panggung, khususnya yang beretnis Semende. Untuk itu, peneliti meminta konfrrmasi data ke tokoh adat . Dengan menggunakan Teknik *snowball* maka peneliti mendapatkan alamat masing-masing. Untuk mendapatkan data Tim Sukses diambil data tim sukses di kantor KPU Tanggamus. Selanjutnya untuk memperoleh informan dari Tim Sukses ditelusuri secara *snow ball*. Untuk memperoleh informasi tentang keberadaan sesepuh perempuan, tokoh adat, diperoleh secara *snow ball*.

c. Broker adalah actor-aktor yang membantu calon dan Tim Sukses dalam mencari pemilih, dan yang membantu membangun jaringan dalam rangka mencari pemilih. Berdasarkan informan yang ada, terdapat beberapa broker yaitu Aseptina, Linda, Amin, Kiki, Mamak Elpis.

d. Tokoh Adat adalah mereka yang berposisi sebagai Payung Jurai dan *Meraje*. Berdasarkan informan yang ada, terdapat tokoh adat yaitu Basri Amin, Mamak Elpis, Puyang Amana, Irsi Jaya, Zulki Kurniawan, Habibi, Ashari
e. Tokoh Masyarakat adalah tokoh masyarakat yang memahami informasi penelitian, Muhaidi, Habibi, Linda, Welly, Dedy Fernando, Septa.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang sebagai pendukung data primer yaitu Daftar Calon Sementara, Daftar Calon Tetap, Data Pemilih Tetap, Data Partai politik peserta pemilu di dapil 4 (empat) Kabupaten Taggamus, data perolehan suara para calon anggota DPRD di Dapil 4 (empat) Kabupaten Tanggamus, data dana Kampanye para calon anggota DPRD Dapil 4 (empat).

3.5. Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data

3.5.1. Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Setelah memperoleh informan pertama dilakukan wawancara ke informan selanjutnya. Wawancara dilakukan dengan memulai menyampaikan tujuan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan pertama yaitu Linda Sukis di rumahnya. Rumahnya di Jatimulyo. Linda Sukis sudah saya kenal sejak tahun tahun 1996 saat saya penelitian pertama di lokasi yang sama, kedua tahun 2014, dan 2017. Linda tinggal di Jatimulyo, meninggalkan desanya karena diterima PNS guru.

Dari wawancara pertama, lalu dilakukan penelusuran untuk wawancara selanjutnya. Setelah dilakukan wawancara mendalam maka peneliti membuat transkripsi informasi data yang diperlukan sesuai fokus penelitian. Apabila ditemukan keragu-raguan maka peneliti kembali kepada informan untuk dilakukan *cross cek* data melalui metode triangulasi.

Peneliti juga melakukan proses *cross cek* data kepada informan lain (*triangulasi*) sehingga diperoleh data yang *holistic*. Wawancara tidak hanya dilakukan secara *face to face*, tetapi juga melalui telephone dan *Whattup*. Hal ini dilakukan untuk mempercepat perolehan data. Oleh karena itu sering terjadi wawancara singkat untuk konfirmasi data. Pada saat wawancara, peneliti harus ditemani penerjemah bahasa Semende. Penduduk etnis Semende dan semua informan selalu berkomunikasi dengan bahasa Semende.

Untuk menjaga agar data yang dikumpulkan terdokumentasi dengan baik maka dilakukan notulensi atau traskripsi data. Transkripsi ini berupa data asli yang belum dilakukan proses reduksi data. Transkripsi data terdokumentasi dan menjadi lampiran disertasi.

b. Fokus Group Disscution (FGD)

FGD dilakukan setelah maupun dalam proses wawancara terhadap informan dalam rangka *cross* cek data. FGD telah dilakukan sebanyak 4 kali untuk mendidkusikan kontribusi Tunggu Tubang dalam politik, kontribusi *Meraje* dalam politik pada sumberdaya patronase, klientelisme, primordial. Peserta FGD adalah informan yang telah diwawancarai. Agar proses dan hasil FGD terdokumentasi dengan baik, diperlukan video untuk merekam FGD.

Adapun FGD berlangsung di rumah Zulki dengan peserta Zulki, Sheila, Mamak Elpis, Tim Sukses (2 orang), istri Zulki, Fatih dan peneliti. FGD ini terutama membahas nilai-nilai politik di Etnis Semende. FGD dilakukan secara informal, semua peserta merupakan narasumber aktif yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tentang topik yang didiskusikan.

FGD yang kedua di rumah *Meraje* Amin: peserta Amin, Linda, Kiki, Agis, Puyang Amana, Senau, Leni, Muhaidi, peneliti. FGD ini terutama membahas kontribusi Lembaga Adat dalam pemenangan, dan pemetaan kekerabatan Etnis Semende. FGD dilakukan secara informal, semua peserta FGD

merupakan narasumber aktif yang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan informasi tentang hal-hal yang dipahami terkait topik yang didiskusikan. Pilihan peserta FGD iterdiri dari nforman tersebut karena mereka terlibat dalam pemenangan Zulki, Sumiyati dan Suhartono. Selain itu, peserta FGD beragam baik *Meraje* Amin, broker, pemilih, sesepuh, tim sukses, mantan PPS (penyelenggara tingkat Desa), kepala Poktan HKM. Variasi peserta FGD ini ideal karena sekaligus menjadi media trianggulasi.

FGD ketiga berlangsung di rumah pak Muhaidi dengan peserta Pak Muhaidi, istri pak Muhaidi, Linda, Puyang Amana, Senau. FGD ini membahas Hutan Kemasyarakatan dan peran Tim Sukses dalam menbantu calon dalam mencari suara melalui program HKM. FGD ke empat di rumah pak Ahari, pesertanya pak Ashari, Kiki, Agis, mama Agis, Sheilla. FGD ini membahas tentang perebutan suara Ashari dengan Zulki di desa Tekad. FGD kelima di Metro, diikuti Septa, Fatoni, Ariadi, peneliti dan Hertanto. FGD membahas tentang kekeluargaan dan kekerabatan bagi anggota keluarga yang sudah tinggal di Pulau Panggung, tentang patronase, klientelisme, dan primordial.

3.5.2. Uji Keabsahan Data

Keabsahan dilakukan peneliti dengan menggunakan dua alat pengecekkan yaitu :

1. Metode triangulasi

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai berikut:

a. Mengkonfirmasi informasi kepada informan yang telah memberikan informasi apabila ada keraguan atas informasi yang diberikan. Seperti mengkonfirmasi tentang makna tunggu tubang, struktur etnis Semende, peran keluarga dan kekerabatan pada pemenangan, model-model pemenangan, patronase, klientelisme, primordialisma. Kesimpulan dalam

penelitian serta temuan dalam penelitian dikonfimasi kepada informan Zulki yang menjadi anggota DPRD dari Etnis Semende, serta Irsi Jaya dan dinyatakan sebagai kebenaran. Selain itu juga dikonfirmasi kepada Chandra Wansah, Habibi sebagai tokoh pemuda dari etnis Semende. Konfirmasi secara intensif dilakukan kepada Kiki, Linda, Agis, Shelia tentang kebenaran informasi yang disampaikan para informan.

b. Mengkonfirmasi informasi yang diberikan informan kepada informan lainnya. Konfirmasi secara berulang dilakukan melalui informan yang memahami secara benar tentang kondisi yang terjadi.

c. Melakukan FGD untuk konfirmasi data informan tentang di rumah *Meraje* Amin: peserta Amin, Linda, Kiki, Agis, Puyang Amana, Senau, Leni, Muhaidi, peneliti. FGD ini terutama membahas kontribusi Lembaga Adat dan kekerabatan dalam pemenangan, dan pemetaan kekerabatan Etnis Semende. FGD dilakukan secara informal, semua peserta FGD merupakan narasumber aktif yang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan informasi tentang hal-hal yang dipahami terkait topik yang didiskusikan. Pilihan peserta FGD terdiri dari nforman tersebut karena mereka terlibat dalam pemenangan Zulki, Sumiyati dan Suhartono. Selain itu, peserta FGD beragam baik *Meraje* Amin, broker, pemilih, sesepuh, tim sukses, mantan PPS (penyelenggara tingkat Desa), kepala Poktan HKM. Pada FGD ini terkonfirmasi bahwa lembaga adat dan kekeluargaan berperan dalam pemenangan. Terdapat pola-pola keluarga dalam pemenangan calon dari keluarga dan bukan keluarga, perempuan dan laki-laki. Pada FGD ini juga terkonfirmasi pola pemberian uang kepada keluarga dan sopan santunnya.

Triangulasi dilakukan melalui FGD di rumah Zulki dengan peserta Zulki, Sheila, Mamak Elpis, Tim Sukses (2 orang), istri Zulki, Fatih dan peneliti. FGD ini terutama membahas nilai-nilai politik di Etnis Semende. FGD dilakukan secara informal, semua peserta merupakan narasumber aktif yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tentang topik yang didiskusikan. Pada FGD ini terkonfirmasi peran keluarga dalam

pemenangan, peran *Meraje* dalam mencegah konflik, politik etnis Semende.

FGD di rumah pak Muhaidi dengan peserta Pak Muhaidi, istri pak Muhaidi, Linda, Puyang Amana, Senau. FGD ini membahas Hutan Kemasyarakatan dan peran Tim Sukses dalam menbantu calon dalam mencari suara melalui program HKM. Pada FGD ini terkonfirmasi bahwa tidak ada hubungan antara HKM dengan pemenangan. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan calon dilakukan dengan mengundang keluarga bukan sebagai petani HKM.

FGD di rumah pak Ahari, pesertanya pak Ashari, Kiki, Agis, mama Agis, Sheilla. FGD ini membahas tentang perebutan suara Ashari dengan Zulki di desa Tekad. Pada FGD ini terkonfirmasi bahwa Ashari menghabiskan uang 100 juta, bukan untuk dibagikan ke masyarakat, tetapi untuk mobilitas tim suksesnya. Sebagai PPS, Agis mengetahui bahwa Ashari tidak melakukan money politik, tetapi memperoleh banyak suara di desa Tekad. Hal ini karena ashari merupakan tokoh masyarakat, guru ngaji, penceramah agama.

FGD di Metro, diikuti Septa, Fatoni, Ariadi, peneliti dan Hertanto. Mereka adalah informan yang sudah merantau dan tidak tinggal dalam satu kota. Ternyata mereka tetap memposisikan dan berperan sebagai keluarga dekat, meskipun sebenarnya hanya sebagai kerabat. FGD membahas tentang kekeluargaan dan kekerabatan bagi anggota keluarga yang sudah tinggal di Pulau Panggung. Bahwa kekerabatan etnis Semende sangat erat, tidak hanya ketika masih berada di Pulau Panggung, tetapi ketika di perantauan.

FGD di Kantor Bawaslu Kabupaten Tanggamus diikuti ketua, sekretaris dan anggota Bawaslu Tanggamus, peneliti, Kiki dan Agis. FGD ini membahas tentang pola money politik pada etnis Semende. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mendeteksi kampanye atau

pertemuan-pertemuan yang dilakukan kandidat atau tim sukses sebagai kampanye dan membagikan uang atau barang. Karena dalam pertemuan tersebut digunakan mekanisme pertemuan adat seperti yang mengundang Tunggu Tubang, yang hadir keluarganya, yang memimpin *Meraje*.

Metode triangulasi telah diimplementasikan dalam penelitian ini sebagai metode untuk meyakinkan bahwa data dalam penelitian ini benar secara metodologis.

2. Diskusi Rekan Sejawat

   Diskusi rekan sejawat: dengan Ibu Erna, Ibu Asnani, Fahmi terutama dalam metode penelitian dan hasil penelitian, serta dalam analisis, serta hasil penelitian yang melawan arus. Penelitian ini melawan arus karena dengan judul perebutan penguasaan tetapi tidak menggunakan teori konflik. Penggunaan teori struktural fungsional yaitu strukturasi dianggap tidak tepat, tetapi penulis justru yakin penggunaan teori strukturasi lebih tepat karena pada tahap penelitian awal diperoleh informasi bahwa pada pemilu 2019 tidak terjadi konflik di lokasi penelitian. Dalam diskusi ini, peneliti mendapatkan masukan tentang bagaimana pemaknaan diperoleh.

3. Refleksivity

   Oleh karena hasil penelitian melawan arus banyak penelitian yang tentang money politik, peneliti berusaha meyakinkan diri bahwa hasil penelitiannya valid. Peneliti selalu melakukan penguatan hasil penelitian dengan bertanya kembali kepada informan tentang point temuan. Pertama tentang peran keluarga dan kerabat dalam pemenangan; kontribusi patronase dan klientelisme, serta primordialisme dalam pemilu. Misalnya apakah kesimpulan bahwa kekeluargaan etnis Semende itu lebih kuat dari patronase dan klientelisme. Informan menjawab bahwa dalam adat Semende ada piil Beganti, dimana kekeluargaan itu harus terus dilakukan...Peneliti memastikan juga kepada tokoh Etnis Semende yang lain yaitu Chandrawansah, diapun menegaskan bahwa hal itu benar. Terhadap tokoh

pemuda yang namanya Habibi juga menegaskan demikian. Kepada calon yang namanya Ashari juga mengakui bahwa uang bukan segalanya, karena faktanya dia memperoleh suara tanpa mone politic. Konfirmasi dilakukan peneliti secara terus menerus kepada Kiki, Agis, Sheilla, dan jawabannya selalu tidak bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terkonfirmasi kebenarannya.

3.5.3. Pengolahan Data Kualitatif

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan FGD, diolah sehingga menjadi data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses pengolahan data dimulai dengan reduksi data, display dan penyajian data dan penarikan kesimpulan. adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data:

Melakukan proses transkripsi data hasil wawancara, observasi dan FGD ke dalam tulisan**.** Melakukan reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data. Proses reduksi data dimulai sejak data pertama diperoleh dan terus berlangsung hingga laporan akhir tersusun. Data yang tidak terkait dimasukkan dalam file tersendiri. Data yang diperlukan dimasukkan dalam file tersendiri sesuai dengan fokus penelitian. Dalam setiap fokus akan dikelompokkan lagi dalam kategori-ketegori yang lebih kecil. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama penelitian. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan,menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menulis catatan-catatan. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Mereduksi data berarti memilih data yang relevan yaitu yang sesuai dengan tujuan penelitian yang diurai di dalam fokus penelitian, sesuai tujuan penelitian, merangkum, mencari tema dan polanya. Data yang sudah

direduksi memberikan gambaran secara jelas tentang jawaban permasalahan penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya apabila masih terdapat data yang belum lengkap.

b. Display Data

Display data merupakan penyajian data lapangan berupa uraian-uraian naratif untuk menjawab 2 (dua) permasalahan penelitian dalam disertasi ini, table, gambar, hubungan antar kategori. Berdasarkan penyajian data, dapat ditemukan data yang masih perlu diambil dan kembali disajikan.

c. Penarikan Kesimpulan.

Langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan mengalami perubahan jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada pengumpulan data. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dalam penelitian berupa berupa deskripsi suatu objek. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yaitu memahami makna/arti, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi.Penarikan kesimpulan, dilakukan melalui proses verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, dilakukan pencocokan data yang diperoleh dari lapangan. Hal itu dilakukan melalui proses triangulasi data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh.

Metode penelitian tersebut di atas, telah dirancang dan telah dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, yaitu antara pernyatan yang satu dengan yang lain runtut atau tidak bertentangan. Kebenaran korespondensi, yaitu kebenaran antara pernyataan dan kenyataan, atau antara pernyataan dengan bukti empiris yang mendukungnya. Penelitian dalam disertasi ini juga telah mencapai taraf obyektif karena sesuai dengan kenyataan obyektif.

BAB IV.
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

Penelitian tentang perebutan sumberdaya politik ini dilakukan di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Etnis Semende terkenal dengan etnis yang hidupnya di dataran tinggi. Keberadaan Suku Semende di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus merupakan hasil pencarian lahan yang cocok untuk berkebun kopi. Kopi merupakan tanaman tradidional etnik Semende. Sebagaimana digambarkan (A. Mukhlishin et al., 2017) bahwa marga Semendo yang berada di Lampung yang merupakan marga Rebang, Kasui, Seputih Pugeng, Way Tenong adalah marga yang hidupnya bercocok tanam dan berkebun kopi. Mereka terutama tinggal di dataran tinggi, seperti hulu sungai luas dan Mekakau serta di sekitar daerah Danau Ranau (Perbatasan antara Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung).

Kecamatan Pulau Panggung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tnggamus. Pada awal berdirinya Kabupaten Tanggamus terdiri atas 11(sebelas) kecamatan. Lalu, pada tanggal 19 Juni 2000 dikembangkan menjadi 17 kecamatan sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2000. Pada tahun 2004 dimekarkan 7 Kecamatan baru dengan disahkannya Perda No. 5 Tahun 2005 yaitu Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa, Banyumas, dan Limau. Sampai pada tahun 2006 Kabupaten Tanggamus menjadi 28 kecamatan. Namun, pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan kabupaten baru yaitu Kabupaten Pringsewu yang tertuang di Undang–undang No 48 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu bahwa 8 kecamatan dari Kabupaten Tanggamus yaitu Kecamatan Pringsewu, Gading Rejo, Pardasuka, Pagelaran, Banyumas, Sukoharjo, Adiluwih, dan Ambarawa, menjadi wilayah Kabupaten Pringsewu. Sehingga kabupaten

Tanggamus terdiri dari 20 kecamatan yang terbagi lagi dalam 3 kelurahan, dan 299 desa.

Gambar 2. Peta Kecamatan Pulau Panggung

Sumber Data: Kecamatan Pulau Panggung Dalam angka, 2020

Etnis atau Suku Semendo merupakan bagian dari kelompok Pasemah Besar atau Besemah Besak. Pasemah merupakan daerah pegunungan Bukit Barisan, tepatnya di sekitar Pagar Alam. Etnis Semendo merupakan etnis khusus kelompok Pasemah dari Perdipe atau Perau Dipo, Semendo dan Pesemah juga sering disebut Pasemah Ulu Mana yang saat ini tinggal di Propinsi Bengkulu. Sejak masuknya penjajah Belanda di daerah Pasemah dan Semendo pada sekitar tahun 1864-1866, terjadi migrasi etnik Semendo ke Propinsi Lampung dan Bengkulu. Migrasi secara besar-besaran terjadi pada tahun 1875, melalui daerah Pulau Beringin, Pulau Panggung, menuju ke Rebang, Kasui Hulu, Way Besi, Mutar Alam, Ulak Rengas, UIu Semong, Sekampung, Talang Padang dan Ketapang. Etnis Semende bermigrasi menuju Pulau Panggung melalui perbukitan, seperti cerita Puyang Amana yang melakukan migrasi dari Ulu Semong ke Talang Jawa (dulu masih menyatu dengan Desa Gunung Megang)

kecamatan Pulau Panggung. Masa kecil Puyang Amana di Ulu Semong. Pada usia 7 (tujuh) Puyang Amana bermigrasi dengan pamannya. Dalam migrasi, dilakukan pembukaan hutan untuk ditanami padi, sebagai cara untuk bertahan hidup.

Kecamatan Pulau Panggung berbatasan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Ulu Belu, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Talang Padang, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Air Naningan, dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sumber Rejo.

Tabel 3. Luas Daerah dan Jumlah Desa di Kecamatan Pulau Panggung, 2020.(Km2)

1.TalangBeringin	2,75	3,57
2.GunungMegang	10,83	14,07
3.TanjungRejo	8,00	10,39
4.TanjungBegelung	0,35	0,45
5.SinarMulyo	0,44	0,57
6.Kemuning	0,67	0,87
7.GedungAgung	13,00	16,90
8.Penantian	3,50	4,55
9.MuaraDua	8,75	11,37
10Tekad	4,05	5,26
11PulauPanggung	11.48	6.71
12.WayIlahan	9.92	5.80
13.GunungMeraksa	10.18	5.95
14.BatuBedil	9.70	5.67
15.AirBakoman	7.76	4.54
16.SumberMulya	6.29	3.68
17.SindangMarga	8.97	5.24
18.TalangJawa	4.72	2.76
19.TanjungGunung	4.86	2.84
20.SinarMancak	8.52	4.98
21.SriMenganten	12.00	7.01
Kecamatan Pulau Panggung	76,93	100,00

Sumber: Kantor Kecamatan Pulau Panggung, 2020

Etnis Semende mendiami semua desa (21 desa) yang ada di kecamatan Pulau Panggung, yaitu desa Air Bakoman, Batu Bedil, Gedung Agung, Gunung Megang, Gunung Meraksa, Kemuning, Muara Dua, Penantian, Pulau Panggung, Sinar Mancak, Sinar Mulyo, Sindang Marga, Srimanganten, Sumber Mulya, Talang Beringin, Talang Jawa, Tanjung Begelung, Tanjung Gunung, Tanjung Rejo, Tekad, Way Ilahan. Luas wilayah Kecamatan Pulau Panggung mencapai 76,93 km^2, yang dirinci sesuai luas desa masing-masing. Luas Kecamatan Pulau Panggung ini lebih luas dibandingkan Kota Metro yang luasnya **68,74 Km2** atau 6.874 Ha yang hanya terbagi dalam 5 kecamatan.

Etnis Semende telah menggunakan sarana mobil angkutan umum untuk menjangkau ibukota kecamatan Pulau Panggung serta antar desa di kecamatan Pulau Panggung. Jarak tempuhnya sekitar 30 menit dari ibukota kabupaten Tanggamus. Perjalanan tidak terlalu sulit karena sebagian jalan beraspal dan tidak berliku. Pada malam hari jalanan gelap karena tidak ada lampu jalan kecuali lampu listrik rumah-rumah penduduk. Sebagian jalan pada saat penelitian tahun 2022-2023 rusak tetapi pada tahun 2024 menjelang pemilu kondisinya sangat bagus dari Kecamatan Talang Padang hingga Kecamatan Ulu Belu. Sepanjang perjalanan menuju Pulau Panggung, dijumpai rumah-rumah Etnis Semende yang halamannya disemen. Fungsinya untuk menjemur kopi agar cepat kering. Bahkan, penduduk juga menjemur kopi di jalan raya, dibiarkan kopi terlindas kendaraan yang melewati agar kulit kopi terkelupas.

Sepanjang perjalanan menuju Pulau Panggung, tidak banyak rumah panggung namun lebih banyak rumah-rumah biasa yang terbuat dari bata atau modern dalam bahasa mereka. Apabila dibandingkan dengan riset tahun 1996 (Handi Mulyaningsih, 1996) jumlah rumah panggung pada tahun 2022 berkurang sampai 99%. Menurut informan 7 (tujuh) berkurangnya jumlah rumah panggung tidak disebabkan kelangkaan kayu cempaka, namun semakin sulit menebang sejak kebijakan Hutan Kemasyarakat diberlakukan. Menurut informan 7 (tujuh), informan 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) masyarakat suku Semende lebih senang dengan rumah berdinding bata karena bersih, lebih mudah membuatnya. Membuat

rumah panggung membutuhkan keahlian dalam menyambung kayu tanpa paku. Rumah panggung dimodifikasi dengan cara merenovasi bagian bawah rumah panggung yang selama ini menjadi tempat menyimpan kayu, memelihara ayam atau kambing menjadi lantai satu dan bagian atas menjadi lantai 2 (dua).

Tabel 4. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten (km), 2020.

	Desa/Kelurahan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1.	Talang Beringin	11	31
2.	Gunung Megang	7	30
3.	Tanjung Rejo	7	40
4.	Tanjung Begelung	5	35
5.	Sinar Mulyo	5	30
6.	Kemuning	3	41
7.	Gedung Agung	3	38
8.	Penantian	3	40
9.	Muara Dua	2	42
10.	Tekad	1	45
11.	Pulau Panggung	2	34
12.	Way Ilahan	3	44
13.	Gunung Meraksa	3	38
14.	Batu Bedil	9	42
15.	Air Bakoman	12	46
16.	Sumber Mulya	10	44
17.	Sindang Marga	4	35
18.	Talang Jawa	10	40
19.	Tanjung Gunung	1	40
20.	Sinar Mancak	4	42
21.	Sri Mengaten	11	52

Sumber: Kantor Kecamatan Pulau Panggung, 2020

Aksesibilitas Etns Semende dari desa terjauh menuju ibukota Kabupaten Tanggamus berjarak 52 km adalah desa Sri Sringanten, selanjutnya desa Air Bakoman berjarak 46 Km ke ibukota Tanggamus, Desa Tekad berjarak 45 Km, desa Way Ilahan berjarak 44 Km, Desa Muara Dua, Batu Bedil, dan Sinar Mencak berjarak 42 Km, Desa Kemuning berjarak 41 Km. Selebihnya jarak desa ke ibukota kabupaten antara 30-40 Km. Desa terjauh menuju ibukota Kecamatan Pulau Panggung adalah desa Air Bakoman yang berjarak 12 Km, desa Sri Menganten dan Talang Beringin berjarak 11 Km, selanjutnya jarak

desa Talang Jawa dan Sinar Mulya adalah 10 Km, jarak Desa Batu Bedil ke ibukota Kecamatan berjarak 9 Km, jarak desa Gunung Megang dan Tanjung Rejo ke ibukota Kecamatan Pulau Panggung sejauh 7 Km. Desa Sri Menganten dan Air Bakoman merupakan desa yang paling rendah aksesibilitasnya ke fasilitas-fasilitas yang tersedia di ibukota kecamatan dilihat dari jarak tempuh.

Berdasarkan observasi, desa-desa tersebut memiliki jangkauan (aksesibilitas) yang cukup baik ke ibukota kecamatan, karena antar desa terhubung jalan kabupaten yang sebagian telah diaspal. Namun, sebagian jalan aspal penghubung antar desa tersebut sudah rusak dan berlubang nyaris tak ada sisa aspalnya. Meskipun jalan tersebut dapat dilewati kendaraan roda empat, namun masyarakat Etnis Semende lebih merasa nyaman melewatinya dengan kendaraan roda dua. Perjalanan dari pasar Talang Padang sampai Desa Tekad hanya 30 menit sampai desa Tekad apabila menggunakan kendaraan bermotor, menjadi lama karena lama waktu apabila menggunakan mobil angkutan umum karena lama menunggu terisi penuh penumpang. Mobil angkutan umum baru berangkat apabila mobilnya sudah penuh penumpang. Angkutan umum ini menjangkau semua desa yang ada dalam jalur angkutan umum, namun pemberhentian terakhirnya di desa Tekad. Setelah itu, ada ojeg yang menjadi transportasi antar desa-desa.

Kendaraan ”Ojeg” , merupakan alat transportasi yang pada musim hujan tetap fungsional menjangkau desa-desa yang jalannya semakin buruk. Di wilayah yang berjurang, jalan berbatu, tanah merah yang licin, ojeg motor trail menjadi alat transportasi yang handal. Cara ini membuat arus transportasi roda dua tetap berjalan, pada musim penghujan tidak mengalami hambatan. Ojeg trail menjadi alat transportasi untuk mengangkut kopi, lada, coklat, durian, petai, dan sebagainya.

4.2. Kondisi Kependudukan

Hingga tahun 2020, jumlah penduduk etnis Semende di Kecamatan Pulau Panggung hanya 40.310 jiwa yang terdistribusi sebagaimana tabel 5:

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk (etnis Semende) di Kecamatan Pulau Panggung 2010-2020.

Desa-Desa di Kecamatan Pulau Panggung		Penduduk (Ribu) Etnik Semende	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2020 (%)
(1)		(2)	(3)
1.	Talang Beringin	1650	1,55
2.	Gunung Megang	1808	1,80
3.	Tanjung Rejo	1596	2,36
4.	Tanjung Begelung	2108	3,01
5.	Sinar Mulyo	929	3,04
6.	Kemuning	1423	1,95
7.	Gedung Agung	1524	1,94
8.	Penantian	2680	2,02
9.	Muara Dua	1555	3,67
10.	Tekad	6082	2,64
11.	Pulau Panggung	2190	7,87
12.	Way Ilahan	1623	2,43
13.	Gunung Meraksa	2621	2,62
14.	Batu Bedil	1842	2,26
15.	Air Bakoman	2296	-1,36
16.	Sumber Mulya	1512	3,15
17.	Sindang Marga	1483	4,06
18.	Talang Jawa	1095	1,32
19.	Tanjung Gunung	1202	-1,92
20.	Sinar Mancak	1032	2,76
21.	Sri Mengaten	2059	2,90
	Kecamatan Pulau Panggung	**40.310**	**2,29**

Sumber Data: Kantor Kecamatan Pulau Panggung/Pulau Panggung, 2020

Laju pertumbuhan penduduk etnik Semende di desa-desa yang ada di Pulau Panggung berada dalam kondisi yang cepat hingga lambat, bahkan ada yang menurun (minus). Pertumbuhan etnis Semende desa Tekad mencapai 7,87% dalam kurun waktu 10 tahun (2010-2020), Desa Sinar Marga mencapai 4,06%, Desa Muara Dua mencapai 3,67, Sindang Marga dan desa Tanjung Bagelung mencapai 3,01, Sinar Mulyo 3,04%. Pertumbuhan penduduk 7,87% di desa Tekad. Pertumbuhan penduduk Desa Tanjung Gunung dan Air Bakoman, Air Bakoman -1,36% dalam kurun 2010-2020 atau rata-rata -0,136. Di desa Tanjung Gunung -1,92% atau rata-rata -0,192%.

Isu-isu sosial dalam hal kependudukan yang menjadi penyebab rendahnya laju pertumbuhan penduduk di Desa Air Bakoman, Tanjung Gunung, tidak disebabkan karena rendahnya kelahiran dan tingginya kematian. Tetapi karena migrasi etnis Semende yang tinggi ke wilayah sekitarnya untuk memperoleh lahan pertanian yang subur untuk ditanami kopi. Mereka berpindah ke desa-desa Sinar Marga dan Tanjung Bagelung yang dahulu sebagian wilayahnya tidak diperbolehkan untuk ditanami kopi, lambat laun kebijakan Hutan Kemasyarakatan membolehkan untuk ditanami.

Tabel 6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Pulau Panggung.

	Desa	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km^2
1.	Talang Beringin	4.09	66
2.	Gunung Megang	4.48	90
3.	Tanjung Rejo	3.96	82
4.	Tanjung Begelung	5.23	108
5.	Sinar Mulyo	2.3	62
6.	Kemuning	3.53	73
7.	Gedung Agung	3.78	80
8.	Penantian	6.65	137
9.	Muara Dua	3.86	82
10.	Tekad	15.09	271
11.	Pulau Panggung	5.43	122
12.	Way Ilahan	4.03	85
13.	Gunung Meraksa	6.5	136
14.	Batu Bedil	4.57	100
15.	Air Bakoman	5.7	121
16.	Sumber Mulya	3.75	82
17.	Sindang Marga	3.68	76
18.	Talang Jawa	2.72	63
19.	Tanjung Gunung	2.98	73
20.	Sinar Mancak	2.56	53
21.	Sri Mengaten	5.11	104
	Kecamatan Pulau Panggung	**100**	**100**

Sumber : Kantor Kecamatan Pulau Panggung, 2020

Etnis Semende hidup mengelompok dalam keluarga-keluarga sehingga membuat kepadatan penduduk etnis Semende berbeda di banyak desa. Apabila dibandingkan

dengan kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Tanggamus sebesar 138 maka kapadatan di Kecamatan Pulau Panggung lebih rendah. Namun, desa Tekad memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi sebesar 271, Desa Penantian kepadatannya 137, Desa Gunung Meraksa kepadatan penduduknya 136, desa Pulau Panggung kepadatan penduduknya 122, Desa Air Bakoman kepadatan penduduknya 121. Desa-desa tersebut kepadatannya lebih tinggi dari rata-rata kepadatan tingkat kecamatan. Tingginya kepadatan penduduk di desa-desa tersebut karena aksesibilitas untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, listrik lebih baik. Sedangkan desa-desa lainnya kepadatan penduduknya lebih rendah dari rata-rata kepadatan penduduk tingkat kecamatan. Kondisi desa Tekad, selain kepadatannya lebih tinggi dari desa lainnya, juga merupakan desa yang jumlah penduduknya mencapai 15% dari totalitas jumlah penduduk di kecamatan Pulau Panggung. Sebaliknya Desa Sinar Mulyo, kepadatan penduduknya paling rendah yaitu 62 dan jumlah penduduknya hanya 2,3% totalitas jumlah penduduk Kecamatan Pulau Panggung.

Tabel 7. Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah di Kecamatan Pulau Panggung, 2018, 2019, 2020.

Desa/Kelurahan		SD			SMP		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Talang Beringin	1	1	1	-	-	-
2.	Gunung Megang	1	1	1	-	-	-
3.	Tanjung Rejo	2	2	2	-	-	-
4.	Tanjung Begelung	2	2	2	-	-	-
5.	Sinar Mulyo	1	1	1	-	-	-
6.	Kemuning	2	2	2	-	-	-
7.	Gedung Agung	2	2	2	-	-	-
8.	Penantian	1	1	1	-	-	-
9.	Muara Dua	2	2	2	-	-	-
10.	Tekad	4	4	4	3	2	2
11.	Pulau Panggung	2	2	2	-	-	-
12.	Way Ilahan	1	1	1	-	-	-
13.	Gunung Meraksa	2	2	2	-	-	-
14.	Batu Bedil	1	1	1	-	-	-
15.	Air Bakoma1n	1	1	1	1	-	-
16.	Sumber Mulya	2	2	2	1	1	1

17.	Sindang Marga	1	1	1	-	-	-
18.	Talang Jawa	-	-	1	-	-	-
19.	Tanjung Gunung	1	1	1	-	-	-
20.	Sinar Mancak	2	1	1	-	-	-
21.	Sri Mengaten	1	1	1	-	-	-
Kecamatan Pulau Punggung		**32**	**31**	**32**	**5**	**3**	**3**

Sumber Data: Kecamatan Pulau Panggung Dalam Angka, 2020

Aksessibilitas etnis Semende pada fasilitas pendidikan baru masih terbatas pada pendidikan dasar. Fasilitas SD tersedia di setiap desa, untuk sekolah tingkat SMP, dan SMA hanya ada di desa Tekad, Sumber Mulya dan Air Bakoman. Padahal kecamatan Pulau Panggung sangat luas, jumlah penduduknya sedikit, dan kepadatan penduduknya rendah, kondisi jalan dan alat transportasinya terbatas. Hal itu berdampak pada sumberdaya etnis Semende yang berpendidikan masih terbatas. Data yang bersekolah SD dari total 32 sekolahan SD se kecamatan Pulau Panggung, jumlah muridnya sebanyak 4303 siswa, jumlah gurunya ada 304 sehingga rasio guru murid ada 14,15%. Untuk tingkat SMP, dari sejumlah 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlah siswanya ada 909, jumlah guru ada 62 dan rasio guru-murid sebesar 14,66. Di tingkat SLTA, dari 2 Sekolah Menengah Atas (SMA), yang bersekolah ada 488 siswa, jumlah guru ada 35 guru, sehingga rasio guru-siswa sebesar 13,94. Padahal jumlah peserta didik SD se kabupaten Tanggamus tahun 2017 ada 60. 172, SMP 18.974; SMA 8.553 pada tahun 2017 (Neraca Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2017).

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar penduduk yang ada di setiap desa sudah ada Sekolah Dasar (SD) yang rata-rata terdapat 1-2 SD di setiap desa, kecuali di desa Tekad ada 4 SD. Selain SD, ada Madrasah Ibtidaiyah di desa Sinar Mencak jumlahnya 1 (satu). Untuk melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) tersedia 2 (dua)sekolahan di Desa Tekad dan 1 sekolahan di desa Sumber Mulya. Di desa Tekad juga ada 1 (satu) madrasah Tsanawiyah, serta ada 1 di Air Bakoman. Untuk melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Atas terdapat 1 (satu) SMA di desa Penantian, 1(satu) di Air Bakoman dan 1 (satu) SMA di desa Sinar Mulya. Di Air Bakoman juga ada 1 (satu) Madrasah Aliyah. Untuk fasilitas kuliah di Perguruan Tinggi tidak tersedia di kecamatan, sehingga harus kuliah minimal di

Kabupaten Tanggamus atau Kabupaten lain, serta di Provinsi Lampung, atau luar Provinsi Lampung.

Rendahnya layanan pendidikan mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan Etnis Semende. Tingkat *drop out* anak sekolah SD, SMP, SMA menjadi tinggi apalagi pada anak laki-laki yang diharapkan segera membantu bekerja di kebun. Sedangkan anak-anak perempuan diharapkan segera selesai sekolah untuk membantu bekerja di kebun dan menikah di usia muda.

4.3. Kondisi Kesehatan di Kecamatan Pulau Panggung

Layanan Kesehatan yang ada adalah satu poliklinik dan satu puskesmas yang terletak di desa Tekad. Ada 2 (dua) dokter umum, 1 (satu) dokter gigi, perawat ada 21 (dua puluh satu) orang, bidan ada 40 dan 1 (satu) tenaga farmasi. Terdapat puskesmas pembantu masing-masing di desa Talang Beringin, Gunung Megang, Sinar Mulyo, Air Bakoman, dan Talang Jawa. Untuk memfasilitasi layanan Kesehatan bagi anak-anak, ada Posyandu di setiap desa. Di desa Tekad terdapat 4 Posyandu, di Desa Tanjung Raya, Gunung Megang, Sumber Mulya masing-masing ada 3 (tiga) Posyandu. Sedangkan di desa Sri Menganten, Tanjung Gedung, Talang Jawa, Air Bakoman, Way Ilahan, Pulau Panggung, Penantian, Gegung Agung, Kemuning, Sinar Mulyo masing-masing ada 2 Posyandu. Di desa Muara Dua, Sindang Marga, Sinar Mencak hanya ada masing-masing 1 (satu) Posyandu. Selain bidan, ada dukun bayi hampir di setiap desa kecuali di desa Sinar Mulyo, Air Bakoman, Tanjung Gunung. Dalam totalitas ada 34 bidan dan 34 dukun bayi. (Sumber: Puskesmas Kecamatan Pulau Panggung, dalam Kecamatan Pulau Panggung Dalam Angka 2017)

Tidak ada rumah sakit di Kecamatan Pulau Panggung, tetapi ada puskesmas rawat inap, serta 2 apotik terletak di desa Tekad. Akses menuju rumah sakit termasuk kategori sulit (Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes), 2020.

4.4. Layanan Keluarga Berencana di Lingkungan Etnis Semende

Untuk layanan keluarga berencana tersedia di Fasilitas Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Di setiap desa atau pekon di Kecamatan Pulau Panggung terdapat 1 (satu) KKB untuk melayani konsoltasi, pemasangan dan pencopotan alat kontrasepsi masyarakat. Etnis Semende tidak menolak KB. Meskipun tidak banyak, ada laki-laki yang menjadi peserta KB. Mayoritas peserta KB adalah perempuan.

Kepesertaan KB aktif pada perempuan etnik Semende ada 5984 pasangan Usia Subur (PUS) paling banyak menggunakan alat kontrasepsi (alkon) suntik sebanyak 2135 PUS (38,23%). Pilihan penggunaan alkon suntik dianggap yang paling praktis karena tidak ada benda yang dimasukkan ke dalam tubuh, dimana masa berlakunya 8-13 bulan dalam sekali suntik. Oleh karena itu dianggap aman dari kelupaan seperti penggunaan alkon pil. Meskipun demikian kepesertaan PUS pada alkon pil mencapai 645 PUS (11,55%). Selanjutnya sebanyak 601 (10,76%) PUS menggunakan implant, dan IUD sebanyak 210 (3,76%) PUS. Terdapat 37 (0,66%) PUS yang memilih menggunakan alkon MOW atau Metode Operatif Wanita yaitu dengan operasi atau tindakan pembedahan pada saluran telur wanita. Ada 124 (2,22%) PUS yang memilih menggunakan alkon MOP atau Metode Operasi Pria, 101 (1,81%) PUS yang memilih menggunakan alkon kondom. Kepesertaan laki-laki dalam ber KB dengan metode MOP ini menarik karena selama ini ada anggapan bahwa metode MOP berdampak pada menurunnya fungsi ereksi pada laki-laki. Meskipun jumlah kepesertaan laki-laki secara aktif dalam ber KB hanya 3,5% tidak sebanyak perempuan yaitu 96,5%.

Kondisi Kesehatan Etnis Semende dapat dikatakan baik. Tidak ditemukan data Warga Penderita Gizi Buruk di semua desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Pulau Panggung dalam kondisi kecukupan gizi. (Data Kelurahan/Desa di Kecamatan Pulau Panggung, 2018 dan 2019, Pendataan Potensi Desa, 2020/BPS)

4.5. Keagamaan dan Fasilitas Beribadah Di Lingkungan Etnis Semende

Penduduk di Kecamatan Pulau Panggung hampir semua beragama Islam. Hanya ada 12 orang yang beragama Kristen, 3 Protestan, tidak ada yang beragama Hindu, dan 11 beragama Budha, dan 40504 beragama Islam. Fasilitas beribadah baik Masjid dan Mushola terdapat di setiap desa, namun tidak terdapat fasilitas beribadah bagi yang beragama Kristen, protestan, serta Budha. Sehingga untuk beribadah bagi yang beragama selain Islam maka mereka harus ke daerah yang ada fasilitas beribadah yaitu ke kabupaten Tanggamus. Meskipun hampir 100% penduduk beragama Islam, tidak membuat penduduk yang tidak beragama Islam terkucil atau dikucilkan di dalam pergaulan. Mereka tidak eksklusif dalam beragama, dan mengembangkan aliran-aliran tertentu. Aliran Al Sunnah Wal Jamaah merupakan aliran yang menjadi pedoman beragama. Tetapi tidak membuat mereka mengucilkan dirinya atau tidak menerima aliran yang lain seperti Muhammadiyah walaupun jumlah yang beraliran ini adalah minoritas.

4.6. Kondisi Mata Pencaharian

Petani tidak menjadikan tanaman hortikultura sebagai mata pencaharian utama. Meskipun demikian, mereka menanam untuk kebutuhan sehari-hari. Sayuran ini ditanam di kebun (*ghepangan*) dan di sawah sebagaimana model tumpang sari. Berbagai sayuran yang ditanam seperti bayam, cabai, kacang panjang, bawang daun, buncis, labu, kangkung, mentimun, petai, terong, tomat. Mereka juga menanam jahe, lengkuas, kencur, kunyit.

Penduduk di Kecamatan Pulau Panggung menanami kebunnya dengan aneka pepohonan untuk diambil buahnya seperti alpukat, belimbing, duku, durian, jambu biji, jambu air, jeruk, manga, manggis, Nangka/cempedak, pepaya, pisang, rambutan, sawo, sirsak, sukun, Mereka juga menanam jengkol, melinjo, petai. Tanaman tersebut menghasilkan buah-buahan untuk kebutuhan sendiri, meskipun juga untuk dijual.

Mata pencaharian penduduk Etnis Semende merupakan salah satu isu yang pernah mencuat pada masa orde baru. Keterikatannya pada hutan telah menjadikannya dianggap sebagai perambah hutan. Rendahnya kepemilikan lahan kebun etnis Semende di luar hutan lindung mengakibatkan menurunnya pendapatan dari kebun, terutama kopi. Pak Amin menceritakan bahwa lahan kopinya setelah kebijakan Tata Guna Lahan Kesepakatan berkurang jauh. Sekarang hasil panennya tidak banyak karena kebun kopinya hanya setengah hektar. Harga kopi yang fluktuatif membuat kopi tidak cukup untuk diandalkan untuk membiayai ekonomi keluarga.

Tabel 8. Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman Di Kecamatan Pulau Panggung (kwintal), 2019–2020

Jenis Tanaman	2019	2020
Buah–Buahan/ Fruits:		
Alpukat/ Avocado	688	290
Belimbing/ Star Fruit	75	140
Duku/Langsat/Kokosan/ Duku	85	160
Durian/ Durian	345	420
Jambu Air/ Rose Apple	165	235
Jambu Biji/ Guava	165	230
Jeruk Besar/ Pomelo	115	105
Jeruk Siam/Keprok/ Tangerine/Orange	150	165
Mangga/ Mango	1634	399
Manggis/ Mangosteen	7110	5008
Markisa/ Marquisa	-	-
Nangka/Cempedak/ Jack Fruit	5200	3550
Nenas/ Pineapple	60	73
Pepaya/ Papaya	250	1040
Pisang/ Banana	950	2450
Rambutan/ Rambutan	7800	9760
Salak/ Salacca	900	4400
Sawo/Sapodilla/ Star Apple	2050	1600
Sirsak/ Soursop	204	500
Sukun/ Bread Fruit	3850	4500
Sayuran/ Vegetabels	-	-
Melinjo/ Melinjo	2600	2650
Petai/ Twisted Cluster Bean	2797	1700

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST Penduduk di Kecamatan Pulau Panggung, 2020

Berbagai tanaman buah-buahan tersebut terdapat di kebun sendiri dan kebun yang terdapat di area hutan kemasyarakatan. Berdasarkan data di atas, tanaman yang paling banyak produksinya adalah rambutan mencapai 9760 kwintal pada tahun 2020 meningkat dari 7800 pada tahun 2019, manggis mencapai 7110 kwintal pada tahun 2019 namun menurun pada tahun 2020 hanya 5008 kwintal, produksi nangka mencapai 5200 pada tahun 2019 namun menurun tahun 2020 hanya 3550 kwintal. Berdasarkan data di atas, tanaman yang paling banyak produksinya adalah rambutan mencapai 9760 kwintal pada tahun 2020 meningkat dari 7800 pada tahun 2019, manggis mencapai 7110 kwintal pada tahun 2019 namun menurun pada tahun 2020 hanya 5008 kwintal, produksi Nangka mencapai 5200 pada tahun 2019 namun menurun tahun 2020 hanya 3550 kwintal.

Tabel 9. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Pulau Panggung (ha), dan Jumlah Produksi (Ha), 2019 – 2020.

Jenis Tanaman/Jumlah Produksi	Jenis Tanaman		Jumlah Produksi Ton	
	2019	2020	2019	2020
Aren / Sugar Palm	-	15	-	5
Cengkeh / Clove	-	43	-	8
Kakao / Coccoa	146	146	75	78
Kapuk Randu / Kapok	-	22	-	5
Karet / Rubber	28	28	19	4
KayuManis/Cinamond	-	-	-	2
Kelapa / Coccunut	451	451	548	548
Kelapa Hybrida	-	-	-	-
Kemiri	-	-	-	-
Kopi / Coffee	1387	1457	990	1442
Lada / Pepper	-	263	-	188
Nilam / Patchouli		-	-	-
Pala / Nutneg	-	60	-	8
Pinang / Arecanut	-	15	-	7
Tembakau / Clove	-	-	-	-
Vanilli / Vanilla	-	7	-	1

Sumber/Source: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus

Tanaman yang favorit di Pulau Panggung adalah tanaman kopi. Hingga tahun 2019 luas tanaman kopi di Pulau Panggung mencapai 1387 ha, meningkat 1457 ha pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan harga kopi semakin baik, seiring dengan kemampuan petani dalam memproduksi kopi, serta pengolahan pasca panen. Untuk Indonesia, hingga tahun 2019 produksi kopi didominasi perkebunan rakyat yang produksinya mencapai 731,6 ribu ton atau 98,6% sedangkan perkebunan besar negara hanya mensuplai 56.000 ton atau 0,8% dan perkebunan besar swasta mensuplai 44.000 ton atau 0,6%. Berdasarkan totalitas produksi kopi tersebut, pada tahun 2019 Provinsi Lampung memberikan kontribusi produksi kopi sebanyak 15%, Sumatera Selatan 26%, Aceh 10%, Bengkulu 8%, Sumatera Utara 10% dan 28 provinsi lainnya menyumbang 31%.

Meski hanya perkebunan rakyat, kabupaten Tanggamus merupakan penyumbang produksi kopi robusta di Indonesia. Kopi robusta di daerah ini memiliki cita rasa yang sangat diminati oleh dunia internasional. Pada tahun 2014 Kabupaten Tanggamus memiliki luas areal perkebunan kopi robusta sebesar 40.380 ha, produksi kopi sebesar 24.252,07 ton dan produktivitas sebesar 721,79 kg/ha. Daerah yang memiliki potensi paling besar Kabupaten Tanggamus adalah Kecamatan Pulau Panggung, karena luas areal perkebunannya mencapai 6.099 ha, Produksi kopi robusta sebesar 3.901,5 ton dan produktivitas sebesar 741,59 kg/ha

Sudah sejak lama pasar dunia menaruh minat yang tinggi pada kopi asal Indonesia karena adanya kekhasan aroma dan rasa. Namun produksi kopi yang didominasi oleh pekebunan rakyat berskala kecil masih sulit menjawab permintaan tersebut, akibat ketiadaan sertifikat dan label produk. Tanpa kedua hal tersebut, akan sulit bagi pasar dunia, terutama di negara-negara maju, untuk menerima suatu produk karena dianggap tidak memiliki jaminan mutu. Produksi kopi Lampung merupakan kopi asalan yang tidak memiliki daya saing di pasar Internasional. Oleh karena itu, petani kopi Tanggamus pada tahun 2011 bersama pihak eksportir sepakat untuk menjalankan program Kopi Lestari untuk proses sertifikasi oleh **Rainforest Alliance Coffee**. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan daya saing kopi asal Lampung di Pasar Internasional (Oktami 2014). Program sertifikasi ini memiliki dampak yang besar terhadap persepsi etani. Program pemberdayaan yang dilaksanakan dengan baik dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan menimbulkan persepsi yang positif terhadap program tersebut. (rviza F. Triana et al., 2019).

Hasil penelitian Incamilla et al. (2015) pada petani kopi di kecamatan Pulau Panggung terutama di Desa Tekad sebagian besar telah menerapkan sertifikasi *Common Code for the Coffee Community* (4C) dan petani kopi di Desa Tanjung Rejo sebagian besar juga telah menerapkan sertifikasi kopi Rainforest Alliance (RA). Rata-rata pendapatan petani sertifikasi yang diperoleh dari usahatani kopi sebesar Rp15.565.267 per hektar karena jumlah produksi kopi yang dihasilkan oleh petani sertifikasi sebesar 775 kg per hektar pertahun dalam bentuk biji kopi kering dengan rata-rata harga jual biji kopi kering sebesar Rp19.957 kg per hektar per tahun melalui sertifikasi, selain itu petani sertifikasi memperoleh premium fee atau tambahan keuntungan sebesar Rp320per kg untuk petani sertifikasi 4C dan Rp200 per kg untuk petani sertifikasi RA.

Petani kopi non sertifikasi menghasilkan produksi kopi sebesar 610 kg per hektar per tahun yang juga dalam bentuk biji kopi kering dengan rata-rata harga jual biji kopi kering sebesar Rp18.646 per kg yang mereka jual langsung ke pasar, melalui tengkulak ataupun ikut menjual ke eksportir (PT Nestle atau PT Ned Caffee), sehingga rata-rata pendapatan kopi yang diperoleh sebesar Rp11.188.139 per hektar. Hal tersebut dikarenakan petani kopi sertifikasi sudah mengikuti pembinaan terlebih dahulu, sehingga kualitas kopi petani kopi sertifikasi lebih baik dibandingkan non sertifikasi. Kualitas kopi mempengaruhi harga jual, sehingga kopi sertifikasi memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan non sertifikasi. Petani kopi sertifikasi berhak memperoleh *premium fee* sebagai tambahan keuntungan sebagai petani bersertifikasi.

Kopi membutuhkan naungan dalam hidupnya. Tanaman naungan yang ditanam petani kopi adalah jengkol, petai, durian, lamtoro, dadap,kayu mahoni, sengon,

cempaka dan kayu waru, tetapi dadap, kayu mahoni dan kayu waru belum menghasilkan produksi. Rata-rata pendapatan petani kopi sertifikasi untuk tanaman naungan secara keseluruhan sebesar Rp789.316 per hektar. Petani non sertifikasi memperoleh rata-rata pendapatan tanaman naungan sebesar Rp1.215.883 per hektar. Pendapatan tanaman naungan petani kopi non sertifikasi lebih tinggi dibandingkan petani kopi sertifikasi karena petani kopi non sertifikasi memiliki rata-rata jumlah tanaman naungan yang lebih banyak dibandingkan petani kopi sertifikasi Petani juga menanam tanaman sela yang ditanam diantara tanaman utama untuk meningkatkan pendapatan petani kopi. Tanaman sela yang ditanam oleh petani kopi sertifikasi dan non sertifikasi, yakni lada, pisang sedangkan tanaman kakao jarang ditanam karena sering terkena penyakit.

Pendapatan tanaman sela petani kopi sertifikasi lebih tinggi dibandingkan petani kopi non sertifikasi, yakni sebesar Rp4.339.498 per hektar, sedangkan petani kopi non sertifikasi sebesar Rp2.158.590 per hektar. Pendapatan lada yang diterima oleh petani kopi sertifikasi jauh lebih besar dibandingkan petani kopi non sertifikasi karena rata-rata jumlah produksi dan harga jual lada yang dihasilkan petani kopi sertifikasi lebih tinggi, sehingga mempengaruhi besarnya total pendapatan tanaman sela petani kopi sertifikasi.

Luas areal tanaman kopi di Pulau Panggung pada tahun 2018 mencapai 1387 ha, meningkat menjadi 1457 ha pada tahun 2019. Produksi kopi di Pulau Panggung mencapai 1442 ton pada tahun 2020, meningkat dibandingkan pada tahun 2019 hanya 990 ton. Produksi kopi dari kecamatan Pulau Panggung ini menyumbang totalitas produksi kopi kabupaten Tanggamus (31.346 ton).

Apabila diperhatikan, jenis-jenis tanaman yang pada tahun 2019 tidak didata, mulai didata pada tahun 2020 yaitu aren, cengkeh, kapok randu, lada, pala, pinang, vanili. Jenis-jenis tanaman ini juga mulai didata jumlah produksinya. Hal ini menunjukkan tanaman tersebut memberikan kontribusi bagi perekonomian keluarga maupun local. Hal itu juga menunjukkan semakin banyak tanaman yang diambil hasilnya (bukan kayunya) seperti aren, cengkeh, kakao, kapok, kayu manis, kelapa, kopi,

lada, pala, pinang, vanili. Kondisi ini menunjukkan bahwa mulai ada perubahan perilaku dari produksi kayu menuju non kayu. Produksi kopi kecamatan Pulau Panggung mencapai1442 ton pada tahun 2019, ,meningkat tajam dibandingkan tahun 2018 sebesar 990 ton.

4.8. Sejarah Pemilu di Kecamatan Pulau Panggung

Etnis Semende berpartisipasi pada semua pemilu yang dilaksanakan di Indonesia hingga Pemilu Serentak tahun 2019. Berbeda dengan pemilu yang diselenggarakan sebelum tahun 2019, pemilu tahun 2019 diselenggarakan serentak antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Keserentakan ini merupakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas dasar gugatan nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, dan diakomodasi dalam UU Pemilu tahun 2017. Keserentakan itu berarti pada hari yang sama pemilih (termasuk etnis Semende) memilih calon presiden dan wakil presiden, PD, DPR, DPRD Provinsi dan bupaten/Kota, dilakukan dalam satu waktu. Dengan demikian terdapat lima macam surat suara yang akan dicoblos di bilik suara, yaitu surat suara pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Etnis Semende di Kecamatan Pulau Panggung telah mengikuti pemilu sejak Indonesia merdeka. Pada era orde baru, mereka telah terlibat dalam pemilu. Pada tahun 1971 pemilu diikuti oleh 10 partai politik yaitu NU, Parmusi, PSII, PERTI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, PNI, serta Golkar. Hasilnya, Golkar ditetapkan sebagai partai suara terbanyak diikuti NU, PNI, dan Parmusi; dan 1 ormas yaitu NU. Selanjutnya sejak tahun 1977 hingga 1997, hanya ada tiga partai politik yang menjadi peserta pemilu yaitu Golkar, PDI dan PPP. Pemenang pemilu selama orde baru adalah partai Golkar. (Nisa et al., 2017), (Mahdiana, 2018).

Pada periode reformasi, pemilu tahun 1999 diikuti 48 partai politik Selanjutnya pemilu tahun 2004 sebanyak 24 partai politik; pada pemilu tahun 2009 diikuti 34 partai politik; pada pemilu tahun 2014 diikuti 10 partai politik; tahun 2019 diikuti 16 partai politik. Selain itu terdapat 4 partai politik local Aceh· Berdasarkan data

di atas dapat diketahui bahwa hanya ada beberapa parpol yang selalu memenangi pertarungan dalam pemilu. Hal itu terlihat pada prosentase perolehan suara dan kursi di setiap pemilu. Pada tiga pemilu yaitu tahun 2009, 2014, dan 2019 tampak bahwa PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Nasdem. Partai Nasdem, meskipun pada tahun 2009 belum menjadi peserta pemilu, namun pada tahun 2014 dan 2009 langsung menjadi parpol yang memperoleh suara dan kursi. Hal ini berbeda dengan Partai hanura yang pada pemilu tahun 2009 dan 2014 memperoleh suara dan kursi, namun pada tahun 2019 meskipun memperoleh suara namun suaranya tidak mencapai 4% secara nasional maka partai tersebut tidak dilibatkan dalam perhitungan kursi.

Informan Amin (Wawancara tanggal 19 Desember tahun 2022 di Gunung Megang), bahwa pada masa Orde Baru , pemilu tahun 1971 diikuti 10 partai politik. Aparat pemerintah di tingkat kecamatan (Camat) menyampaikan kepadanya untuk Golkar memperoleh suara 100%. Mobilisasi pemilih di desanya dilakukan oleh Camat melalui kepala desa. Selanjutnya Kepala Desa memobilisasi masyarakat etnik Semende. Hal ini dilakukan terus menerus, apalagi ketika partai politiknya hanya Golkar, PPP dan PDIP. Pada pemilu tahun 2004, pemilu dilakukan dengan system proporsional tertutup. Untuk memilih anggota DPR dan DPRD , dilakukan pembagian daerah pemilihan. Di Lampung, ada dua daerah pemilihan untuk DPR, 8 daerah pemilihan DPRD Provinsi, dan setiap kabupaten dibagi daerah pemilihan yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten Tanggamus dibagi dalam 6 daerah pemilihan. Salah satu daerah pemilihannya adalah Dapil Tanggamus 4 (empat) terdiri dari Kecamatan Pulau Panggung, Ulu Belu, Air Naningan (8 Kursi). Di dapil ini diperebutkan 8 kursi anggota DPRD Tanggamus. (Sumber Data: KPU Tanggamus, 2019). Dalam sejarah, pemilu di Lampung dilaksanakan sebagaimana pemilu nasional. Tidak ada perbedaan pada system pemilu, teknis penyelenggaraan, penyelenggara pemilu. Namun perlu dijelaskan bahwa meskipun penetapan peserta pemilu merupakan kewenangan KPU RI namun di tingkat lokal tidak semua peserta pemilu di tingkat nasional menjadi peserta pemilu di tingkat lokal (Provinsi dan labupaten/kota). Berbeda dengan peserta

pemilu di tingkat nasional, pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2019, 2014, 2009 diikuti partai-partai sebagai berikut:[17] Dari partai-partai tersebut terdapat partai politik yang selalu ada di setiap pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019. Pada pemilu 2009, semua partai politik (36) partai politik menjadi peserta di kabupaten Tanggamus.

Pada tahun 2009 terdapat partai-partai yang berhasil memperoleh kursi yaitu Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Hati Nurani Rakyat. Partai Bulan Bintang yang menjadi peserta pemilu tahun 2009, tidak memenangkan pertarungan di tingkat DPR RI dan Provinsi Lampung, namun memperoleh kursi di Kabupaten Tanggamus. Hal yang sama juga terjadi

[17] Partai Peserta Pemilu 2019: PKB: Partai Kebangkitan Bangsa; Gerindra: Partai Gerakan Indonesia Raya; PDIP: Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia; Golkar: Golongan Karya; Nasdem: Nasional Demokrat; Garuda: Gerakan Perubahan Indonasia; Berkarya: Beringin Karya; PKS: Partai Keadilan Sejahtera; Perindo: Partai Persatuan Indonesia; PPP: Partai Persatuan Pembangunan; PSI: Partai Solidaritas Indonesia; PAN: Partai Amanat Nasional; Hanura: Hati Nurani Rakyat; Demokrat Partai Peserta Pemilu 2014: Nasdem: Nasional Demokrat; PKB: Partai Kebangkitan Bangsa; PKS: Partai Keadilan Sejahtera; PDIP; Golkar; Gerindra; Demokrat; PAN; PPP;Hanura (sebagaimana telah diterangkan pada no 1). Partai Peserta Pemilu 2009: Hanura; PKPB: Partai Karya Peduli Bangsa; PPPI: Partai Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; PPRN : Partai Peduli Rakyat Nasional; Gerindra; BRN: Partai Barisan Nasional; PKPI : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; PKS ; PAN; PPIB: Partai Perjuangan Indonesia Baru; Partai Kedaulatan; PPD: Partai Persatuan Daerah; PKB; PPI: Partai Pemuda Indonesia; PNIM: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; PDP : Partai Demokrasi Pembaharuan; PKP: Partai Karya Perjuangan; PMB: Partai Matahari Bangsa; PPDI: Partai Kasih Demokrasi Indonesia; PDK Partai Demokrasi Kebangsaan; PRN: Partai Republika Nusantara: P. Pelopor; Golkar; PPP; PDS: Partai Damai Sejahtera: PNBK: Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia; Partai Bulan Bintang; PDIP: PBR: Partai Bintang Reformasi; P Patriot; Partai Demokrat; PKDI: Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 9 (Sembilan) partai politik yang selalu menjadi peserta pada pemilu tahun 2009, 2014, 2019 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, PKS, PKB, PPP, PAN, Hanura, Golkar, Gerindra.

Untuk partai peserta pemilu tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional, ada 2 partai politik yang tidak menjadi peserta di tingkat local Tanggamus yaitu Partai Garuda dan PBB. Selain itu banyak pertain politik yang hanya menjadi peserta pemilu tahun 2009 dan pada pemilu 2014 dan 2019 tidak lagi menjadi peserta pemilu. Partai-pertai politik tersebut adalah Partai Karya Peduli.Bangsa; Partai Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; Partai Peduli Rakyat Nasional; Partai Barisan Nasional; : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;Partai Perjuangan Indonesia Baru; Partai Kedaulatan; Partai Persatuan Daerah; Partai Pemuda Indonesia; Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; Partai Demokrasi Pembaharuan; Partai Karya Perjuangan; Partai Matahari Bangsa;Partai Kasih Demokrasi Indonesia; Partai Demokrasi Kebangsaan; Partai Republika Nusantara: P. Pelopor; Partai Damai Sejahtera: Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia; PBR: Partai Bintang Reformasi; P Patriot; Partai Kasih Demokrasi Indonesia.

pada PKNU, Partai Bintang Reformasi, Partai Patriot, Partai Kedaulatan. Partai-partai ini bisa memenangkan pertarungan di tingkat local (DPRD Tanggamus) meskipun di tingkat nasional dan provinsi tidak menang.

Tabel 10.Perolehan Kursi DPR DPRD Provinsi dan DPRD Tanggamus Pada Pemilu Tahun 2014

Parpol	DPR 2014	%	Parpol	DPRD Lampung	%	Parpol	DPRD Tanggamus	%
PDIP	109	19,5	PDIP	17	20,0	PDIP	11	24,4
Golkar	91	16,3	Golkar	10	11,8	Golkar	5	11,1
Gerindra	73	13,1	Gerindr	10	11,8	Gerindra	4	8,9
Demokrat	61	10,9	Demo-krat	11	13	Demokrat	5	11,1
PKB	47	84	PKB	7	8,3	PKB	2	4,4
PAN	49	8,8	PAN	8	9,5	PAN	5	11,1
PKS	40	7,2	PKS	8	9,2	PKS	3	6,7
Nasdem	35	6,3	Nasdm	8	9,5	Nasdem	3	6,7
Hanura	16	2,9	Hanura	2	2,4	Hanura	3	6,7
PBB	0	0	PBB	0	0,0	PBB	0	0,0
PKPI	0	0,0	PKPI	0	0,0	PKPI	0	0,0

Sumber Data KPU, diolah 2023

Pada pemilu tahun 2014, semua partai yang memperoleh kursi DPR juga memperoleh kursi DPRD Lampung dan Kabupaten Tanggamus. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh kursi DPR sebanyak 109 (19,46%) kursi, DPRD Provinsi Lampung 17 (20%) kursi dan DPRD Kabupaten Tanggamus 11 (24,44%) kursi. Partai Golkar memperoleh 91 (16,25%) untuk DPR, 10 (11,76%); DPRD Provinsi 5 (11,11%) kursi DPRD Tanggamus. Partai Gerakan Indonesia Raya 73 (13,04%), 10 (11,76%) DPRD Provinsi dan 4 (8,89%) kursi DPRD Tanggamus. Partai Demokrat memperoleh kursi DPR sebanyak 61 (10,89%), 11 (12,94%) DPRD Provinsi , dan 5 (11,11%) DPRD Tanggamus. PKB 47 (8,39%) kursi DPR, 7 (8,24%) kursi DPRD Provinsi Lampung dan 2 (4,44%) kursi DPRD Kabupaten Tanggamus. PAN 49 (8,75%)

kursi DPR, 8 (9,41%) kursi DPRD Provinsi dan (11,11 %) DPRD Tanggamus. Partai Keadilan Sejahtera 40 (7,14%) kursi DPR, DPRD Provinsi 8 (9,41%) kursi dan 3 (6,67%) kursi DPRD Tanggamus. Sebagai partai yang baru mengikuti pemilu tahun 2014, Partai Nasdem memeroleh 35 (6,25%) untuk DPR, DPRD Provinsi 8 (9,41%) kursi dan 3 (6,67%) kursi DPRD Tanggamus). PPP 39 (6,96%) kursi DPR, 4 (4,71%) kursi DPRD Provinsi dan 4 (8,89 %) kursi DPRD Tanggamus. Kursi di DPR pada Partai Hati Nurani Rakyat 16 (2,86%), 2 (2,35%) kursi DPRD Provinsi dan 3 (6,67%) kursi DPRD Tanggamus.

Terdapat 16 partai politik yang menjadi peserta pemilu serentak tahun 2019 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Indonesia, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Selanjutnya, Tabel 11 menunjukkan komposisi perolehan suara peserta pemilu pada tahun 2019 di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. PDIP mampu merebut kursi DPR sebesar 22,26 %.
2. Ada 7 parpol tidak memenuhi parlemen *treshold* sehingga tidak memperoleh kursi DPR yaitu Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
3. Ada 9 parpol yang memperoleh kursi dalam rentang 10%-20% yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem.
4. Ada parpol yang memperoleh kursi DPR dibawah 10%.
5. Ada yang tidak memperoleh kursi sama sekali. Hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan di dalam perebutan penguasaan sumberdaya politik antara partai yang besar, menengah dan kecil/gurem atau partai baru.

Tabel 11. Jumlah Kursi Parpol DPR, DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Tanggamus Tahun 2019

No	DPR		%	DPRD Lampung		%	DPRD Tanggamus		%
1	PDIP	128	22,26	PDIP	19	22,35	PDIP	12	26,67
2	Golkar	85	14,78	Golkar	10	11,76	Golkar	4	8,89
3	Gerin-dra	78	13,57	Gerin-dra	11	12,94	Gerindra	4	8,89
4	Demo-krat	54	9,39	Demo-krat	10	11,76	Demo-krat	0	0,00
5	PKB	58	10,09	PKB	9	10,59	PKB	7	15,56
6	PAN	44	7,65	PAN	7	8,24	PAN	6	13,33
7	PKS	50	8,70	PKS	9	10,59	PKS	4	8,89
8	Nas-dem	59	10,26	Nasde m	9	10,59	Nasdem	5	11,11
9	PPP	19	3,30	PPP	1	1,18	PPP	3	6,67
10	Hanura	0	0,00	Hanura	0	0,00	Hanura	0	0,00
11	PBB	0	0,00	PBB	0	0	PBB	0	0
12	Persatu an	0	0,00	-	-	-	-	-	-
13	Berkar ya	0	0,00	-	-	-	-	-	-
14	PSI	0	0,00	-	-	-	-	-	-
15	PKPI	0	0,00	-	-	-	-	-	-
16	Garuda	0	0,00	-	-	-	-	-	-

Sumber Data: KPU Provinsi Lampung, diolah 2023

Tabel 11 di atas juga menunjukkan bahwa partai-partai yang memperoleh kursi DPR, juga memperoleh kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebaliknya partai yang tidak memperoleh kursi di DPR juga tidak memperoleh kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya Dapil Tanggamus.

Di tingkat lokal (TPS), perebutan sumberdaya politik etnis Semende terjadi di semua desa di Kecamatan Pulau Panggung. Etnis Semende yang tinggal di desa Tekad memberikan pilihannya pada calon-calon anggota legislatif kabupaten Tanggamus dapil 4, anggota DPRD Provinsi Lampung dapil 4, anggota DPR, DPR RI Dapil 2. Beberapa partai politik yang baru ikut sebagai peserta pemilu

tahun 2019 yaitu Garuda di semua TPS desa Tekad tidak dipilih etnis Semende. Sedangkan Partai Berkarya masih dipilih etnis Semende meskipun tidak di semua TPS. Partai yang sudah lama ikut pemilu yaitu PBB dan PKPI juga di banyak TPS tidak memperoleh suara. Partai Hanura juga termasuk partai yang tidak banyak dipilih. Partai Serikat Indonesia (PSI), juga tidak banyak peminatnya.

4.9. Sejarah Etnis Semende di Pulau Panggung

4.9.1. Migrasi Menuju Kecamatan Pulau Panggung Orang Semende[18] (dalam beberapa literatur disebut juga Semendo), adalah salah satu suku bangsa yang wilayah adatnya berada di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan. Mitologi Semende mengatakan bahwa mereka berasal dari sebaran salah satu kelompok Basemah yang ada di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan

[18] Kata ***Semende*** memiliki beberapa macam arti. Menurut Bahar Datuk Mangkuto Alam, seorang akademisi yang berasal dari Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, mengatakan: "Istilahnya Semende, dengan -e, bukan Semendo, dengan -o. Asal katanya adalah ***"same ande"*** yang secara ringkas dapat diterjemahkan sebagai "sama-sama anak, sama-sama berhak".Dalam penelitian lainnya oleh Barmawi menjelaskan bahwa kata "Semendo" berasal dari kata ***"semende"*** yang berarti perkawinan. Kata semende terdiri dari kata *se* + *ende* yang mendapatkan sisipan -m-. *"Se"* berarti satu, sedangkan *"ende"* berarti kedua pihak laki-laki masuk ke rumah perempuan mematuhi satu adat perkawinan, yaitu laki-laki masuk rumah perempuan tersebut tidak dijual, demikian pula pihak perempuan tidak membeli. Kata semende berasal dari *same* + *nde* yang berarti bahwa di dalam suatu perkawinan, keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan memiliki hak serta kewajiban yang sama terhadap anak dan menantu.Dengan demikian, kata ***Semende*** merujuk kepada adat istiadat dalam perkawinan ***tunggu tubang***, yakni suatu adat yang memposisikan serta menugaskan anak perempuan tertua di dalam suatu keluarga sebagai penunggu rumah dari keluarga tersebut. Rumah seperti ini disebut dengan ***rumah tunggu tubang*** dalam adat Semende
(https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Semende).
Kata Semende mempunyai beberapa pengertian (Tim peneliti Adat Istiadat Semende) diantaranya;
1. Berasal dari kata Same dan Nde. Same berarti sama, Nde berarti milik, sehingga bermakna sama memiliki/sama kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik dalam individu maupun dalam urai.
2. Berasal daru Se-Man-De artinya rumah kesatuan milik bersama (rumah yang ditunggui oleh anak tunggu tubang), tempat berkumpulnya sanak keluarga sewaktu berziarah ke puyang, hari-hari besar serta acara keluarga. (Hutapea, 2009 : 3)
Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia terbitan LP3ES (1997) menyebutkan, Suku Semendo atau Semende berasal dari kata se yang berarti satu dan mende yang berarti induk atau ibu. (Doty Damayanti, 2009 : Harian Kompas) Disamping itu, ada pula yang menyatakan bahwa pengertian Semende berkaitan dua suku kata yaitu seme dan ende. Seme artinya sama, sedangkan ende adalah harga, yang berarti semende sama dengan “sama harga”. Artinya, antara laki-laki dan perempuan adalah sama dalam adat Semende yang menurut logat Semende disebut same rege yaitu betine (perempuan) tidak membeli dan bujang (lelaki) tidak dibeli. Pengertian Semende diartikan hubungan perkawinan (semende) bahwa laki-laki datang tidak dijual dan perempuan menunggu tidak membeli ((Efrianto, 2017a)

(Iskandar, 2003). Etnis Semende hidup dalam kultur pekebun. Informan Puyang[19] Amana menjelaskan bahwa sebelum tinggal di Pulau Panggung terlebih dahulu tinggal di Ulu Belu , dan sebelumnya puyangnya tinggal di Ulu Semong. Mereka bermigrasi melewati daerah yang berbukit sepanjang bukit Barisan Selatan. Migrasi etnis Semende yang selalu menggunakan jalur daerah yang berbukit yaitu Bukit Barisan Selatan dilakukan dengan membawa keluarga. Perjalanan dari Sumatera Selatan hingga Pulau Panggung selalu melewati bukit-bukit, tetapi ketika sampai Pulau Panggung tidak dapat melanjutkan perjalanan karena sudah memasuki dataran rendah. Di Pulau Panggung, etnis Semende dianggap sebagai perambah yang merusak hutan. Mereka ditranslokkan ke Mesuji tetapi tidak bertahan hidup karena perbedaan kultur pekebun dengan sawah bergambut sehingga kembali ke Pulau Panggung (Handi Mulyaningsih, 1997)

Etnis Semende yang berada di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus bukan etnis asli Lampung. Etnis Semende di Lampung memiliki sejarah panjang migrasi dari Bengkulu. Menjelang 1876 (21), etnis Semende memulai migrasi menuruni lereng timur Pegunungan Barisan di wilayah yang disebut Rebang. Pada awal tahun 1920-an dan 1930-an etnis Semende menjelajah di sepanjang Bukit Barisan hingga Tanjung Begelung, lalu sampai di Pegunungan Rindingan dan mengembangkan hutan yang menjadi Kecamatan Pulau Panggung. Dari 25 desa di kecamatan saat ini, 18 desa dibangun oleh Semendo. Kecuali Hulu Semong dan Gedung Agung yang didirikan pada akhir abad 19 dan tiga desa (di antaranya adalah Pulau Panggung) yang didirikan pada awal abad ke-20, desa-desa Semendo semuanya didirikan antara tahun 1918 dan 1930. Menurut Moyer (1984) komunitas Semende suka bermigrasi sehingga keberadaannya banyak ditemukan di berbagai wilayah, seperti Bengkulu, Lampung, Jambi, dan beberapa daerah lain di Provinsi Sumatra Selatan. Komunitas Semende cenderung mengelompok dan tetap mempertahankan adat istiadatnya, khususnya adat Tunggu Tubang. Migrasi dilakukan orang Semende adalah sebagai upaya untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

[19] Puyang memiliki arti sesepuh atau pendiri atau yang membuka desa atau wilayah ((Zainal Arifin & Pujiharjo, 2017).

Oleh karena itu dalam kerangka teori strukturasi, kultur memberikan kontribusi pada perilaku etnis Semende dalam pola migrasi., distribusi pekerjaan, peran, status, laki-laki dan perempuan. Individu-individu juga berkontribusi pada terbangunnya kultur migrasi seperti migrasi melalui bukit-bukit, membangun distribusi pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, cara membuka hutan, dan sebagainya. Menurut Anthony Giddens, teori strukturasi diilhami pencarian kesejahteraan antara sosialisme dan kapitalisme apakah ada jalan ketiga? Meskipun Etnis Semende mengikuti kultur Islam tetapi tatacara pewarisannya berbeda dengan Islam. Ini menunjukkan bahwa struktur tidak seutuhnya mempengaruhi agen, dan agen berkontribusi melakukan perubahan.

4.8.2. Adat Istiadat Etnis Semende.

Adat istiadat Etnis Semende dipengaruhi oleh nafas ke-Islaman. Mereka hidup sederhana tercermin dalam istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam mencari uang misalnya “yang penting berkah”, “halal”. Kalau untuk membelanjakan uang mereka berprinsip “bermanfaat bagi orang lain”, tidak boros, tidak menghamburkan. Selain itu Pada Etnis semende terdapat perintah/suruhan dan larangan yaitu:

> *Menganut/memeluk agama Islam, Beradat Semende, Beradab Semende dan Betungguan (membela kebenaran). Kemudian larangan/pantangan jeme Semende yakni sesama Tunggu Tubang pantang dimadukan, mengingat tanggung jawabnya berat, Bejudi/jaih/nyabung, Enggaduh racun tuju serampu (iri hati/hasut/dengki), Nganakah duit, Maling tulang kance, Nanam kapas/wanggean (Ringan timbangannye), dan Nanam sahang (pantang garang/pemarah). Adapun Sifat (motivasi) jeme Semende yakni Benafsu (rajin bekerja), Bemalu (sebagian dari iman), Besingkuh (berbicara dan tingkah laku tidak sembarangan), Beganti (setia kawan), Betungguan (tidak goyah/mantap), Besundi/beadab (tata krama, tata tertib) (Pahlawan, 2019) Selain itu terdapat perintah/suruhan yaitu menganut dan memeluk agama Islam, beradat Semende, beradab Semende, betungguan (membela kebenaran). Sifat motivasi orang Semende yaitu Benafsu (rajin bekerja), bemalu (sebagian dari iman), besingkuh (berbicara dan bertingkah laku tidak sembarangan), beganti (etia kawan), betungguan (tidak goyah, mantap), besundi/beradab bertata karma, beteku (perhatian dan suka membantu)(Pahlawan, 2019a)*

Kesederhanaan dapat dilihat juga dalam tampilan rumah-rumah keluarga yang sederhana. Mereka tidak menyukai kehidupan mewah bahkan dengan cara berhutang. Mereka hidup bersama keluarga besar bukan keluarga kecil (keluarga batih). Mereka mengatakan "begini saja sudah cukup", "kita orang kampung", "yang penting nyaman, tidak seperti jaman dulu[20]". Jaman dulu yang dimaksudkan adalah Jaman Orde Baru, dimana Etnis Semende dianggap sebagai perambah hutan yang sering mencuri kayu (*illegal Logging*). Tentang hal ini, pak Amin (Mantan Kepala Desa Gunung Megang) mengatakan bahwa pada jaman Orde Baru, belum dilakukan penataan hutan, batas hutan marga dan hutan Lindung menurut pemerintah belum jelas. "*Suku kami mengambil kayu dari tanah Marga, pemerintah menganggap kayu diambil dari hutan lindung*".[21] Hasil penelitian (handi Mulyaningsih, 1997) juga menjelaskan bahwa Etnis Semende bukan perambah hutan, kultur mereka adalah kultur pekebun. Berdasarkan kajian Noor (2011) masyarakat Etnik Semende memiliki pepatah, semacam petuah atau pesan-pesan nenek moyang yaitu,

> *... jangan: 1. Beragam Bange, 2. Tesinggung dikit ngajak belage, 3. Dindak Kalah kate, 4. Diujuk itulah kendaknye, 5. Ndak lemak dik bemule , 6. Cacak calak awak bange, 7. Sifat ndak ngene lah gawinye, 8. Insyaf nunggu nguk tue, 9.Lemak nginak jeme sare, 10. Lemak dikit dunie lah luk ndie, 11. Mpai bepangkat lah luk raje. Dalam Bahasa Indonesia, jangan : 1. Bercandaan berlebihan, 2. Tersinggung sedikit mengajak berantam, 3. Tidak mau kalah omongan /ngeyel, 4. Selalu ingin dipuji, 5. Mau enak tapi tidak mau berusaha, 6. Pura pura pintar padahal bodoh, 7. Ingin menguntungkan diri sendiri, 8. Insyaf setelah tua, 9. Bahagia melihat orang lain susah, 10. Baru dapat sedikit tapi sudah sombong seolah dunia miliknya, 11. Baru saja dapat jabatan sudah merasa bagai raja.*

Larangan tersebut berlaku untuk internal Etnis Semende dan dalam pergaulan dengan etnis yang lain. Di internal etnis Semende, diatur relasi antara Meraje dengan Tunggu Tubang dan Anak Belai. Diantaranya, panggilan nama kepada

[20] Yang dimaksud jaman dulu adalah jaman Orde Baru, dimana Etnis Semende dianggap sebagai perambah hutan. Mereka dianggap sebagai pencuri pohon-pohon *(illegal logging*). Sekarang pemerintah tidak mempersoalkan kehidupan Etnis Semende di hutan Lindung karena sudah dalam program Hutan Kemasyarakatan (Muhaidi, Wawancara dengan informan Muhaidi, tanggal 25 Agustus 2023).

[21] di Wawancara dengan Amin, tanggal 19 September 2023 di Gunung Megang.

Meraje tidak boleh dilakukan, apabila dilakukan dianggap sebagai hal yang tidak sopan. Etnis Semende dilarang berkonflik, konflik merupakan hal yang tabu. Bila ada masalah tidak diselesaikan dengan berantem tetapi melapor ke Meraje. Tidak mau mengalah juga merupakan larangan, apalagi kepada Meraje harus menurut. Etnis Semende memiliki nilai-nilai kerja keras karena semua harta warisan untuk Tunggu Tubang maka laki-laki harus kerja keras agar memperoleh harta. Bahkan Tunggu Tubang yang memperoleh warisan juga harus kerja keras apabila dari harta tersebut masih dirasakan kurang.

Larangan tersebut merupakan nilai-nilai ideal yang masih dipertahankan dan menjadi pedoman perilaku meskipun kadang-kadang tidak disadari telah dilanggar. Misalnya seorang broker yang mengomentari beberapa calon-calon yang berhasil menjadi anggota DPRD, dengan mengatakan sombong dan sudah lupa diri[22]. Akibatnya mereka tidak dipilih lagi karena melanggar larangan tersebut[23]. Termasuk di dalamnya perilaku setelah memperoleh jabatan kemudian tidak kenal lagi kepada tetangga, mau dihormati setelah mendapatkan penghormatan merupakan perilaku yang mulai terjadi[24]. Tetapi masih ada yang sampai tua tetap melayani sebagaimana idealnya seorang *Meraje*[25]. Etnis Semende yang kuat dalam agama, masih memberikan pembelajaran agama kepada anak-anak, mengutamakan ibadah[26]. Meskipun demikian implementasi Tunggu Tubang dalam merawat orang tua semakin memudar karena mengutamakan pekerjaan merupakan fenomena yang makin sering ditemui, termasuk karena pernikahan dan ikut suami[27]. Namun, Etnis Semende yang erat persaudaraannya jarang terinformasi senang melihat orang lain susah. Saat ada kasus anak kecil tersiram air panas, keluarga membantu tanpa pamrih, padahal berobatnya hingga sampai Bandung.[28] Pada saat ada bencana alam rumah roboh, masyarakat juga bergotong royong. Gotong royong juga dilakukan dengan bekerja pada mereka yang memiliki kebun kopi, dengan membantu melakukan pekerjaan

[22] Disampaikan KK dalam wawancara
[23] Disampaikan Puyang Amn pada FGD
[24] Disampaikan saat FGD
[25] Disampaikan pak Amn dan KK, Lda dalam wawancara
[26] Disampaikan Puyang Amn saat wawancara
[27] Disampaikan saat FGD
[28] Disampaikan Irja

di rumah majikan tanpa upah[29]. Dalam kasus penebangan hutan (*illegal logging*), etnis Semende berkomentar ingin senang tak mau susah[30].

Perempuan *Tunggu Tubang* ditunjuk secara adat untuk menunggu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kedua harta ini tidak boleh dibagikan kepada semua anak-anaknya tetapi dikelola anak perempuan tertua. Perempuan *Tunggu Tubang* hanya mengelola harta pusaka, tidak boleh menjual tetapi boleh mengelolanya dan mengambil hasilnya; laki-laki mengontrol penggunaan harta pusaka. Menurut H.Tjikdeham (dalam Zulki Karnaen, 2020) makna *Tunggu Tubang* adalah baik laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat: 1) Perempuan dibela, laki-laki membela, 2) Perempuan disayang dan laki-laki disekolahkan tinggi, belajar mengaji. 3) Perempuan lekas kawin (Semende) sehingga orang tua berkesempatan mencari uang untuk mencari biaya sekolah anak laki-laki, mengaji dan biaya kawin anak laki-laki, 4) Sama-sama mengharapkan hasil, perempuan lekas berkeluarga sehingga berkembang keturunannya, dan laki-laki kawin ke *Tunggu Tubang* lain (Semende).

Filosofi Etnis Semende dalam distribusi status dan peran laki-laki dan perempuan itu menurut Puyang Amana sudah tidak seperti yang disampaikan Tjikdeham sebagaimana dikutip Zulki Karnaen (2020). Menempuh pendidikan sudah menjadi kebutuhan baik untuk anak laki-laki dan perempuan. Saat ini menjadi hal yang biasa kalau anak perempuan bersekolah tinggi. Memang ada *constraining* dari adat Etnis Semende tentang anak perempuan sebagai Tunggu Tubang maupun *Anak Belai*. Beberapa informan penelitian seperti Linda menjelaskan bahwa pendidikan itu penting untuk kemajuan perempuan.

”K*alau mengikuti adat Tunggu Tubang, saya nggak sekolah. Tapi orang tua saya setuju saya sekolah, jadi sarjana. Mereka malah bilang sekolah yang tinggi, jangan seperti bapak ibunya, jadi petani. Untuk urusan Tunggu Tubang bisa diurus orang tua, nggak harus saya, Kalau nggak sekolah nggak bakal maju, dikampung terus kerja di kebon.* [31].

[29] Disampaikan Zk dalam FGD

[30] Disampaikan pak Muhaidi, dkk dalam FGD

[31] Informan Linda, wawancara tanggal 12 Pebruari 2022 di Jatimulyo

Seorang calon Tunggu Tubang mengatakan:

”*Saya akan menjadi Tunggu Tubang, sekarang masih dipegang ibu saya. Saya sudah sarjana, alumni Bahasa Inggris UIN, kalau jaman sekarang perempuan pada kuliah minimal sekolah SMA kan ada sekolah SMA di Pulau Panggung. Kalau perempuan tidak sekolah atau tidak berpendidikan tinggi, terus menikah sepertinya justru tidak bermartabat*”[32].

Distribusi status dan peran laki-laki dan perempuan adat *Tunggu Tubang* mempunyai filosofi khusus dalam mengangkat derajat perempuan sebagai pemegang hak tradisional. Ketinggian derajat wanita *Tunggu Tubang* diimplemntasikan dalam bentuk lembaga perkawinan dan harta warisan. Putri Anzari & Sarwono (2018) mengkritisi bahwa terdapat konstruksi yang bias gender pada *Tunggu Tubang* yang diproduksi dan direproduksi melalui penyebaran nilai-nilai sejak kecil. Dalam perkembangannya, terjadi proses produksi dan reproduksi nilai-nilai sehingga perempuan *Tunggu Tubang* melihat posisi dan peran mereka sebagai takdir dan identitas budaya. ”...itu dulu...kalau sekarang kami tidak menganggap Tunggu Tubang sebagai takdir. Maksudnya jadi anak pertama itu takdir. Tetapi tak harus berada di rumah kan” demikian kata Linda, seorang Tunggu Tubang tetapi tidak lagi tinggal di kampungnya.

Menurut informan[33] bias gender itu tampak pada pola pewarisan harta, seperti rumah dan lahan, lebih diprioritaskan untuk anak perempuan, khususnya anak perempuan tertua. Anak perempuan tertua *(Tunggu Tubang*) ditugaskan untuk mengelola dan memanfaatkan harta warisan tersebut untuk kepentingan keluarga luasnya. Menurut informan, anak laki-laki dan anak perempuan juga mendapatkan harta warisan, tetapi prioritas pada anak perempuan pertama. Apabila keluarga memiliki banyak harta, maka setelah anak perempuan mendapatkan warisan yang dianggap mencukupi, harta lainnya dibagi secara merata kepada anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. Apabila harta keluarga terbatas harta hanya diwariskan kepada anak perempuan tertua.

[32] Wawancara dengan Informan Sheila tanggal 24 Juli 2023
[33] Informan Linda, wawancara tanggal 12 Pebruari 2022 di Jatimulyo

Penguasa warisan adalah semua anggota keluarga tersebut yang dipimpin oleh anak laki-laki tertua (*jenangtue*), yang bertugas mengontrol pemanfaatan harta agar tetap sesuai dengan kegunaannya. Kontrol bermanfaat agar tidak terjadi konflik di antara para anggota keluarga. Saudara laki-laki ibu (*Meraje*) menjadi pihak yang mengadili apabila keponakannya (tunggu Tubang) tidak menjalankan perannya. Pola pewarisan ini membawa konsekuensi pada anak laki-laki tidak memiliki harta yang mencukupi untuk menghidupi keluarga nantinya. Kondisi ini "memaksa" anak laki-laki merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Hal ini lah yang membuat terbentuknya kampung-kampung orang Semende di perantauan. Sebaran orang Semende tidak hanya di Sumatra Selatan, tetapi juga ditemukan di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu, Lampung, dan Jambi (Velinda et al., 2017)

Pola migrasi orang Semende cenderung mengelompok dan membentuk sebuah kampung. Migrasi dilakukan untuk mencari lahan yang dijadikan kebun kopi. Migrasi merupakan perjalanan bersama keluarga besar. Anak-anak yang masih kecil pada awalnya ditinggal bersama orang tuanya, tunggu tubang, *Anak Belai*. Tetapi mereka yang migrasi ke Pulau Panggung ada yang polanya sekalian membawa semua keluarganya, ada yang setelah usia sekolah baru dibawa ke luar hutan. Membuka hutan dilakukan secara berombongan. Seorang informan yang bernama Linda bercerita :[34] melalui Whattup

> *Saya saat masih bayi diajak bapak dan ibuku membuka hutan di pal besi desa Tanjung Bagelung. Bila kedua orangtuaku ngoret, saya ditaruh dibawah pohon yang tumbang yang bawahnya dilubangi. Tujuannya agar kalau saya bangun tidak kemana-mana, takut ngglundung karena daerah yang sedang dibuka dalam posisi miring. Cara menaruh bayi seperti itu membuat bayi aman dan terlindungi dari matahari dan aman tidak ngglundung ketika bayi terbangun. Jarak antara bayi ditaruh dengan tempat ngoret tidak jauh, sehingga kalau menangis terdengar. Ibuku memberikan air susu untuk kebutuhan makan. Saya ikut ke kebun sampai saya harus sekolah SD. Setelah SD saya dimomong Puyang. Puyang ingin saya pintar, tidak boleh di kebun terus bersama bapak ibu. Bapak saya dan semua rombongan membuat gubug kecil di hutan. Berada di hutan itu dari menyiapkan kebun kopi hingga kopi bisa dipanen. Kalau malam gelap, terdengar suara bermacam hewan dan binatang. Di gubug digunakan*

[34] wawancara dengan Informan Linda tanggal 9 Juli 2023 melalui Whatsupp

penerangan dari lampu petromak dan teplok.Membuka hutan itu berombongan kakak adek membuka hutan. Saat membuka hutan, kami langsung menanam padi, agar tidak kehabisan bekal. Kalau padinya sudah bisa dipanen, maka kami makan nasi. Bila setelah itu yang ditanam jagung, maka kami makan jagung. Setelah 3 tahun kopi berbuah, maka kami ke pasar membeli kebutuhan makan seperti garam, ikan asin. Setelah itu, melanjutkan membuka hutan lagi sambil merawat tanaman kopi.

Cerita yang hampir sama disampaikan Puyang Amana, bahwa saat kecil diajak membuka huhan di daerah Ulu Belu dengan keluarga besarnya, setelah besar diajak berpindah lagi ke desa Talang Jawa yang dahulu namanya Tanjung Bagelung hingga sekarang. Alasan pindah karena sudah harus bersekolah[35]

Kekerabatan[36] etnik Semende disebut Jeme Semende merupakan tatanan kekerabatan *Jeme* (masyarakat) Semende. Tatanan ini terkenal sebagai kearifan tradisional etnis Semende. Pada tatanan ini ada yang berposisi sebagai *Tunggu Tubang* yaitu anak perempuan pertama yang diberi hak untuk mengelola warisan keluarga, untuk kesejahteraan keluarga. Saudara ibu *Tunggu Tubang* (kakak dan adek laki-laki *Tunggu Tubang* dari garis keturunan ibu) disebut *Meraje. Meraje* merupakan anak laki-laki dalam keluarga bertugas menggantikan posisi dari orang tua kelak jika mereka tidak ada. *Meraje* adalah kakak atau adek laki-laki dari ibu *Tunggu Tubang*, atau kakek *Tunggu Tubang* dari garis ibu. Tugas utamanya sebagai pembimbing dan pengayom *Anak Belai* dalam keluarga *Tunggu Tubang*. Kedudukan *Meraje* ini ibarat raja atau dirajakan, dan sangat dihormati. *Meraje* ini orang yang dihormati dalam keluarga sebab memiliki kedudukan yang dirajakan dan diistimewakan dalam keluarga. Posisi dan perannya yang strategis dikuatkan dengan kepercayaan bahwa apa saja yang disampaikan *Meraje* tidak boleh dibantah akan menimbulkan bencana bagi yang membantah (apalagi *Anak Belai*).

[35] Wawancara dengan Informan Puyang Amana tanggal 24 Juli 2023 di rumahnya desa Talang Jawa. Wawancara dilakukan bersama dengan keluarga yaitu anak-anaknya yang namanya Senau, Lini , Usnita, didampingi Kiki, Linda.

[36] Kekerabatan: Levy-Strauss (seorang antropolog) menyatakan bahwa kekerabatan dalam masyarakat dapat muncul karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan keturunan. (Nur Fathilah, 2007 :2) Sistem kekerabatan juga merupakan ikatan–ikatan kekerabatan yang berfungsi sebagai sarana untuk mengikat individu–individu tertentu kedalam kelompok–kelompok sosial, seperti keluarga. Kekerabatan pada Etnis Semende di Pulau Panggung adalah keluarga karena keturunan darah ditambah keluarga karena perkawinan. Kekerabatan berbeda dengan keluarga dalam etnis Semende yang terdiri gabungan semua keluarga kecil yang ada hubungan darah *(ekstended famili*).

> *Apabila Tunggu Tubang memiliki anak perempuan dan laki-laki maka anak perempuan pertama menjadi Tunggu Tubang dan anak laki-lakinya menjadi Muanai Tunggu Tubang atau calon Meraje atau Lautan. Lautan belum diberikan kewenangan sebagaimana Meraje namun Lautan bisa menjadi wali nikah (kawin) bagi kelawainya (kakak atau adik perempuan). Muanai Ibu Tunggu Tubang, dipanggil Meraje. Muanai Nenek Tunggu Tubang, disebut/dipanggil Jenang. Muanai Puyang Tunggu Tubang, disebut/dipanggil Puyang. Muanai Buyut Tunggu Tubang, disebut/dipanggil Lebu Meraje (Ratu). Muanai Lebu Tunggu Tubang, dipanggil Entah-entah. Puyang Meraje, yaitu kakak atau adik laki-laki dari Puyang Tunggu Tubang.* Puyang *Meraje* bertugas melindungi, mengasuh, dan mengatur jurai sesuai ajaran agama dan adat[37]

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa keluarga dalam versi etnis Semende adalah keluarga luas (*ekstended family*)[38]yang masih ada hubungan darah, ada juga keluarga kekerabatan. Konsep keluarga pada masyarakat Semende tidak hanya ibu, ayah, anak. Namun ibu-ayah-anak, serta keluarga lain yang masih ada hubungan darah dan perkawinan. Kekerabatan Etnis Semende di Pulau Panggung menurut Muhadi (2022) dimulai dari tiga Puyang yaitu Puyang Mutar Jagad. Puyang Depatik Bandung, dan Puyang Regik Dalom. Ketiga Puyang atau nenek moyang tersebut merupakan sesepuh yang pertama kali membuka hutan di Pulau Panggung. Lalu mereka hidup berkembang hingga sekarang. Sayang sekali, anyak yang sudah tidak mengenali *kepuyangan* ini. Struktur *kepuyangan* dari pertama kali etnis Semende berada di Pulau Panggung sudah banyak yang tidak mengenali. Hanya satu informan yang masih mengenalinya yaitu seorang *Meraje* dari cucu Puyang Mutar Jagad yang sekarang menjadi Puyang Hamdani Rene. Sedangkan Puyang Depatik Bandung dan Puyang Regik Dalom sudah tidak dikenali lagi.

Seorang Puyang yang bernama Amana yang tinggal di Talang Jawa menjelaskan:

> *Saat datang ke kecamatan ke Pulau Panggung masih kecil. Puyang Amana menceritakan bahwa orangtuanya dulu tinggal di Ulu Semong, daerah yang*

[37] Wawancara dengan Linda tanggal 12 Februari 2022 di rumah Linda, Jatimulyo.

[38] Keluarga luas (*extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak (baik yang sudah kawin atau belum), cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga. Keluarga Inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin, atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.

berada di Lampung Barat, selebihnya sudah tidak diketahui. Setelah itu mereka bermigrasi ke Pulau Panggung karena ada keluarganya yang tinggal di Pulau Panggung yaitu di desa Talang Jawa yang dahulu masih menjadi satu dengan desa Gunung Megang di wilayah hutan Tanjung Begelung. Seorang Meraje di desa Gunung Megang juga tidak mengenali ke tiga Puyang yang telah dijelaskan di atas[39]

Etnis Semende meyakini bahwa yang berada di Pulau Panggung satu keluarga besar (kerabat) dengan semua etnis Semende di luar Pulau Panggung. Tanpa mengetahui *kepuyanga*n mereka yakin kalau bersaudara. Bahkan,, menurut informan Septa[40], meski tidak di Pulau Panggung sepanjang satu etnis diyakini sebagai saudara. Sehingga ketika seorang Semende bertemu dengan seorang Semende secara tidak sengaja, spontanitas menjadi akrab sebagai satu keluarga atau kerabat. Setelah mengetahui bahwa mereka sesama etnis Semende, hubungan menjadi erat layaknya saudara dekat. Apabila sebelumnya urusan pekerjaan masih formal, namun setelah mengetahui bahwa mereka sesama etnis Semende maka urusan formal menjadi lebih mudah karena persoalan dapat diselesaikan secara tidak formal[41] .

Seorang informan Irsi Jaya menggambarkan kekeluargaan Etnis Semende seperti di bawah ini :

Kekeluargaan pada etnik Semende seperti jala/jale. Jala semacam alat untuk menangkap ikan. Jale terbuat dari benang yang kuat berkait-kait tidak terputus. Bila terputus akan diikat lagi dengan kuat agar tersambung lagi. Struktur jala ada tiga bagian yaitu pusat jala yang ada di tengah, daun jala yang menghubungkan ikatan satu dengan lainnya dan rantai jala yang paling luar yang disebut batu jala. Apabila ditarik maka jala terkumpul menjadi bentuk melingkar seperti cincin.

Jala bermakna persatuan keluarga atau jurai yang kuat silaturahminya. Secara philosofis lambang ini mengandung makna persatuan keluarga yang disebut jurai. Meraje sebagai komandan para jurai tidak boleh terpecah walaupun berada di perantauan tidak boleh putus silaturahmi apalagi terlantar.

Tunggu Tubanglah yang menjadi sentral (pusat) jalur silaturrami dari seluruh anggota keluarga besar, gantungkan harapan seluruh keluarga,

[39] Wawancara dengan Puyang Amana 24 Juli 2023
[40] ibid
[41] Wawancara dan diskusi bersama Septa, Haryanto, Toni di Metro tanggal 19 September 2022 di Cafe Satu.

penjaga utama, sehingga tidak ada seorang pun keluarga yang putus silaturrahim atau jatuh terlantar diprantauan. Itulah sebabnya ketika seorang Etnik Semende secara tidak sengaja bertemu dengan etik Semende lain di perantauan, maka hubungan kekeluargaannya muncul kembali. Tali silaturahmi terbangun kembali[42]

System sosial budaya etnis Semende diatur dalam hubungan-hubungan sosial kekerabatan sebagai berikut:

Gambar 3. Struktur Tunggu Tubang dan *Meraje*

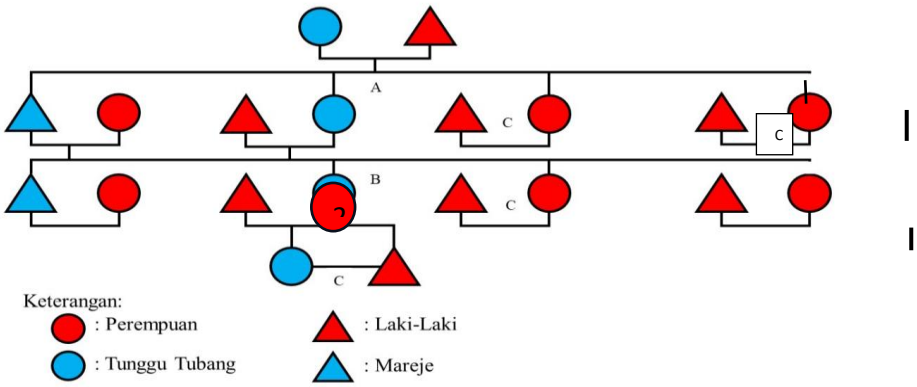

Sumber Data: wawancara 2023

Keterangan: Gambar segitiga berwarna biru paling kiri di jajaran horisontal A dan B adalah *Meraje*. *Meraje* adalah anak laki-laki paling tua. Di jajaran horisntal A terdapat segitiga berwarna merah itu adalah suami saudara perempuan *Meraje* (bulat merah). Ada yang disebut *Tunggu Tubang* yaitu anak perempuan pertama (bulat warna biru). Ada bulat warna merah yang lain (C) pada jajaran A dan B itu adalah adek-adek *Tunggu Tubang* yang disebut *Anak Belai*. Disebut juga *Anak Belai* pada semua laki-laki (C) dan adek-adeknya ketika mereka belum manikah.

Reza Pahlawan (2019) menuliskan tentang tradisi adat Semende. Dijelaskan bahwa:

Meraje adalah seorang laki-laki di Semende berkedudukan sebagai Meraje di rumah suku ibunya (kelawainye) dan menjadi rakyat di rumah isterinya sehingga dia Meraje dan juga rakyat. Kalau warga Tunggu Tubang (Adat Semende) telah turun temurun berjulat berjunjang tinggi, maka tingkat pemerintah (Jajaran Meraje) tersusun sebagai berikut yakni Muanai Tunggu Tubang, disebut Lautan (calon Meraje) belum memerintah, dan dapat menjadi wali nikah (kawin) bagi kelawainya (ayuk atau adik perempuan). Muanai Ibu Tunggu Tubang, disebut/dipanggil Meraje. Muanai Nenek Tunggu Tubang,

[42] Wawancara dengan Tokoh Adat Irsi Jaya di rumahnya Gunung Meraksa, tanggal 23 Juli 2022.

> *disebut/dipanggil Jenang. Muanai Puyang Tunggu Tubang, disebut/dipanggil Payung. Muanai Buyut Tunggu Tubang, disebut/dipanggil Lebu Meraje (Ratu). Muanai Lebu Tunggu Tubang, dipanggil Entah-entah.*

Apa yang dijelaskan Reza Pahlawan (2019) tersebut tidak semua ada di Pulau Panggung. Di Pulau Panggung tidak ada lagi Payung, Muana Buyut Tunggu Tubang atau Lebu *Meraje*, apalagi entah-entah. Keluarga yang ada di Pulau Panggung yang paling tua hanya di tingkatan nenek-kakek -ayah-anak.-cucu.

Meraje adalah semua kakak dan adik laki-laki dari ibu, berapapun banyaknya. Meskipun demikian, adat mengatur bahwa yang menjalankan tugas-tugas kepemimpinan diprioritaskan pada anak yang tertua, hingga yang paling muda diserahi kewenangan atau menggantikan yang tertua. Dengan pengecualian kalau yang tertua menyerahkan kepemimpinannya pada yang lebih yunior (Cahayo, 2022). Selanjutnya dijelaskan oleh Cahyono (2022):

> *Berdasarkan aturan dan tingkatan, kepemimpinan dan pengawasan ini mempunyai beberapa tingkatan-tingkatan sebagai oleh Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai. Tingkatan itu adalah ada pada Payung Meraje, Jenang Meraje dan Meraje. Payung Meraje adalah anak laki-laki tertua, berfungsi sebagai pengawas tertinggi terhadap Tunggu Tubang dan semua anggota jurai atau keluarga. Jenang Meraje itu anak laki-laki kedua, sebagai pengawas tingkat kedua, sedangkan Meraje itu laki-laki di keluarga yang paling kecil berfungsi sebagai pengawas langsung atau pengawas pelaksana tingkat pertama.*
>
> *Sebagai seorang pemimpin jurai, penting bagi Meraje memiliki karakter kepemimpinan yang dapat menjadi tauladan Anak Belai. Kalau Meraje di Rejang Lebong, karakter Meraje itu antara lain adil dan tidak berat sebelah, mengayomi Anak Belai dengan baik, harus sabar dan ulet, berwibawa dan bertindak tegas, bijaksana mengambil keputusan, tanggap dalam setiap permasalahan*

Selanjutnya Cahyono (2022) menjelaskan bahwa seorang *Meraje* memiliki hak-hak yaitu menetapkan *Tunggu Tubang*, memimpin musyawarah, menjadi juru bicara atau *besuar*e, dipatuhi perintahnya dan dijauhi larangannya. Meskipun adat telah mengatur bahwa *Tunggu Tubang* adalah anak perempuan pertama, tetapi keputusannya dilakukan melalui musyawarah semua anggota

jurai yang dipimpin oleh *Meraje.* Diperlukan musyawarah untuk menetapkan tunggu tubang dari anak perempuan yang ada. Di dalam musyawarah dijelaskan hak dan kewajiban *Tunggu Tubang*. Juga dijelaskan tentang kontrol *terhadap Tunggu Tubang* yang menjadi kewenangan *Meraje* dibantu *Jenang Jurai* dan *Afit Jurai*. Apabila *Tunggu Tubang* melakukan kesalahan dalam menjalankan aturan adat dan ajaran agama, maka menjadi hak *Meraje* untuk mengingatkan hingga memberikan sanksi pada *Tunggu Tubang*. *Meraje* memiliki hak untuk memberhentikan *Tunggu Tubang* juka melakukan kesalahan yang fatal. *Meraje* punya kewenangan menetapkan pengganti *TungguTtubang* yang telah diberhentikan. Dalam memimpin musyawarah, *Meraje* mengutamakan sikap saling menghormati pendapat, adil dan tidak otoriter. *Meraje* juga berwenang sebagai juru bicara, memimpin upacara adat pada perkawinan, menerima lamaran anggota *jurai,* menyelesaikan perselisihan, dan memimpin upacara apabila ada musibah. Sebagai pemimpin, *Meraje* dipatuhi perintahnya dan menjauhi setiap larangannya sepanjang bukan tidak bertentangan dengan aturan adat dan ajaran agama.

Tunggu Tubang adalah kedudukan untuk anak perempuan pertama di sebuah keluarga. Menurut (Velinda et al., 2017) *Tunggu Tubang* adalah jabatan untuk anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga. Jabatan itu sifatnya otomatis, turun termurun dan baru diberikan ketika anak perempuan tersebut telah berumah tangga. Dalam pembagian harta warisan *Tunggu Tubang* berhak sepenuhnya atas semua harta yang diwariskan oleh leluhur keluarga mereka. Harta warisan yang diberikan *Tunggu Tubang* berupa rumah dan sawah. Rumah tersebut menjadi tempat berkumpul keluarga besar walaupun keluarga migrasi atau merantau mereka tetap bisa pulang ke rumah wasiat tersebut. Sawah yang diwariskan dipergunakan untuk merawat orang tua dan *Anak Belai*. Harta warisan tidak boleh diperjualbelikan. *Tunggu Tubang* boleh diambil hasilnya untuk menjalankan kewajibannya yaitu merawat orang tua dan *Anak Belai* Selanjutnya Efrianto (2017) menjelaskan *Tunggu Tunggu* merupakan ciri khas adat semende yang membedakan dengan suku bangsa lain dari rumpun pasemah. Kehadiran seorang

tunggu tubang adalah sebuah keharusan sebab merekalah penjamin kelangsungan hidup dari sebuah kaum.

Jabatan seorang *Tunggu Tubang* tidak bersifat permanen atau langgeng, ada beberapa sebab seseorang *Tunggu Tubang* bisa diberhentikan atau dalam kehidupan masyarakat di Semende kejadian ini dikenal dengan nama disilirkan. Kejadian tersebut disebabkan:

a. Seorang *Tunggu Tubang* diberhentikan jika terjadi kasus umpamanya tunggu tubang tersebut tidak lagi bisa menuruti aturan adat yang ada maka boleh digeser atau digilirkan kepada adiknya atau saudaranya yang lain dan yang bersangkutan mau memberi tanda tangan atas penyerahan tersebut.
b. *Tunggu Tubang* yang *disilirkan* bisa juga karena yang bersangkutan tidak lagi tinggal dikampung tersebut misalnya berdomisili dan berusaha di luar daerah (kota) atau *Tunggu Tubang* itu sendiri bekerja diluar daerah dengan sendirinya dia tidak akan tinggal di rumah tersebut dan rumah itu akan dihuni oleh orang tuanya bersama saudara-saudaranya yang belum kawin.
c. *Tunggu Tubang* berakhir ketika sang *Tunggu tubang* telah keluar dari dalam rumah dan mendirikan *Tunggu Tubang* sendiri. . (Efrianto, 2017b).

Dalam realitasnya, peraturan tersebut banyak yang sudah tidak sesuai. Banyak Tunggu Tubang melanggar seperti menjual harta warisa, tidak tinggal di rumah pusaka tanpa memperoleh sanksi. Nilai-nilai Tunggu Tubang telah mengalami proses produksi dan reproduksi struktur seperti kalau bekerja di luar domisili sehingga tidak dapat merawat kedua orang tuanya, oleh adat hal itu ditolelir. Perempuan Tunggu Tubang menikah dengan etnis lain pun ditolelir sepanjang masih sesama orang Islam, pada akhirnya model pewarisan menggunakan standart Islam juga ditolelir.

Gambar 4. Payung Jurai *Meraje*

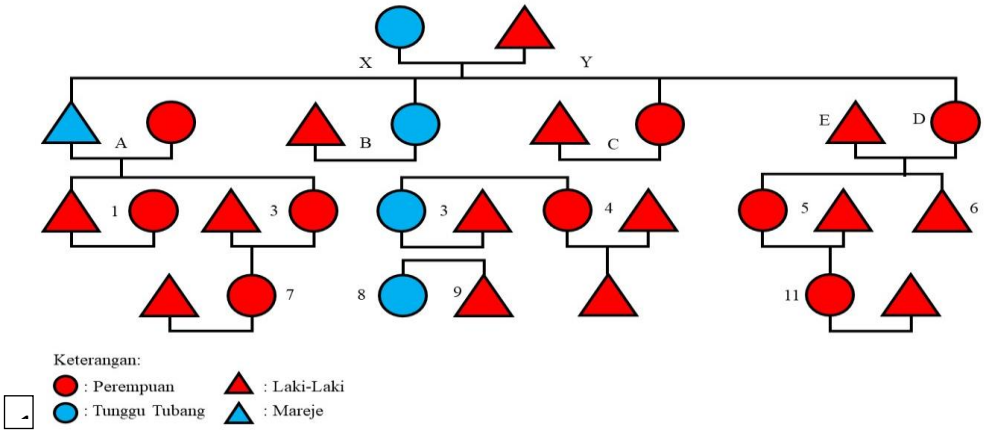

Sumber Data: Efriyanto, 2027

Keterangan
Jika nomor 8 adalah saya yang menjadi *Tunggu Tubang*. Nomor 3 adalah Ibu Tunggu Tubang. Sedangkan B biru adalah nenek *Tunggu Tubang*. Maka seluruh laki-laki nomor 1, 6, 7, 12 adalah calon *Meraje* atau *Jenang Jurai*. Segitiga Biru adalah *Meraje Tinggi* yaitu *apabila Meraje* ini telah menyerahkan kekuasaannya kepada laki-laki nomor 1 yang akhirnya menjadi *Meraje*.

Keseluruhan laki-laki dan perempuan yang satu darah di gambar di atas adalah keluarga besar. Keluarga besar ini akan menjadi semakin besar karena X dan Y sebagai kakek dan nenek itu mempunya kakak dan adek. Nenek (X) juga memiliki kakak dan adek. Jumlah keluarga kakek dan nenek (dalam Etnis Semende semua dipanggil nenek) tergantung pada reel yang dilahirkan. Kakak dan adek Nenek dan Kakek menikah dengan keluarga lain, sehingga separo tubuhnya ada hubungan darah dan separonya lagi tidak ada hubungan darah. Pada setiap titik individu di dalam keluarga, berkembang memiliki keluarga menyamping ke kiri dan ke kanan serta ke atas dan ke bawah. Jadi Jurai *Meraje* itu semua yang anggota keluarga dan kerabat. Secara vertikal dan horisontal.

2.8.3. Struktur Adat Etnis Semende

Penelitian yang dilakukan Muhammad Frengki (2020) menunjukkan bahwa di Desa Cahaya Alam, kabupaten Muara Enim, selain memiliki struktur organisasi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, juga memiliki Struktur Adat Etnis Semende yang dibuat dalam bentuk Serat Keputusan oleh Kepala Desa. Di dalam struktur adat Etnis Semende tersebut terdapat Ketua, Sekretaris, Bendahara

dan Anggota. Masing-masing posisi di dalam struktur tersebut terdapat peran-peran:

a) *Bepayung Jurai* atau *Payung Jurai* (penasehat atau para tetuah keluarga).
b) *BeMeraje atau Meraje* (Raja atau Anak laki-laki tertua).
c) *Bejenang Jurai* atau Jenang Jurai (Anggota keluarga).
d) *Tunggu Tubang* (Anak perempuan tertua).
e*) Anak Belai*

Struktur organisasi seperti yang ada di desa Cahaya Alam tersebut tidak terdapat di komunitas Etnis Semende di desa-desa kecamatan Pulau Panggung. Struktur adat Etnis Semende sebelum ada UU nomor 5 Tahun 1979 tentang masih ditemukan, tetapi setelah berlaku UU tersebut urusan kemasyarakatan menjadi kewenangan pemerintah desa (Kepala Desa). Salah satu urusan yang menjadi kewenangan Lembaga Adat Etnis Semende di Pulau Panggung adalah memberikan ijin membuka hutan atau mengeluarkan surat Pancung Alas. Namun setelah berlaku undang-undang pemerintah desa, kewenangan Pasirah semakin hilang seiring dengan menguatnya kepemimpinan kepala desa.

Struktur adat yang berlaku pada Etnis Semende di kecamatan Pulau Panggung meskipun tidak diberlakukan secara formal seperti di desa Cahaya Alam, tetapi secara tidak formal strukturnya ada. Sebagai ketua Lembaga Adat Etnis Semende adalah *Meraje*. Tidak ada lagi yang menjadi sekretaris dan Bendahara serta anggota. Jadi yang ada di dalam struktur adat tinggal *Meraje*, Tunggu Tubang, *Anak Belai*. Strukturnya makin sederhana karena urusan kemasyarakatan sudah menjadi urusan kepala desa. Urusan lembaga adat hanya mengurusi pewarisan, kelahiran, perkawinan, dan kematian serta konflik yang terjadi di keluarga. Apabila urusan keluarga tidak selesai di tingkat keluarga maka diselesaikan kepala desa. Pada saat ini struktur kekeluargaan yang ada pada etnis Semende di Pulau Panggung semakin pendek karena hanya ada kakek-nenek, ayah-ibu, dan anak-anak. Tidak adalagi sesepuh di dtas kakek-nenek.

4.10. Kehidupan Etnis Semende di Hutan Kemasyarakatan di Lampung

Kehidupan Etnis Semende sangat erat kaitannya dengan hutan untuk dijadikan sebagai kebun kopi. Wilayah yang ditempati Etnis Semende di Kecamatan Pulau Panggung hutan register 39 Pulau Panggung yang kondisinya rusak. Sebelum ada Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Indonesia, untuk pertama kali diselenggarakan HKm di Lampung pada 1998 dengan diterbitkannya SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 667/Kpts/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan. Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu dari 4 (empat) skema perhutanan sosial yang ada di Lampung. Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan kebijakan penyelesaian problem kerusakan hutan sekaligus penyelesaian problem ketergantungan masyarakat terhadap hutan untuk bertahan hidup. Hutan Kemasyarakatan di Lampung telah memberikan manfaat bagi 177 kelompok yang terdiri dari 60.679 kepala keluarga, dan luas pengelolaan 147.361,21 hektar. Provinsi Lampung dengan luas hutan sekitar 1.004.735 hektare telah diberi kewenangan oleh negara untuk mengelola hutan seluas 564 ribu hektare lebih yang terbagi menjadi tiga fungsi hutan yakni sebagai hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi.

Pada tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mencatat ada 262 gabungan kelompok tani hutan yang telah memanfaatkan perhutanan sosial di Provinsi Lampung dengan luas lahan 185.913 hektare. Pemanfaat perhutanan sosial oleh 262 gapoktan yang jumlah anggotanya 83.255 kepala keluarga meliputi perizinan memanfaatkan hutan kemasyarakatan sebanyak 183 izin, hutan tanaman rakyat 13 izin, hutan desa 22 izin, dan kemitraan kehutanan.

Hutan kemasyarakatan yang ada di kecamatan Pulau Panggung berada dalam pengelolaan KPHL Batu Tegi. KPHL Batu Tegi dibentuk berdasarkan SK Menhut Nomor: SK.650/Menhut-II/2010 tanggal 22 Nopember 2010 seluas 58.162 Ha. KPHL Batutegi terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sekampung yang mencakup 3 sungai utama yaitu Way Sekampung, Way Sangharus, dan Way Rilau. Luas DAS Sekampung lebih kurang 477.439 ha atau 4.774,39 km2. DAS Way Sekampung sangat penting karena berfungsi sebagai *cachtment area*

bendungan Batutegi. Bendungan ini untuk mengairi sawah-sawah di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro dan beberapa kabupaten lain yang totalnya lebih dari 66.533 hektar. Selain itu, menjadi pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 28 MW, untuk sumber air baku sebanyak 2.250 liter/detik.

Catatan Dedy Idwin (2022) terdapat 90.169 kepala keluarga yang memperoleh izin kelola perhutanan sosial di Provinsi Lampung. Total luas areal izin perhutanan sosial sejumlah 199.232,45 ha dengan jumlah izin sebanyak 332 izin. Dari 11 kelompok yang telah melakukan penanaman, baru 3 kelompok yang telah diverifikasi dan disepakati jumlah tanaman yang dimitrakan, selebihnya sedang tahap verifikasi jumlah tanaman bagi masing-masing petani.

Skema pembagian hasil panen antara petani dan KPH adalah 20-25 % untuk KPH dan 75-80 % untuk petani. Selain manfaat finansial, HKm bermanfaat mengurangi erosi dan meningkatkan kandungan air di dalam tanah, menjaga kesuburan tanah, dan sebagai bentuk penyelesaian konflik petani dengan negara, dan sumber bagi pendapatan asli daerah (PAD). Problem HKM di KPHL Batu Tegi menurut Informan Zulki [43]:

> *...hutan kawasan yang sudah gundul semua dan menjadi kebun kopi. Hanya ada sedikit pepohonan diantara tanaman kopi yang memang fungsinya sebagai pembayang. Apabila pohon-pohon ditanam terlalu rapat maka tanaman kopi tidak akan produktif. Problemnya adalah bahwa pengelolaan HKM Batu Tegi merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga pemerintah daerah dan legislatif tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol perkembangan HKM).*
>
> *Ketika ada kegiatan kunjungan Komisi 2 DPR RI ke Batu Tegi, hadir Mbak Nunik (maksudnya Chusnunia Wakil Gubernur Lampung) dan Komisi 2 yang diberikan kewenangan mengurusi kehutanan kaget ketika tahu hutan sudah gundul. Penuh tanaman kopi. Bahwa ada perjanjian dalam pengolaan hutan kemasyarakatan, namun dalam realitasnya petani menginginkan buah kopinya maksimal. Hal itu dilakukan dengan tidak banyak tanaman pembayang.*

[43] Wawancara dengan informan Zulki tanggal 25 September 2022 di rumahnya Gunung Meraksa

Meskipun demikian hasil penelitian Zeilika et al (2021) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel terhadap kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial petani HKm. Salah seorang informan Muhadi[44] yang menjadi ketua Gapoktan kampung Talang Jawa menjelaskan:

> *Pola pembagian lahan dilakukan dengan mempertimbangkan lahan yang pernah dibuka, dengan catatan ahan tersebut belum dipindahtangan ke patani yang lain. Apabila seperti itu maka yang bersangkutan tidak memperoleh luasan lahan HKM sebagaimana dulu dibuka. Pembagian lahan untuk HKM hanya diberikan kepada warga yang membuka lahan sebelum Orba, yang masih aktif dikelola tetapi pada masa Orde Baru dimasukkan ke dalam area hutan lindung. Oleh karena itu, pembagian lahan HKM tidak sama antara warga yang satu dengan lainnya. Hal ini berlaku untuk etnis Semende dan etnis lain. Problem yang masih ada hingga sekarang adalah belum semua ijin HKM nya keluar. Tetapi tidak ada hubungan antara petani HKM dengan pilihan calon. Jadi saya bantu pak Zulki itu untuk bantu-bantu mengumpulkan orang saja. Saudara-saudara beliau*.

Etnis Semende, hidup dalam lingkungan hutan kemasyarakatan yang kondisinya rusak. Mereka hidup dalam kemiskinan lingkungan, dan dituntut untuk melakukan pelestarian lingkungan dalam kondisi kemiskinan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, etnis Semende hidup dengan habitus berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan hidup.

[44] Wawancara dengan informan Muhaidi, tanggal 25 Agustus 2023 di rumahnya desa Talang Jawa bersama istrinya, didampingi Kiki, Linda

BAB VI
IMPLIKASI TEORITIK DAN TEMUAN-TEMUAN

6.1. Pendahuluan

Teori strukturasi Anthony Giddens menolak teori yang menyatakan bahwa struktur mengekang agen, dan agen mengendalikan struktur. Sehingg perebutan penguasaan tidak disebabkan struktur yang membuat agen tidak dapat dapat keluar dari kekangan struktur. Pada sisi yang lain, agen merupakan individu yang kuat yang berpengaruh pada struktur. Dua asumsi tersebut ditolak Antony Giddens, bahwa antara struktur dan agen bukan dualisme yang terpisah tetapi menyatu seperti dua sisi pada mata uang yang saling melengkapi sisi satu dengan sisi lain. Giddens mengakomodasi dua tradisi yang berbeda, yaitu tradisi fenomenologis dan tradisi fungsionalisme-struktural menjadi tradisi baru.

6.2. Temuan Penelitian

6.2.1. Perebutan penguasaan sumberdaya politik terbagi dalam perebutan nomor urut dan suara. Perebutan nomor urut menghasilkan temuan sebagai berikut:

a. **Keberuntungan *Meraje***

Seorang *Meraje* lebih beruntung bisa menjadi agen karena struktur adat memberinya kemudahan (*enabling*) untuk memiliki modal budaya, simbolis, dan sosial. dari struktur adat etnis Semende. Struktur tersebut berisi nilai-nilai yang memposisikan *Meraje* sebagai pengatur keluarga dan kerabat, yang harus dipatuhi anggota keluarga dan kerabat. Idealnya dengan posisi perempuan sebagai Tunggu Tubang, perempuan diposisikan sebagai pemimpin di dalam keluarga. Namun Struktur memaksa perempuan berada di ranah domestik itu menjadi calon. Struktur juga membuat perempuan yang idealnya menjadi pengelola harta keluarga itu aktif tetapi realitasnya karena dibebani kewajiban yang disertai sanksi apabila melanggar maka perempuan cenderung pasif, penurut, takut punya ide, takut memimpin,

bahkan takut duduk di depan karena kursi depan biasa untuk laki-laki. Jadi untuk menduduki posisi dan berperan maka perlu dipaksa. Dalam hal ini perempuan merasa biasa berada ruang domestik atau berada di dalam dimensi tidak sadar berada di ruang domestik.

Hal ini disebabkan oleh struktur yang mengekang *(constraining*). Kekangan ini membuat perempuan sulit untuk melakukan reproduksi dan produksi struktur yang *enabling* bagi perempuan. Struktur yang mengekang perempuan menyulitkan perempuan untuk memiliki modal sosial, ekonomi, simbolis, budaya. Menurut Giddens, atruktur Etnis Semende tidak memberikan ruang pada perempuan etnis Semende untuk berpolitik (menghalangi/*constraining*) walau tidak ada larangan. Perempuan yang posisinya sebagai *Anak Belai* itu dibuat menjadi individu yang ada di dalam dimensi ketidaksadaran atau menganggap yang diatur secara adat adalah yang ”*given*”, yang terbaik dan tidak perlu ada perubahan. Walaupun realitas ada perubahan yang seperti dalam pewarisan, mobilitas pekerjaan, perkawinan, sehingga membuat Tunggu Tubang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Perubahan ini direspon dengan praktek-praktek sosial berupa inovasi-inovasi dalam ruang, waktu, sehingga pelaksanaan kewajiban tidak secara rutin, langsung, namun secara substansial secara adat praktek-praktek sosial tersebut tidak mengubah substansi struktus adat Etnis Semende.

Keberadaan perempuan sebagai calon bukan karena kemauan calon (dimensi tidak sadar) bukan karena faktor struktur sosial. Tetapi karena struktur politik yang mengharuskan partai politik menyertakan perempuan di dalam pencalonan minimal 30% dengan pola setiap tiga calon wajib ada satu calon perempuan. Apabila pencalonannya tidak memenuhi syarat tersebut, maka parpol tersebut akan dicoret sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Struktur formal memberdayakan perempuan secara formal, tetapi struktur adat memposisikan perempuan di dimensi tidak sadar. Realitas bahwa tidak mudah memperoleh perenpuan sebagai calon, sehingga perlu berstrategi mencalonkan *Anak Belai* merupakan bukti bahwa perempuan masih terkekang oleh struktur dalam politik yang menempatkannya di dimensi ketidaksadaran (*unconscious motives).*

Dampak ketertinggalan perempuan dalam politik dapat dilihat pada kondisi fasilitas untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan Keluarga Berencana, yang terbatas (sebagaimana telah dijelaskan pada gambaran umum daerah penelitian). Hal tersebut membatasi aksesibilitas perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan yang tinggi; membatasi aksesibilitas kesehatan yang lebih baik. Hal ini disebabkan fokus para anggota DPRD masih pada infrastruktur jalan, jembatan, yang dinilai lebih utama untuk meningkatkan perekonomian terutama untuk menjual kopi dan hasil pertanian, serta perkebunan lain. Rendahnya aksesibilitas pada pendidikan, mengakibatkan keterbatasan wawasan berfikir laki-laki dan perempuan bahwa perempuanpun penting terlibat dalam pengambilan keputusan di semua ranah, termasuk dalam politik.

b. Struktur *Enabling* Bagi Laki-Laki, *Constraining* Bagi Perempuan

Struktur pada Etnis Semende lebih *enabling* bagi laki-laki untuk berpolitik. Secara terus menerus laki-laki dimotivasi sebagai yang pantas berpolitik (*unconscious motives*). Dalam perkembangannya laki-laki lebih memiliki kesadaran praktis karena secara terus menerus melakukan praktek sosial atas berbagai persoalan yang harus diselesaikan (*practical consciousness*), dan cenderung menjadi memiliki kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) untuk transmutasi struktur, dan memproduksi-reproduksi struktur. Laki-laki Etnis Semende diberikan posisi sebagai pelaku tindakan dalam struktur untuk melakukan fungsi kontrol pada perempuan dan kelembagaan.

Kesadaran laki-laki terhadap lingkunganya lebih kuat dari pada perempuan. Hal ini tidak lepas dari kuatnya pengaruh struktur adat Semende yang menempatkan laki-laki sebagai pelindung, pengambil keputusan dan memberikan sanksi. Kesadaran atas struktur ini berkontribusi pada terbentuknya laki-laki sebagai agen yang sadar akan lingkungannya. Sedangkan perempuan diatur oleh struktur mengekang perempuan sebagai agen dalam merespon lingkungan karena struktur etnis Semende tidak memberikan fungsi kontrol pada perempuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur *enabling* atau *constraining* tergantung pada bagaimana

struktur dan agen berrelasi secara dialektik atau timbal balik dalam jangka panjang tanpa henti (Giddens,1984 dalam Hidayat, 2000:440).

6.2.2. Temuan Tentang Kontribusi Lembaga Adat dan Kekerabatan Pada Pencalonan

a. Adaptasi Struktur Adat

Proses adaptasi dilakukan melalui reproduksi struktur adat oleh para agensi yaitu tokoh-tokoh adat yang berkepentingan dalam pencalonan. Dominasi struktur nasional yang sifatnya koersif memaksa para agensi melakukan reproduksi struktur dengan memanfaatkan *Anak Belai*. Posisi *Anak Belai* dalam adat Semende membuatnya menerima ketika diminta sebagai calon, sehingga kepentingan para calon terpenuhi, dan tidak melanggar struktur nasional. Proses reproduksi tersebut ini merupakan proses adaptasi struktur baru tetapi tidak meninggalkan struktur adat Etnis Semende.

b. Praktek Produksi dan Reproduksi Struktur Yang Setara Dalam Pencalonan

Praktek produksi dan reproduksi dalam pencalonan dilakukan *Meraje* sebagai "agensi", merupakan aktivitas rutinitas pada setiap pemilu. Aktivitas ini berbeda dengan aktivitas *Meraje* pada perkawinan, sunatan, atau aktivitas lain dalam keseharian yang dilakukan secara terus menerus. Termasuk penyesuaian-penyesuaian tradisi Tunggu Tubang karena perubahan mobilitas pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan. Rutinitas yang dipraktekkan dalam pemilu ini bukan rutinitas sebagaimana interaksi antar anggota keluarga. Rutinitas dalam pemilu hanya terjadi dalam skala 5 tahunan. Meskipun demikian telah merubah ketidakbiasaan perempuan dalam politik menjadi biasa. Pada tahun 2014 sudah ada perempuan yang menjadi calon bahkan ada yang terpilih, tahun 2019 tidak ada yang terpilih, tahun 2024 ada yang terpilih.

Keterpilihan seorang perembuan *Anak Belai* tersebut menunjukkan bahwa struktur bukan kekangan (*constrained*) tetapi sebagai kekangan (*constraining*). Untuk produksi struktur yang *enabling* bagi perempuan selain menggunakan regulasi

affirmatif action 30%, juga diperlukan dorongan agar struktur Etnis Semende memiliki nilai-nilai untuk membangun kesadaran diskursif (*discursive consciousness)* pada perempuan dan laki-laki.

c. In Group Terpecah

Di internal partai PKB, para calon bergabung untuk berkontestasi memperebutkan sumberdaya politik menghadapi partai yang lain, dan untuk memperebutkan kursi di internal partai politik. Dari 8 calon yang ada, terdapat 2 (dua) grup kecil. Dua grup itu terbentuk atas dasar hubungan keluargaan sebagai upaya memperkuat kemenangan politik keluarga.

Perempuan direkrut menjadi calon dari keluarga laki-laki yang mencalonkan. Perempuan calon direkrut dari keluarganya untuk memperkuat pencalonannya, dalam menghadapi calon dari keluarga yang lain. Perekrutan dari keluarga sendiri ditujukan untuk mengurangi persaingan diinternal keluarga. Pilihan terhadap *Anak Belai* dilakukan untuk mengurangi persaingan calon laki-laki. Para calon yang laki-laki membentuk grup kecil yang bertujuan untuk kerjasama mencari suara. Dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang, dan kelompok kecil lain yang terdiri dari 5 orang. Kelompk kecil ini memperlihatkan adanya struktur dimana laki-laki memiliki kemampuan produksi dan reproduksi struktur, dan yang perempuan pasif menunggu perintah. Di dalam grup kecil tidak muncul kompetisi, kontravensi dan konflik. Juga tidak muncul kerjasama. Grup kecil hanya sekumpulan orang yang tidak pernah berkumpul membicarakan tujuan yang jelas sebagai langkah awal untuk terjadinya kerjasama. Anehnya grup kecil ini seolah bersekat dengan grup yang lain, mereka tidak berkomunikasi.

6.2.3.Kontribusi Lembaga Adat Dalam Pemenangan

a. Berebut Tanpa Konflik Manifest

Struktur adat etnis Semende mengedepankan kekeluargaan, anehnya di dalam struktur adat etnis Semende terdapat hubungan-hubungan sosial yang tidak dalam

keseimbangan antara laki-laki dan perempuan,. Di dalam praktek politik ditemukan sedikit relasi persaingan, kontravensi dan konflik yang tersembunyi. Relasi antara laki-laki dan perempuan pada Etnis Semende yang secara sosial tidak seimbang, tidak seperti yang dinyatakan Foucault bahwa di setiap relasi selalu ada kekuasaan. Apa yang terjadi pada etnis Semende seperti yang dinyatakan Cohen (1974) bahwa etnisitas merupakan instrument yang bersumber dari struktur kebudayaan dan kekerabatan. Struktur tersebut fungsional bagi aktor politik dalam rangka meraih kekuasaan. Etnisitas fungsional bagi pemenangan (dalam Muhammad et al., 2022).

Dalam versi Bourdieu (1983), struktur adalah habitus yang merupakan struktur kognisi atau pengetahuan yang ada di masyarakat yang menjadi pedoman perilaku masyarakat yang ada di situ. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Interaksi antara habitus dengan arena tersebut menghasilkan perilaku yang khas. Habitus merupakan proses dialektika antara struktur yang membentuk dan yang dibentuk (Ritzer & Stepnisky, 2019) atau sebagai proses internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi internalitas. Habitus bukan nilai-nilai yang tiba-tiba, tetapi hasil rekaman sejarah yang ada pada individu dalam kesadaran aktor. Bourdeau kemudian mengatakan bahwa untuk meraih kekuasaan perlu modal. Tetapi bourdeau tidak pernah mengatakan bagaimana kekuasaan itu menghambat atau memberdayakan.

Pertentangan antara pendekatan struktural dengan agen dibahas di dalam teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Teori ini menjelaskan fenomena perebutan sumberdaya politik perempuan yang berada dalam konstruksi budaya matrilineal suku Semende di Ogan Komering Ulu Selatan memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku sosial perempuan Semende namun tidak memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku politiknya. Hasil penelitian menunjukkan adat matrilineal pada masyarakat Semende tidak menciptakan perempuan elite menjadi poros kekuasaan pada lingkungan yang lebih luas (Alip, 2018). Hal ini berbeda dengan penelitian di budaya matrilineal Minang, yang memberikan kontribusi bagi partisipasi perempuan Minang karena memiliki modal sosial dengan stakeholder adat. Dalam

hal ini budaya matrilineal bukanlah budaya yang menghambat perempuan (Pandiangan, 2017).

Sebaliknya, laki-laki Etnis Semende aktif secara sosial dan politik melakukan upaya pemenangan dengan mengumpulkan keluarganya, menyampaikan niat mencalonkan dan meminta dukungan keluarga. Adat etnis Semende selalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan atas persoalan-persoalan yang terjadi. Musyawarah dilakukan oleh Payung Jurai, *Meraje*, dan *Anak Belai* yang akan mencalonkan. Payung Jurai memimpin rapat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dikumpulkannya keluarga oleh Tunggu Tubang. Rapat tentang kampanye diagendakan Tunggu Tubang, disiapkan makan minum dan uang saku oleh Tunggu Tubang untuk saudara-saudaranya yang diundang, walaupun uangnya dari calon. Ini yang disebut politik uang menggunakan media primordialisme.

Praktek sosial yang dilakukan kandidat dan Tim sukses yang bukan dari keluarga merupakan proses produksi struktur baru untuk mereproduksi struktur adat yang menekankan dukungan pemenangan itu dari keluarga besar. Meskipun kandidat sebagai agen berusaha memproduksi struktur baru melalui musyawarah Lembaga adat, dilakukan di rumah pusaka, mengundang Tunggu Tubang, musyawarah dipimpin *Meraje* dan Payung Jurai. Dalam pertemuan itu dibagikan bingkisan juga merupakan kebiasaan *Tunggu Tubang* sehingga dianggap bukan politik uang. Tetapi konteks membagikan bingkisan dan uang dilakukan pada saat pemilu, ada yang tidak dinilai sebagai bentuk *money politic*, walaupun ada yang mengatakan sebagai money politic. Pihak Bawaslu tidak menilai sebagai money politik karena tidak menemukan alat peraga kampanye, dan tidak ada permintaan untuk memilih calon. Upaya untuk mereproduksi struktur direspon agen dengan tidak memilih calon yang memang bukan keluarga. Mereka tetap memberikan pilihan pada calon yang telah ditetapkan oleh keluarga untuk dipilih.

b. Mempedomani Budaya

Budaya menjadi pedoman bagi kandidat dan masyarakat dalam memilih kandidat. Meskipun sebagian kandidat menggunakan politik uang karena meyakini

berkontribusi dalam pemenangan. Tetapi pola-pola pemenangan calon didasarkan atas hubungan-hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu meskipun uang dan barang banyak dibagikan oleh calon-calon anggota legislatif, tetapi memilih calon tidak didasarkan karena politik uang.

Penelitian ini berbeda dengan dengan penelitian Aspinall & Berenschot (2019) yang hasilnya menunjukkan bahwa patronase dan klientelisme merupakan kunci kemenangan calon. Pembelian suara ini menurut Aspinall dan Sukmajati (2015), merupakan bagian patronase tetapi yang diberikan sebelum pemilihan. Bagian lain dari patronase adalah *pork barrel projects, club goods* dan gifts yang diberikan setelah pemilihan. Konsep partonase oleh Aspinall dan Sukmajati (2015) merupakan "uang atau barang atau keuntungan yang diperoleh politisi karena terpilih sebagai pejabat, yang sebagiannya dibagikan kepada pemilih atau pendukungnya. Keburukan dari patronase adalah tidak terbangunnya sebuah kontestasi berdasarkan gagasan atau tawaran program. Keburukan lainnya adalah pejabat yang terpilih tidak merasa memiliki ikatan bahwa dirinya dipilih atas dasar "kontrak sosial" dengan pemilihnya sehingga ada beban politik baginya sebagai fungsi representasi. Aspinal dan Barenschot mendasarkan perebutan sumberdaya politik dengan politik uang. Bagi Etnis Semende, sumberdaya politik adalah keluarga. Uang bukan sumberdaya politik bagi calon yang dari keluarga keluarga, tetapi menjadi sumberdaya politik bagi yang bukan keluarga. Dalam hal ini dikatakan money politik adalah pemberian uang pada pemilih yang bukan keluarga, untuk ditukar dengan suara kepada yang memberi uang. Uang merupakan determinan orang dalam memilih.

Berbeda dengan penelitian Aspinal dan Barenshot, penelitian ini mendasarkan pada struktur dan agen dalam melakukan praktek sosial. Ternyata pada Etnis Semende, pemberian uang atau barang oleh calon tidak memberikan akibat sama seperti penelitian Aspinal dan Barenchot. Struktur adat Etnis Semende memberikan kontribusi pada pemenangan. Pembelian suara dilakukan melalui distribusi uang atau barang dari calon pada pemilih beberapa hari sebelum pemilihan, seringkali

disebut sebagai "serangan fajar[115]" (Aspinall dan Sukmajati, 2015). Pembelian suara juga melalui program-program patronase, serta dalam relasi patron klien, dan klientelisma. Pada Etnis Semende, uang diberikan kepada keluarga, bukan perorangan. Pemberian uang dari calon ke bukan keluarga dilakukan calon untuk meraih dukungan dari mereka sepanjang tidak ada calon dari keluarga tersebut. Ketentuan ini, dapat dikatakan sebagai kearifan tradisional Etnis Semende yang selama ini belum pernah diungkap di publik. Ketentuan ini menjadi salah satu yang membuat perebutan penguasaan sumberdaya politik pada Etnis Semende tidak mengakibatkan konflik yang terbuka.

Agen berusaha menduplikasi *vote buying* terutama pada pemilu 2014 dan 2019 yaitu setelah system pemilu mulai berganti menjadi proporsional terbuka. System ini mengatur bagi calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai yang terpilih. Sistem ini memberikan semangat pada etnis Semende untuk mencalonkan. *Vote buying* direspon etnis Semende tidak seperti yang dijelaskan Aspinal dan Sukmajati (2015). Ternyata *vote buying* yang dilakukan oleh banyak calon (terutama laki-laki) Etnik Semende direspon berbeda seperti dalam penelitian Aspinal dan Sukmajati (2015). Pada awalnya banyak kandidat yang berfikir tentang modal dalam perebutan sumberdaya politik yaitu keluarga dan uang. Namun modal keluarga justru merupakan kekuatan yang mampu mengeliminir modal

[115] Serangan fajar adalah Serangan Fajar adalah sebuah praktik yang dilakukan oleh banyak calon pemimpin untuk memenangkan hati serta suara rakyat dengan memberikan mereka uang bahkan sembako (Haryanto, 2020). Praktik fenomena "serangan fajar" tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya berdasarkan pada kebebasan berpendapat dan memilih secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun (Liata & Fazal, 2021). "Serangan Fajar" merupakan istilah populer dari politik uang. Berdasarkan Pasal 515 dan Pasal 523 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 187 A ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa bentuk serangan fajar tidak terbatas pada uang. Namun, juga dalam bentuk lain seperti paket sembako, voucher pulsa, voucher bensin, atau bentuk fasilitas lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di luar ketentuan bahan kampanye yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 dan 6 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018. Aturan mengenai bahan kampanye yang diperbolehkan oleh KPU dan bukan termasuk dalam serangan fajar dijelaskan secara rinci pada Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi: *Bahan kampanye dalam bentuk selebaran/flyer, brosur/leaflet, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan atau alat tulis.* Adapun pada ayat 6 yang berbunyi: *Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000 (*
https://aclc.kpk.go.id/hajarseranganfajar).

uang.Bagaimanapun, uang penting untuk mobilisasi massa meskipun bukan penentu keterpilihan.

Tentang fenomena uang sebagai modal keterpilihan telah membuat calon-calon perempuan tidak mampu berbuat apa-apa pada saat kampanye. Meskipun perempuam-perempuan calon juga memahami kalau keluarga merupakan modal keterpilihan, tetapi modal tersebut perlu digerakkan atau dimobilisasi keluarga. Karena tidak ada modal, calon apatis dapat memenangkan perebutan penguasaan sumberdaya politik tanpa melalukan *money politic*[116] atau *vote buying*[117]. Tanpa uang, perempuan-perempuan tidak kampanye meskipun d*oor to door*[118] karena alasan tidak punya uang untuk membeli oleh-oleh bagi keluarganya, tidak memasang alat peraga kampanye, tidak ikut kampanye bersama, bahkan ada yang pada hari H tidak hadir ke TPS dimana dia harus memberikan suaranya. Memang dari awal keterlibatan perempuan dalam pencalonan perempuan bukan kemauan perempuan, tetapi permintaan *Meraje* yang tidak boleh ditolak. Perempuan Etnis Semende, berada dalam kekuasaan *Meraje*. Kekuasaan itu mengekangnya (*constraining*). Sehingga menjadi tidak heran kalau perempuan tidak merasa bangga menjadi calon, tetapi biasa saja, malu, apatis . Bila perempuan tidak mencalonkan karena ketidaksadarannya (given), perempuan mencalonkan juga bukan karena kesadaran kritis tetapi karena ketidakmampuannya menolak kebutuhan *Meraje*. Bagi perempuan yang berposisi sebagai *Anak Belai*, diminta

[116] Money politic adalah **Politik uang** atau **politik perut** (bahasa Inggris: ***Money politics***) adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.[1] Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan (https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang).

[117] Voter buying dipahami sebagai distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari kandiidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.

[118] Kampanye door to door merupakan strategi untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas calon kepala daerah dengan melakukan kampanye secara langsung dari rumah ke rumah melalui relawan. ploaded by(Yusrizal Ar Dumai , 2016).

saudara laki-lakinya yang berposisi sebagai Payung Jurai atau *Meraje* untuk mencalonkan, tidak dapat ditolaknya. Tidak ada pilihan lain untuk tidak menolak karena system sosialnya demikian (*given*).

Selama ini, penelitian tentang kegagalan perempuan sebagai anggota legislatif disebabkan budaya patriarkhi. Teoritisi rasionalitas seperti Weber mengatakan penyebab ketertinggalan perempuan dalam politik disebabkan aspek rasionalitas atau kondisi yang ada di dalam internal perempuan. Tetapi penelitian ini menunjukkan kegagalan perempuan dalam perebutan penguasaan sumberdaya politik disebabkan struktur Etnis Semende yang dianggap sebagai kearifan tradisional. Sehingga perempuan menerimanya sebagai kebaikan. Oleh karena itu perempuan turut menjadi bagian yang melanggengkannya secara terus menerus dari hari ke hari. Nilai-nilai yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki diproduksi setiap hari dan direproduksi tanpa ada perubahan.

Struktur adat Etnis Semen tidak melarang perempuan berpolitik, tetapi tidak mudah bagi perempuan untuk terlibat di dalam politik. Setelah ada kebijakan *affirmative action,* jumlah perempuan Etnis Semende yang menjadi calon mencapai 30% semuanya dari kalangan *Anak Belai*. Namun keberadaan perempuan tersebut untuk memenuhi formalitas pemilu.

Pilihan *Anak Belai* sebagai calon anggota legislatif dimaksudkan untuk memudahkan *Meraje* dalam memperoleh calon perempuan. Sebagaimana diketahui *Anak Belai* jumlahnya lebih banyak dan secara usia lebih muda dari Tunggu Tubang. *Anak Belai* adalah perempuan-perempuan yang tergantung hidupnya pada pihak Tunggu Tubang dan *Meraje*. Problem ketergantungan perempuan Etnis Semende tidak berhenti karena sudah menikah. Perkawinan dengan Tunggu Tubang dengan laki-laki yang budayanya patriarkhinya justru membuat perempuan semakin tergantung. Pengaruh budaya patriark mengubah pola pewarisan, yang berarti semakin kecilnya warisan yang diperoleh perempuan. Pola warisan model Jawa itu membagi warisan merata ke semua anak-anaknya. D Jawa, pola pewarisan

berdampak pada munculnya fenomena *shared of poverty*[119] atau dinamakan Tepang Bangkang dalam Adat Semende.[120]

Meskipun terdapat kasus-kasus Tepang Bangkang, kohesivitas sosial Etnis Semende tetap bertahan. Bahkan masyarakat tetap memberikan dukungan pada saudaranya yang menjadi calon. Masyarakat tidak melakukan kontravensi dan kampanye hitam. Kampanye hitam itu tidak muncul dari calon satu ke calon yang lain tetapi dari masyarakat ke calon. Bagi etnis Semende, mengungkap kejelekan keluarga merupakan hal yang tabu untuk diungkapkan, pun tidak menguntungkan secara politik. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa struktr Etnis Semende sangat kuat dalam menjaga hubungan-hubungan kekeluargaan. Seperti hasil penelitian Woolcock (1998) bahwa kohesi sosial merupakan modal sosial yang ada dalam komunitas. Artinya, ada proses antar agen yang membangun jejaring, norma-norma, dan sosial *trust*, untuk memperlancar koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Nilai-nilai dan norma yang berlaku, seperti dijelaskan Lang & Hornburg (1998), merupakan modal sosial saling percaya di dalam masyarakat (*stocks of sosial trust*). Nilai-nilai, norma-norma, dan jejaring yang ada dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Pada Etnis Semende, rasa saling percaya itu ada di ranah keluarga.

c. Kompetisi, Kontravensi, Konflik

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan dalam perebutan penguasaan sumberdaya politik di internal PKB. Anthony Giddens menjelaskan perbedaan tersebut terjadi karena struktur bisa bermata dua antara *constraining* atau *enabling. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa struktur enabling bagi laki-laki tetapi constraining pada perempuan.*.

Struktur Adat Etnis Semende *enabling* bagi laki-laki sehingga memiliki peluang memproduksi dan mereproduksi struktur seperti aktif berorganisasi, mengajak perempuan, mengatur, memutuskan. Sedangkan struktur *constraining* bagi perempuan yaitu perempuan mengikuti, patuh perintah laki-laki, pasif, dilindungi, melayani. Struktur Etnis Semende yang membedakan peran-peran laki-laki dan

[119] Berbagi kemiskinan
[120] Tepang Bangkang itu Perempuan Tunggu Tubang tidak lagi memperoleh warisan.

perempuan bukan didasarkan distribusi secara seksual tetapi hasil produksi dan reproduksi struktur dan agen. Struktur yang menempatkan laki-laki sebagai kontrol pada perempuan, mereproduksi nilai-nilai kepatuhan perempuan secara sosial menjadi kepatuhan dalam politik. Perempuan yang secara struktur dikontrol laki-laki tidak memproduksi dan mereproduksi struktur kecuali menerima yang dikehendaki laki-laki (agen).

Ada perempuan yang berada dalam dimensi *constraining* rendah, yaitu perempuan yang sumberdaya pribadinya tinggi. Ada laki-laki yang *enabling* rendah karena sumberdaya pribadinya rendah. Dalam politik, perempuan yang ada di dimensi *constraining* tinggi dan laki-laki yang berada di *enabling* rendah akan mengalami kesulitan untuk memenangkan perebutan sumberdaya politik. Merekalah laki-laki yang dari keluarga memiliki calon lebih dari satu, dan merekalah perempuan yang dari keluarganya tidak ada calon lain.

Perempuan yang berada dalam dimensi *constraining* tinggi akan mengalami ketidakseimbangan tinggi ketika berkompetisi dengan laki-laki yang berada dalam dimensi *enabling* tinggi. Dalam hal ini laki-laki akan sangat produktif melakukan reproduksi struktur berhadapan dengan perempuan yang tidak mampu mereproduksi dan memproduksi struktur. Pada Etnis Semende, struktur sangat kuat sehingga laki-laki dalam dimensi *enabling* tinggi tidak dapat melakukan produksi dan reproduksi sebagaimana kepentingannya. Struktur membatasi produksi nilai-nilai melebihi ketentuan struktur yaitu nilai-nilai politik yang mengakibatkan konflik, dan politik bukan untuk pribadi tetapi untuk keluarga.

Pada Etnis Semende, calon- calon yang memiliki sumberdaya pribadi tinggi berkompetisi untuk mencapai tujuan pribadi kolektif yaitu perolehan suara sebanyak-banyaknya bagi dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Oleh karena itu meskipun struktur cenderung mengekang perempuan tetapi perempuan dapat memenangi perebutan penguasaan sumberdaya politik. Kondisi itu terjadi ketika perempuan tidak berkompesisi dengan laki-laki dalam satu keluarga, didukung

kemampuan perempuan yang memiliki modal dan sumberdaya pribadi yang tinggi.

d. Patronase, Klientelisme, Primordialisme

Kandidat incumben cenderung menggunakan patronase dalam bentuk *pork barrel.* Indikasi paling kuat adalah pembangunan jalan di desa kelahirannya atau desa yang banyak pemilihnya. Pada pemilu 2019, calon melakukan berbagai upaya untuk meraih kemenangan melalui strategi *pork barrel*. Jaringan primordial dimanfaatkan para *incumbent* untuk memudahkan distribusi uang, bingkisan, membangun jalan, jembatan, masjid, mushola, membagikan bibit ikan, bibit tanaman, yang anggarannya dari pemerintah dan bukan dari kantong anggota legislatif. Jaringan ini memanfaatkan klientelisme dan patronase yang akan menjadi modal sosial yang penting untuk keterpilihan calon pada pemilu selanjutnya. Hal ini tampak pada semakin bertambahnya tim yang mengelilingi seorang anggota legislatif, yang tergantung (*dependen*) pada anggota legislatif tersebut. Tim tersebut diambil dari mereka yang pada saat pemilu menjadi tim pemenangan. Sepanjang tim pemenangan telah direkrut menjadi dalam kerja-kerja legislator, maka mereka setia pada patronnya. Namun ketika sebaliknya, termasuk ingkar janji maka maka kesetiaan terdegradasi. Dalam hal ini, tim kerja legislator juga melakukan fungsi penyaluran dan menyaring informasi, membatasi informasi untuk keamanan legislator pada pemilu yang akan datang. Tim kerja merupakan “loyalis” yang terbangun karena telah membantu calon sebagai tim pemenangan dan mereka memperoleh pekerjaan. Mereka berada dalam *in group* yang kohesivitasnya dijaga.

Para calon baru (*the new candidate*) bersaing memperebutkan sumberdaya politik menggunakan jaringan primordial namun tanpa patronase dan *money politik*. Idealnya, para calon yang berasal dari Payung Jurai dan *Meraje* cukup menggunakan modal sosial primordial dalam perebutan penguasaan sumberdaya politik. Sebagaimana dinyatakan Lang & Hornburg (1998) bahwa persediaan modal sosial bermanfaat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Namun hasil penelitian menunjukkan para calon harus menambahkan modal sosial dengan

modal ekonomi yaitu *money politic* dan patronase atau klientelisme. Ternyata, penyebabnya adalah menurunnya *stock of social trust* berupa pelanggaran adat. Pelanggaran ini berakibat pada munculnya *distrust* pada calon. Perempuan-perempuan etnis Semende mulai banyak tidak percaya pada calon laki-laki yang telah mengambil hak *Tunggu Tubang*, dan mengingkari janji. Mereka juga tidak percaya pada calon perempuan yang pernah dipilih namun karena mengingkari janji maka masyarakat tidak memilihnya lagi.

Bentuk-bentuk klientelisme dilakukan para calon baik yang *incumben*t maupun bukan. Para calon memberikan bingkisan untuk keluarga, dan ada yang tidak. Bahkan ada yang memberikan bingkisan kepada bukan keluarganya. Calon-calon perempuan relatif tidak memberikan bingkisan ke keluarganya dan kegiatan-kegiatan lain. Aktivitas incumben dalam sosialisasi dan kegiatan lainnya mengundang kepala desa, tokoh masyarakat, kyai, tokoh pemuda, para simpatisan partai politik PKB, perempuan yang aktif di desa. Kegiatan dilakukan di desa-desa yang menjadi kantong suara. Meskipun kegiatan sosialisasi, tetapi seringkali diselipkan diskusi tentang kondisi di masyarakat yang perlu diperbaiki seperti jalan, jembatan, masjid, sekolahan. Kegiatan seperti ini menjadi kekuatan *incumbent* untuk mempertahankan suara yang diperoleh pada pemilu sebelumnya dan pemilu tahun 2019. Aktivitas tersebut oleh Edward Aspinall & Sukmajati (2015) disebut patronase, yaitu pemberian materi, uang, dan jasa lainnya sesuai janji-janji sebelum kampanye. Pemberian itu selain ke pemilih, pekerja atau pegiat kampanye yang bekerja untuk memperoleh dukungan politik (Shefter 1994). Biaya patronase berasal dari dana pribadi atau anggaran pemerintah (*proyek-proyek pork barrel*). Perlu diperhatikan bahwa patronase berbeda dengan materi programatik (*programmatic goods*), yaitu program yang menjadi target dari program-program pemerintah, misalnya, program kartu pelayanan kesehatan yang menawarkan perawatan gratis untuk penduduk miskin.

Aspinal dan Sukmajati (2015) membedakan antara patronase dan klientelisme. Patronase merupakan materi atau keuntungan lain yang dibagikan oleh politisi yang berhasil menjadi legislator kepada pemilih atau pendukung. Klientelisme merupakan karakter relasi individual politisi dengan pemilih atau pendukung

(Hutchcroft, 2016; Barenschot, 2018b). Scott (1972), menekankan bahwa relasi klientelistik adalah relasi tatap muka secara langsung (*face-to-face*). Hicken (2011) menjelaskan bahwa klientelisme setidaknya mengandung tiga hal yaitu adanya kontingensi atau timbal balik, pemberian dilakukan patron kepada klien, sebagai respon langsung pemberian keuntungan dari pihak lain' (Hicken 2011: 291). Kedua, adanya hierarkis kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien. Ketiga, adanya aspek pengulangan atau terus menerus.

Hasil penelitian tersebut mirip dengan hasil peneltian (Edward Aspinall, 2019) bahwa partai politik melepas atau menggelindingkan calon-calon setelah tahapan pencalonan. Ketidakhadiran parpol pada fase kampanye dan pencarian suara memunculkan politik yang pragmatis. Ternyata hasil penelitian Aspinal tidak seluruhnya benar, meskipun kecenderungan itu ada. Menunjuk data para calon di internal partai PKB di kecamatan Pulau Panggung, pragmatisme masyarakat dalam kehidupan demokratis tidak terjadi pada perempuan karena mereka tidak memiliki uang. Mereka ingin melakukan *pragmatism* politik, tapi tidak ada modal ekonomi. Pun, partai tidak melakukan tindakan apapun terhadap para perempuan calon. Jadi mereka tidak menggelinding tetapi diam saja, tidak kampanye bahkan ada yang hari H tidak memilih dirinya sendiri.

Perbedaan ini perlu dicermati karena pada saat kampanye, ada calon laki-laki memproduksi struktur untuk mencari suara melalui strategi patronase dan klientelisme. Hal ini yang menurut Bawaslu dapat dinilai kampanye atau bukan, sulit dibedakan. Apalagi, pertemuan-pertemuan yang dilakukan calon dilakukan di rumah pusaka, yang mengundang *Tunggu Tubang*, yang memimpin *Meraje*. Pada pertemuan itu wajar ada bingkisan, sebagaimana kebiasaan etnis Semende. Bisa jadi itu pertemuan adat atau patronase, atau klientelisme. Pada pertemuan-pertemuan seperti ini dilakukan tanpa membagikan alat peraga kampanye. Pertemuan seperti ini efektif dalam penguasaan sumberdaya politik. Sepanjang ada Payung Jurai atau *Meraje*, maka perintahnya harus dijalani[121]. Perebutan penguasaan sumberdaya politik dengan cara seperti itu, hanya bisa dilakukan oleh

[121] Wawancara dengan Ketua Bawaslu Tanggamus, di kantor Bawaslu Tanggamus, 2022.

keluarga etnis Semende yang berada pada kalangan elite adat yaitu Payung Jurai, *Meraje* dan *Tunggu Tubang*. Meskipun pada lingkaran yang lebih besar sebenarnya dapat dilakukan untuk semua keluarga.

Produksi struktur patronase dan klientelisme sebagai modal sosial pada etnis Semende sebenarnya diterima masyarakat, mereka senang memberi dan diberi, karena kalau tidak diberi maka para sesepuh adat tersinggung. Apalagi modal sosial nilai-nilai, norma-norma, jaringan dan trust itu yang membuat masyarakat tetap erat (*cohesiveness*) atau memiliki keeratan sosial, inklusif, sehingga keberadaan etnis itu berkelanjutan.

Modal kekeluargaan Etnis Semende meyakini potensi keluarga dalam pemenangan calon, namun mempraktekkan klientelisme dan patronase. Praktek klientelisme dan patronase pada Etnis Semende dilakukan melalui jalur keluarga, bukan individu-individu. Jalur patronase dan klientelisme adalah primordialisme. Praktek patronase versi Aspinal dijalankan oleh calon Etnis Semende. Ini aneh, karena praktek ini diterima tetapi tidak menjadi acuan untuk memilih. Praktek patronase hanya digunakan calon incumbent untuk terpilih kembali, dan menjadi dasar bagi konstituen untuk mengevaluasi kebermanfaatan calon yang pernah didukung. Jadi tidak berkorelasi dengan dukungan. Apabila hasilnya evaluasinya negative, maka tidak akan dipilih pada periode mendatang. Hal seperti itu terjadi pada Sumiati yang tidak dipilih lagi pada pemilu 2019, padahal tahun 2014 dipilih. Sebetulnya keterpilihan Sumiati tahun 2014 itu menunjukkan bahwa tidak ada patriarkhi pada Etnis Semende. Tetapi karena calon dari keluarga Amin hanya 1 (satu). Tahun 2019 tidak dipilih lagi karena Sumiati dinilai tidak memberikan manfaat bagi keluarga Amin. Banyak janji-janji Sumiati yang tidak ditepati. Selain itu ada calon lain dari keluarga Amin yaitu Suhartono. Dua saudara sepupu ini bersaing memperebutkan sumberdaya politik Etnis Semende. Antara Zulki dan Suhartono itu tidak bersaudara, sehingga keluarga Amin memilih Suhartono.

Dengan kata lain, terdapat dua strategi yang dilakukan para kanditat yaitu primordialisme, namun mulai menggunakan patronase dan klientelisme yang mengarah ke pragmatisme walaupun tetap menggunakan kekeluargaan sebagai

dasar utama dalam perebutan sumberdaya politik. Kerangka adat istiadat tersebut hanya memunculkan kerjasama antar kandidat laki-laki dan perempuan pada taraf minimal yaitu hanya pada tahap pencalonan sekedar sebagai pelengkap dalam pemenuhan syarat pendalonan 30%. Adat *Tunggu Tubang* menjadi *constraining* bagi perempuan untuk memasuki dunia politik. *Constraining* menjadi penghambat, bukan tidak memperbolehkan. Adat *Tunggu Tubang* mengkotak perempuan di alam domestik yang menjurus pada pemasungan perempuan karena apabila perempuan keluar dari kotak pantora maka akan diberikan hukuman. Idealnya *Tunggu Tubang* merupakan kearifan tradisional yang mengempowermen perempuan karena adat telah memberikan kepercayaan dalam mengelola harta keluarga untuk mengurus orang tua dan *Anak Belai*. Sebagaimana dinyatakan Anthoni Gidden, lingkungan adat istiadat menjadi *constraining.*

5.Ambiguitas Adat Etnis Semende

Ada yang khas pada konstruksi sosial antar jenis kelamin Etnis Semende. Perempuan diberi kewenangan secara adat mengelola harta keluarga, seolah budaya etnis Semende itu matrilineal karena berkuasa atas harta adalah garis keluarga perempuan. Realitasnya kewenangan ini dikontrol laki-laki. Konstruksi tersebut (Alip, 2018) berpengaruh pada sikap dan perilaku sosial perempuan Semende yaitu tidak tumbuh budaya politik partisipan perempuan etnis Semende. Dukungan adat matrilineal tidak menciptakan perempuan sebagai pusat kekuasaan pada lingkungan yang lebih luas. Jadi pada masyarakat matrilineal masih kuat kecenderungan struktur patriarkhi yang menjadi penghambat partisipasi perempuan dalam politik. Struktur ini *constraining* bagi perempuan.

Struktur ini cenderung menguat karena dalam perkembangannya laki-laki Etnis Semende menuntut adanya perubahan konstruksi pengelolaan harta menjadi setara antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan ini justru berdampak pada marginalisasi perempuan *Tunggu Tubang*. Penelitian yang dilakukan (Zaenal, 2019) bahwa pengaturan adat Semende itu ambigu dan berakibat pada memunculkan *paradoks matrilineal* yaitu pengambilalihan kekuasaan oleh laki-laki dari kekuasaan

perempuan. Hasil penelitian ini mengingatkan bahwa perlu kehati-hatian dalam pembangunan kesetaraan gender. yang mengarah pada kesetaraan 50%:50%. Kasus-kasus lokalitas perlu diperhatikan untuk melihat secara utuh modal sosial tentang hubungan-hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.

Hubungan-hubungan sosial pada masyarakat patriarkhi memiliki kecenderungan perempuan menjadi obyek pencarian suara (Amalia et al., 2021). Hasil penelitian (Sidik et al., 2023) tentang upaya perempuan Tomohon dalam poliitik mengalami tindak kekerasan yaitu kekerasan politik berupa ancaman, pelecehan, atau kekerasan fisik yang diarahkan pada mereka atau keluarga mereka. Hal membuat perempuan merasa tidak aman untuk berpartisipasi dalam politik, bahkan di tingkat lokal. Kekerasan politik dapat menghalangi partisipasi perempuan dan memperburuk ketidaksetaraan gender dalam politik. Seperti temuan penelitian (Rosyid, 2016) tentang perempuan Samin yang unik dalam partisipasi pemilu mengikuti suami, tokoh adat, didatangi calon. Mereka datang saja ke TPS tanpa memilih karena diminta demikian. Sedangkan yang terjadi pada perempuan Etnis Semende adalah ketidakmampuannya sebagai agen dalam mereproduksi dan memproduksi struktur etnis Semende yang mengekang perempuan secara sosial.

Kekangan perempuan dalam politik itu penyebabnya tidak tunggal karena budaya patriarki. Dalam budaya patriarkhi, perempuan sulit menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, karena hanya sebagai warga kelas dua (Pillado, 2023). Perempuan menghadapi banyak tantangan untuk berpolitik (Abartal & Boutkhil, 2023). Perempuan etnis Semende dalam politik bukan seperti metafora *glass ceilling* (Idris et al., 2021) tetapi seperti *metafora labirin* yang terdapat banyak belokan, setiap level, lalu menemui ke jalan buntu. Penelitian O'Brien (2017) di Irlandia menunjukkan bahwa meski perempuan telah berada di puncak karier, tetapi masih tidak mampu mengubah sistem dan struktur yang patriarkhis di tempat kerja. Meskipun perempuan Etnis Semende adalah pewaris tunggal harta keluarga tetapi dalam politik hanya sebagai obyek. Ketidakmampuan perempuan dalam merubah struktur itu menunjukkan bahwa perempuan tidak mampu menjadi agen untuk mempengaruhi struktur.

6.Struktur dan Agensi Berkelindan

Struktur Adat telah menjadikan *Meraje* sebagai agensi melalui dua cara yaitu memampukan (*enabling*), sebaliknya memberikan kekangan (*constaining*) pada *Anak Belai*. Meskipun Meraje dimampukan oleh struktur, namun dalam praktek sosial para agen pada pemilu 2019, agen tetapi tidak meninggalkan atau tetap tunduk pada struktur. Agensi melakukan tindakan mencari kesempatan untuk melakukan inovasi struktur, bukan keluar dari struktur yang ada. Inovasi dilakukan dengan mereproduksi jaringan kekeluargaan etnis Semende sebagai jaringan distribusi uang dan barang. Hal ini dilakukan Agen hanya untuk memanfaatkan struktur yang ada, bukan melawan struktur yang mengontrolnya (*dialectic o*f *contro*l).

Pembagian uang dan barang dipratekkan oleh banyak calon. Pembagian uang dan barang diterima oleh keluarga, tetapi mereka mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dalam memilih calon yaitu nilai-nilai yang mendahulukan calon dari keluarga. Uang yang sedianya dimaksudkan untuk membeli suara dimaknai keluarga sebagai pemberian kepada sesepuh keluarga. Sedangkan individu-individu dalam memilih terikat kepada keluarga. Dualisme ini tidak berhasil disatukan karena faktor nilai-nilai kekeluargaan berada dalam dimensi kolektif sedang nilai-nilai uang berada dalam dimensi individual. Nilai-nilai kekeluargaan tidak dapat diproduksi para agen menjadi nilai-nilai uang. Sebaliknya uang tidak dapat dijadikan sebagai pengganti nilai-nilai kekaluargaan. Masyarakat berada dalam kegalauan antara memilih keluarga atau uang. Para *Meraje* berada dalam kondisi mempertahankan keluarga dalam pemilihan atau larut dalam politik uang. Dalam realitasnya, praktek sosial kekeluargaan merupakan pilihan. Mereka memilih bahwa keluarga harus didahulukan agar tetap terjaga identitas Etnis Semende sebagai etnis yang mendahulukan harmoni. Kalaupun ada yang memilih karena uang, hal itu disebabkan di keluarga itu tidak memiliki calon. Produksi dan reproduksi struktur, pada ruang dan waktu berkontribusi membentuk kegiatan sosial secara integral (Giddens, 1984). Seperti dalam strukturasi, kedudukan individu bukan obyek atau subyek, bukan di titik pusat (*decentred subject)* (Giddens, 1984).

Pada Etnis Semende, individu bukan obyek karena berada di dalam keluarga yang mendahulukan nilai-nilai keluarga. Individu juga bukan subyek yang memiliki pengaruh kuat terhadap struktur adat.

Struktur dan aturan diciptakan anggota organisasi yang membatasi perilaku mereka. Aturan membantu bagaimana interaksi seseorang dalam organisasi. (West dan Turner, 2009). Secara prinsip anggota organisasi memerlukan aturan sebagai pegangan perilaku yang diharapkan oleh organisasi sebagaimana dijelaskan Marshall Scott Poole (1990) ke dalam proses pengambilan keputusan pada organisasi atau kelompok (West dan Turner, 2009:297). Dalam strukturasi adaptif, aturan merupakan rutinitas umum yang diikuti organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya (West dan Turner, 2009:303). Sementara sumber daya merujuk pada kekuasaan yang dibawa oleh anggota ke dalam kelompok atau organisasi (West dan Turner, 2009:304).Kekuasaan dalam teori strukturasi adaptif ini dipandang sebagai sumber daya, karena kekuasaan yang dimiliki oleh anggota organisasi memiliki pengaruh menuntun individu untuk melakukan suatu tindakan atau memulai perubahan (West dan Turner, 2009).

Menurut Pace (1998) kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mengajak, memerintah, mengontrol hasil-hasil organisasi, dan mengajak keterlibatan anggota kelompok dalam diskusi dan pengambilan keputusan adalah bentuk orang tersebut memiliki kekuasaan (West dan Turner, 2009). Fokus kajian teori strukturasi adaptif bukanlah pada tahapan pengambilan keputusan tetapi efektifitas proses pengambilan keputusan sesuai tujuan dan faktor internal kelompok sendiri (West dan Turner, 2009),

Struktur dan Agensi yang merupakan kesatuan atau dualitas ini menjadi sumberdaya politik bagi laki-laki, namun tidak bagi perempuan. Laki-laki memiliki kekuasaan untuk mengontrol perempuan. Sedangkan perempuan tidak menjadi agen, tidak memiliki sumberdaya politik, tidak mampu mengambil keputusan dan melakukan perubahan untuk dirinya.

6.2. Temuan Kebaruan Studi Sosiologi Budaya

Penelitian ini menemukan kajian baru dalam Sosiologi Budaya. Berpijak dari teori strukturasi yang intinya menjelaskan bahwa perilaku manusia disebabkan faktor lingkungan. Budaya sangat berpengaruh pada perilaku anggota masyarakat yang ada di dalamnya. Meskipun manusia sebagai agensi juga berkontribusi terhadap perubahan di lingkungan dengan kreativitas-kreativitasnya. Perebutan penguasaan sumberdaya politik pada etnis Semende dipengaruhi relasi agensi dan struktur. Anthony Giddens menegaskan bahwa struktur bukan bersifat eksternal bagi individu-individu melainkan bersifat internal. Individu adalah subyek yang memiliki sifatnya yang otonom untuk mengontrol struktur itu sendiri. Struktur selalu mengekang (*constrain*) dan membebaskan (*enabling*) Giddens (2011). Namun struktur tidak dapat dicegah untuk masuk kedalam ruang dan waktu dalam kendali actor-aktor individu. Tindakan yang dilakukan aktor memiliki *unintended consequences* (konsekuensi yang tidak disengaja) terhadap struktur yang berdampak pada tindakan manusia selanjutnya. Tetapi yang dilakukan para kandidat dalam perebutan sumberdaya politik merupakan perilaku yang sadar. (Giddens, 2011:4).

Hasil dari interaksi struktur dan agen dalam perebutan sumberdaya politik, adalah sebagai berikut:

1. Pola-pola pemenangan calon pada pemilu tahun 2019:
    a. Apabila 1 (satu) calon dari keluarga meskipun perempuan maka semua dukungan keluarga dan kerabat diberikan kepada calon tersebut. Dukungan diberikan atas perintah Payung Jurai *Meraje* yang terstruktur secara vertical untuk mengatur keluarga dan kerabat secara vertikal dan horizontal. Dalam hal ini keluarga pihak perempuan (istri) tidak berada pada perintah Payung Jurai. Perintah Payung Jurai tidak berlaku bagi keluarga pihak istri. Pihak istri berada di Jurai keluarga lain. Sehingga suara mereka diberikan kepada calon dari pihak keluarga istri, apabila ada. Namun keluarga pihak istri diperbolehkan untuk mendukung calon tersebut.

b. Apabila terdapat lebih dari satu calon dari keluarga yang sama maka keluarga akan mengatur dukungan pada para calon. Penentu pemberian dukungan merupakan kewenangan Payung Jurai. Keputusan Payung Jurai akan menjadi acuan bagi *Tunggu Tubang* dan *Anak Belai* dalam memberikan dukungan. Keputusan Payung Jurai tidak boleh dibantah atau dipersoalkan.

c. Apabila terdapat lebih dari satu calon yang berjenis kelamin berbeda, ada kenderungan bahwa perempuan dinomorduakan. Keputusan tentang hal ini juga ditentukan Payung Jurai. Keputusan Payung Jurai juga tidak dapat diganggu gugat oleh *Tunggu Tubang* dan *Anak Belai*.

d. Apabila terdapat dua calon yang satu dari keluarga dan yang satu dari kerabat maka dukungan keluarga akan diberikan kepada calon yang dari keluarga sedangkan calon yang berasal dari kerabat karena hubungan perkawinan atau bukan karena keturunan satu darah tidak akan memperoleh dukungan.

2. Aktor Tetap Tunduk Pada Adat

Perebutan sumberdaya politik merupakan hasil interaksi antara Agen dan Struktur yang berproses dalam ruang produksi dan reproduksi. Proses ini tidak menghasilkan struktur baru meskipun dilakukan inovasi nilai-nilai, keberlakuannya bukan rutinitas harian tetapi lima tahunan. Kuatnya struktur yang ada tidak menghasilkan perubahan struktur dari mengekang menjadi membebaskan bagi perempuan, dan tetap memberdayakan laki-laki; serta mampu meminimalisir struktur yang mengutamakan hubungan-hubungan atas dasar rasionalitas uang daripada hubungan-hubungan kekeluargaan.

3. Kekuatan Struktur Adat

Kekuatan struktur yang ada saat ini menghalangi transisi ke struktur yang lebih membebaskan bagi perempuan, sambil tetap mempertahankan dan bahkan memperkuat dominasi laki-laki. Struktur yang ada cenderung memperkuat pentingnya hubungan kekeluargaan dibandingkan dengan hubungan yang

didasarkan pada rasionalitas uang, meskipun tanpa menghasilkan perubahan struktur yang signifikan. Perebutan Sumber Daya Politik**,** dalam kondisi di mana tidak terjadi perubahan struktural yang signifikan, perebutan sumber daya politik berlangsung melalui kompetisi dan kontravensi tanpa eskalasi menjadi konflik termanifestasi.

4.Stagnasi Proses Perubahan

Proses produksi dan reproduksi dalam teori strukturasi adaptif beroperasi dalam sebuah lingkup di mana struktur lama sangat dominan, dan perubahan yang dilakukan hanya bersifat marginal, tidak cukup untuk menginduksi transformasi struktural yang mendalam.

5.Dasar Penentuan Pola-Pola Pemenangan.

a. Kekuatan Struktur

Struktur pada etnis Semende memberikan kontribusi pada perebutan penguasaan sumberdaya politik. Struktur kekeluargaan ini bukan kekangan bagi individu-individu yang terlibat dalam perebutan penguasaan sumberdaya politik. Hal itu tercermin pada keterlibatan individu-individu Etnis Semende pada setiap kontestasi yang terjadi baik pada skala nasional hingga lokal. Struktur adat tidak melarang atau menjadi kekangan bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam kontestasi sebagaimana disampaikan Giddens bahwa struktur tidak disamakan dengan kekangan *(constraint*) namun selalu mengekang *(constraining)* dan membebaskan *(enabling).*

b.Struktur etnis Semende tidak menjadi kekangan bagi perempuan dalam perebutan sumberdaya politik, tetapi membebaskan *(enabling*) laki-laki. Struktur etnis Semende lebih mendudukkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan terhadap perempuan yang diberikan kewenangan sebagai kewajiban untuk mengurus harta keluarga. Perempuan diwajibkan mengurus harta Tunggu Tubang, tanpa disertai hak, justru diberikan sanksi apabila melanggar. Dalam hal ini, laki-laki tidak dibebani kewajiban tetapi diberikan kewenangan melakukan fungsi kontrol pada perempuan. Pada struktur yang relasinya tidak seimbang ini,

menjadi kekangan bagi perempuan dalam persaingan. Bilamana, relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan ini dapat dikurangi yang membuat perempuan tidak memiliki kompetitor laki-laki maka struktur menjadi sumberdaya bagi perempuan dalam persaingan.

Dengan demikian berbeda dengan yang disampaikan Giddens bahwa sumberdaya individu akan menciptakan struktur dominasi (Giddens, 1979:92), yang terjadi pada etnis Semende adalah struktur yang *enabling* bagi laki-laki, akan *enabling* bagi perempuan apabila perempuan tidak memiliki kompetitor dari laki-laki. Detail tentang proses produksi dan reproduksi pada struktur yang *enabling* dan *constraining* tidak dijelaskan Anthony Giddens. Penelitian ini menemukan bahwa struktur secara bersamaan menjadi kekangan, mengekang, dan *enabling*, pada laki-laki dan perempuan. Kecuali, proses produksi dan reproduksi struktur dilakukan dengan mengurangi dominasi laki-laki maka struktur *enabling* bagi perempuan. Sehingga berbeda dengan yang disampaikan Gidden bahwa dominasi dapat dikurangi dengan cara penguatan sumberdaya individu namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam struktur yang relasinya tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kuatnya sumberdaya pribadi tidak menjadi jaminan bagi perempuan dalam memenangkan perebutan penguasaan sumberdaya politik.

c. Terdapat dua pola perebutan sumberdaya politik yaitu patronase dan klientelisme, dan primordialisme. Bagi calon yang tidak memiliki dan memiliki sumberdaya ekonomi yang kuat, perebutan sumberdaya politik dilakukan dengan memanfaatkan struktur kekeluargaa. Bagi yang sumberdaya ekonominya kuat, dilakukan produksi politik uang untuk memperkuat struktur kekeluargaan yang tidak diyakini memberikan kontribusi pada perebutan kekuasaan.

Uang atau barang dibagikan melalui jaringan primordialisme[122], tertutup, subyektif. Tim Sukses dan Broker membagikan uang dan barang kepada keluarganya secara diam-diam ke keluarganya. Alasannya, membagikan uang

[122] Jaringan kekeluargaan

dan barang merupakan pelanggaran kampane dan ada sanksinya. Selain itu, kemampuan calon tidak bisa membagikan uang untuk semua keluarga sehingga harus tertutup dan diam-diam. Selain membagikan uang, para incumben membangun jalan, jembatan, membantu renovasi musholla menggunakan dana pemerintah. Masyarakat menduga proyek-proyek infrastruktur dari kantong sang incumben. Pemberian ini pernah menimbulkan kegaduhan para incumben yang saling mengklaim sebagai proyeknya tetapi akhirnya masyarakat tahu kalau proyek itu dananya dari pemerintah (*pork barrell* atau gentong babi). Proyek *gentong babi* ini berakibat pada munculnya kekecewaan masyarakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Kekecewaan masyarakat ini berakibat pada hilangnya *trus*t keluarga pada calon tersebut, dan calon tidak dipilih pada periode selanjutnya.

d.Para calon berebut sumberdaya politik menggunakan primordialisme karena kuatnya kesukuan. Ditemukan calon yang melakukan inovasi primordialisme dengan ikatan organisasi massa seperti NU dan Ansor. Ikatan-ikatan primordialisme diperkuat dengan ikatan organisasi untuk sebagai cantolan jaringan vertikal ke organisasi serupa di tingkatan kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Pola penguatan nilai-nilai primordial ditimpa dengan nilai-nilai organisasi, yang ujungnya menjadi modal keterpilihan. Bahkan, upaya untuk merebut sumberdaya politik dilakukan calon dengan transformasi struktur kekeluargaan digabung struktur organisasi massa bagi penyelenggara pemilu. Etnis Semende yang berkeinginan menjadi penyelenggara pemilu harus mau bergabung dalam organisasi massa, dan dibaiat melalui kegiatan kaderisasi ormas untuk loyal ke ormas tersebut.

Meskipun tidak semuanya, terdapat calon bertransformasi menjadi agen yang memproduksi nilai-nilai kekeluargaan yang dicampur dengan nilai-nilai organisasi kemasyarakatan. Kemunculan gabungan nilai-nilai keduanya berupa nilai-nilai baru dimana keluarga tersebut menjadi terikat pada organisasi yang legal formal. Keterikatan secara kesukuan dan organisasi ini memperkuat

keeratan jaringan sosial kekeluargaan dan organisasi. Bahkan berakibat juga pada terabaikannya keluarga karena organisasi.

Agen meproduksi nilai-nilai penyelenggara pemilu dari independensi menjadi dependen pada calon atau partai. Bahwa penyelenggara dibayar, untuk loyal pada peyelenggaraan pemilu, bukan kepada agen, pada prakteknya mereka loyal kepada agen misalnya mengamankan suara agen, bahkan ada yang melakukan praktek penyelenggaraan yang tidak tertib hukum demi loyalitas pada agen. Sebuah struktur klientelisme baru telah terbentuk menjadi modal sosial baru dalam perebutan penguasaan sumberdaya politik. Struktur klientelisme tersebut bermanfaat karena klien menikmati pelanggengan posisinya karena memperoleh perlindungan agen. Dengan demikian inovasi agen dilakukan semakin jauh dari struktur yang ada bahkan melampaui batas regulasi atau melanggar regulasi.

e.Struktur telah membuat perempuan berada dalam dimensi motivasi tak sadar (*unconscious motives*), dimana perempuan terlibat dalam pemilu bukan karena kesadarannya tetapi tetapi sebagai *taken for granted knowledge.* Bahwa yang dilakukan secara rutin itu tidak pernah dipertanyakan mengapa dilakukan, terjadi, dan sebagainya. Perempuan masih jauh dari kesadaran diskursif (*discursive consciousness*), yaitu bertindak sebagai refleksi atas tindakannya sebagai agen.

6.3.Temuan Utama:

Temuan penting yang berhubungan dengan teori strukturasi adalah sebuah konsep tentang teori strukturasi:

a. Struktur yang sangat kuat tidak menghasilkan perubahan karena membatasi kemampuan agen dalam melakukan produksi dan reproduksi struktur yang dikehendaki, meskipun agen melakukan pelanggaran (*money politic*), pada akhirnya agen tetap mempedomani tindakan sosialnya pada struktur lama.

b. Perebutan penguasaan sumberdaya politik yang terjadi pada struktur yang sangat kuat, *constraining* bagi perempuan dan *enabling* pada laki-laki tidak berimplikasi pada produksi dan reproduksi struktur baru yang dikehendaki.
c. Struktur yang *constraining* bagi perempuan memposisikan perempuan pada dimensi ketidaksadaran (*unconscious motives*), bahwa rutinitas itu *taken for granted knowledge* sehingga menyulitkan perempuan untuk mencapai kesadaran praktis dan diskursif meskipun telah didorong melalui perubahan struktur formal berupa regulasi negara.
d. Struktur yang kuat secara primordial kekeluargaan memiliki kemampuan mengeliminir nilai-nilai politik uang (*patronase dan klientelisme*) meskipun nilai-nilai ini telah dipraktekkan dalam perebutan sumberdaya politik.
e. Agen memilih struktur adat sebagai pedoman pada perebutan sumberdaya politik karena tidak merugikan agen dan tidak merusak kelembagaan Etnisitas. Ada batas perilaku Agen dalam perebutan penguasaan sumberdaya politik sebagaimana diatur yaitu berpolitik mendahulukan keluarga dan tanpa berkonflik.
f. Apabila teori strukturasi Anthony Giddens menyatakan bahwa struktur dan agen merupakan dualisme yang secara terus menerus melakukan produksi dan reproduksi untuk menghasilkan struktur baru yang dikehendaki, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi dan reproduksi tidak selalu terjadi. Struktur yang *constraining* bagi perempuan dan *enabling* pada laki-laki berimplikasi pada stagnasi proses produksi dan reproduksi struktur, karena struktur menjadikan perempuan berada pada dimensi motivasi tidak sadar (*unconscious motives*), meskipun laki-laki berada dalam dimensi kesadaran praktis (*practical consciousness*) tetapi belum mencapai dimensi kesadaran diskursif (*discursive consciousness*), maka perubahan struktur tidak terjadi.
g. Temuan penelitian yang paling utama dari disertasi ini adalah "**Struktur Adat Etnis Semende menentukan kemenangan calon, bahkan mampu mengeliminir struktur eksternal patronase dan klientelisme pada perebutan penguasaan sumberdaya politik Etnis Semende pada Pemilu Tahun 2019.**

BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

7.1.1. Perebutan penguasaan sumberdaya politik etnis Semende pada pemilu tahun 2019 di internal PKB adalah sebagai berikut:

Perebutan Pada Pencalonan

1. Persaingan Politik Tanpa Konflik Terbuka

Struktur adat etnis Semende mengedepankan kekeluargaan sehingga persaingan politik yang terjadi pada perebutan sumberdaya hanya sedikit menimbulkan kontravensi dan konflik yang latent. Konflik terbuka tidak terjadi, karena kepentingan keluarga lebih besar dibandingkan kepentingan politik (kekuasaan).

2. Persaingan Politik Tidak Terjadi Antara Laki-laki dan Perempuan

Struktur pada Etnis Semende lebih *enabling* bagi laki-laki untuk berpolitik. Secara terus menerus laki-laki dimotivasi untuk memiliki kesadaran praktis (practical consciousness), sedangkan struktur cenderung *constraining* pada perempuan perempuan pada dimensi tak sadar (*unconscious*). Sehingga tidak terjadi persaingan politik antara laki-laki dan perempuan.

7.1.2. Kontribusi Lembaga Adat dan Kekerabatan Pada Pencalonan

a. Pada Pencalonan

1. Adaptasi Struktur Adat

Proses adaptasi melalui reproduksi struktur adat dan struktur nasional yang sifatnya koersif memaksa para agensi melakukan reproduksi struktur agar pencalonannya memenuhi persyaratan.

2. Praktek Produksi dan Reproduksi Struktur

Praktek produksi dan reproduksi dalam pencalonan dilakukan *Meraje* sebagai "agensi", merupakan aktivitas rutinitas pada setiap pemilu setiap

5 tahunan. Meskipun demikian telah merubah ketidakbiasaan perempuan dalam politik menjadi biasa.

3. In Group Terpecah

   Di internal partai PKB, para calon bergabung untuk berkontestasi memperebutkan sumberdaya politik menghadapi partai yang lain, dan untuk memperebutkan kursi di internal partai politik. Dari 8 calon yang ada, terpecah dalam 2 (dua) grup kecil. Dua grup itu terbentuk atas dasar hubungan keluargaan sebagai upaya memperkuat kemenangan politik keluarga.

c. Pada Perebutan Suara

1. Kontribusi Agen

   a. Berebut Suara Tanpa Konflik

   Struktur adat etnis Semende mengedepankan kekeluargaan, sehingga di dalam perebutan suara terjadi sedikit persaingan dan kontravensi, tanpa konflik.

   b. Mempedomani Budaya

   Budaya menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memilih kandidat. Meskipun sebagian kandidat menggunakan politik uang, tetapi pola-pola pemenangan calon ditentukan atas hubungan-hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu meskipun uang dan barang dibagikan oleh calon etapi memilih calon tidak didasarkan karena politik uang.

c. Kompetisi, Kontravensi, Konflik

   Perebutan penguasaan sumberdaya politik terjadi dalam situasi persaingan, sedikit kontravensi, dan tanpa konflik. Hal ini terjadi karena kekuatan struktur, kekuatan keluarga, serta batas agen dalam memproduksi dan mereproduksi nilai-nilai ekternal yaitu menjaga kekeluargaan dan tanpa konflik.

d. Patronase, Klientelisme, Primordialisme

Ada dua strategi yang dilakukan para kanditat yaitu primordialisme, namun mulai menggunakan patronase dan klientelisme yang mengarah ke pragmatisme walaupun pada akhirnya tetap menggunakan kekeluargaan sebagai dasar utama dalam perebutan sumberdaya politik.

e. Ambiguitas Adat Etnis Semende

Ada yang khas pada konstruksi sosial antar jenis kelamin Etnis Semende. Perempuan diberi kewenangan secara adat mengelola harta keluarga, seolah budaya etnis Semende itu matrilineal. Adat ini tidak menciptakan perempuan sebagai pusat kekuasaan pada lingkungan yang lebih luas. Jadi pada masyarakat matrilineal masih kuat kecenderungan struktur *constraining* bagi perempuan. Akibatnya perempuan tidak mampu menjadi agen untuk mempengaruhi struktur.

2. Kontribusi Struktur Adat etnis Semende Dalam Pemenangan Kandidat.

a. Strukur Adat Etnis Semende memberikan kontribusi pada pemenangan kandidat karena kekeluargaannya masih kuat. Adapun bentuk-bentuk kontribusi struktur adat dalam pemenangan kandidat aberpola sebagai berikut:

Terdapat 4 (empat) pola pemenangan yaitu:

1. Apabila calon hanya satu dari keluarga meskipun perempuan maka semua dukungan keluarga dan kerabat diberikan kepada calon tersebut.
2. Apabila terdapat lebih dari satu calon dari keluarga yang sama maka keluarga mengatur dukungan pada para calon. Penentu pemberian dukungan merupakan kewenangan Payung Jurai dan *Meraje*.
3. Apabila terdapat lebih dari satu calon yang berjenis kelamin berbeda, maka perempuan dinomorduakan. Keputusan tentang hal ini juga ditentukan Payung Jurai.
4. Apabila terdapat dua calon yang satu dari keluarga dan yang satu karena kerabat maka dukungan keluarga akan diberikan kepada calon yang dari keluarga sedangkan calon yang berasal dari kerabat tidak diberikan dukungan.

b. Etnis Semende lebih mengutamakan dukungan politik dari keluarga dibandingkan memberikan dukungan karena uang atau *money politic* (*patronase dan klientelisme*).

c. Etnis Semende tidak memberikan dukungan kepada calon karena dari partai politik tetapi hanya memberikan dukungan kepada calon atas dasar kekeluargaan, kekerabatan dan bukan keluarga.

d. Perempuan Etnis Semende tertinggal dalam politik karena struktur Etnis Semende mengekang (contraining) perempuan, sebaliknya *enabling* pada laki-laki. Struktur yang mengekang membuat perempuan tidak memiliki kemampuan produksi dan reproduksi struktur, karena perempuan berada dalam dimensi motivasi tidak sadar (unconscious motives), sedangkan laki-laki yang memperoleh suport dari struktur (*enabling*) telah mencapai dimensi motivasi kesadaran praktis (*practical consciousness*) sehingga laki-laki menjadi pelaku (agensi) perubahan.

7.2. Saran

Ada beberapa hal yang disarankan agar penelitian tentang etnisitas pada masyarakat multikultr ini semakin banyak dilakukan :

a. Penelitian lanjutan tentang perebutan penguasaan sumberdaya politik pada etnis minoritas termasuk Semende pada pemilu tahun 2024, agar diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kondisi dan kebutuhan etnis minoritas dalam politik.
b. Diperlukan pengkajian kembali terhadap kebijakan pembangunan politik pada etnis minoritas di masyarakat multukultur, yang inklusif termasuk pada perempuan agar mampu menjadi agen yang mampu memproduksi dan mereproduksi atruktur yang diharapkan.
c. Desain pembangunan politik perlu mempertimbangkan kondisi etnis minoritas yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma tersendiri, yang mempengaruhi perilaku politiknya. Desain pembangunan politik perlu lebih hati-hati apabila diimplementasikan pada perempuan agar desain yang

diasumsikan meningkatkan keberdayaan perempuan justru berakibat sebaliknya.

d. Diperlukan pengkajian terhadap regulasi yang mengatur kesetaraan dalam pemilu, tidak hanya kesetaraan dalam pencalonan sebesar 30%, tetapi juga kesetaraan dalam kualitas para calon.

DAFTAR PUSTAKA

A. Mukhlishin, Khotamin, N. A., & Ari Rohmawati, A. (2017). Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat DI Era Kontemporer. *Ulul Albab*, *18*(1).

Abadia, M., Alungb, C., Permadic, I., & Schovad, Y. (2023). Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, *4*(2), 142–165.

Abartal, K., & Boutkhil, S. (2023). Challenging Patriarchy: Moroccan Women and Political Leadership. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, *3*(4), 20–28. https://doi.org/10.55544/ijrah.3.4.3

Abdulkadir-sunito, M., Adiwibowo, S., Soetarto, E., Kinseng, R. A., & Foley, S. (2017). Batas Politik Etnisitas? Migrasi dan Transformasi Dataran Tinggi di Sulawesi Tengah. *Sodality*, *5*(3), 226–233.

https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/19396/13497

Adeni, S., & Harahap, M. A. (2017). Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi Dan Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta*, *1*(2), 7.

Agger, B., Nurhadi, & Diterje. (2009). *Teori sosial kritis kritik, penerapan dan implikasinya*. Kreasi Wacana.

Ahmadi, D. (1981). *Sosiologi Politik*. 174-175.

Alfitri, A. (2014). Perilaku Politik Transaksi Calon Legislatif Dan Pemilih Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kelurahan Sako Kota Palembang. *Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III …*, 203–216. https://repository.unsri.ac.id/6538/

Alip, S. U. (2018). Budaya Politik Perempuan Semende di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. *Sosialita*, *12*(2). http://digilib.unila.ac.id/24586/

Amalia, L. S., Darmawan, D., Nuryanti, S., Nugroho, A. E., Romli, L., & Kartini, I. (2021). Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019. In *Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019*. https://doi.org/10.14203/press.332

Angreini, R., Sidemen, A. I., Wirasmini, Agung, & Anak Asmariati, I. (2021). Journal of Arts and Humanities. *HUMANIS*, *25*, 386–395. https://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/view/72731/41127

Aritonang, M. R. (2024). Memahami Postmodernisme Menurut Jean Francois Lyotard (Studi Pemikiran Francois Lyotard tentang Postmodernisme). *Seri*

Mitra Refleksi Ilmiah_Pastoral, *3*(1), 151–172.

Arowolo, G. A. (2020). Protecting women fromviolence throughlegislation in Nigeria:Need to enforceanti-discrimination laws. *International Journal of Discrimination and the Law*, *20*(4). moz-extension://abc88aec-6d47-4a47-b64d-ddfac7b988e4/enhanced-reader.html?

Aspinall, E. (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*. Research Centre for Politics and ….

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qvqTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=klientelisme+dalam+politik&ots=GSsTTj0zBx&sig=_FnCo8WXihI1XFTc-lBIjlVInQ4

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia : patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014* (Vol. 1). PolGov. https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1667/2022/02/politik-uang-di-indonesia.pdf

Aureyo, J. (1999). “From the Client’s Point(s) of View”: How Poor People Perceive and Evaluate Political Clientelism. *Springer*, *28*(2). https://www.jstor.org/stable/3108473

Azad, M. S. (2021). Experiences of domestic abuse within the South Asian community. *Journal of Global Faultlines*, *8*(1), 50–68. https://doi.org/10.13169/jglobfaul.8.1.0050

Azizurrahman, A. (2020). Analisis Preferensi Politik Pemilih Atas Pigur Calon Legislatif Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Mentari Publika*, *1*(1). http://islamlib.com

Baidawi, A. (2022). Praktek Etnisitas Dalam Politik Identitas Di Tengah Multikulturalisme Bangsa Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, *6*(2), 217–227.

Beckwith, K., & Cowell-Meyers, K. (2007). Sheer numbers: Critical representation thresholds and women’s political representation. *Perspectives on Politics*, *5*(3), 553–565. https://doi.org/10.1017/S153759270707154X

Berenschot, W. (2018a). The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia’s Patronage Democracy. *Comparative Political Studies*, *51*(12), 1563–1593. https://doi.org/10.1177/0010414018758756

Berenschot, W. (2018b). The Political Economy of Clientelism: A Comparative

Study of Indonesia’s Patronage Democracy. *Comparative Political Studies*, *51*(12),

1563–1593. https://doi.org/10.1177/0010414018758756

Beyme, K. Von. (2008). Federalism, Democracy, and The Politic Of Identity. *PhilPaper*, 1–10.

Bourdieu, P. (n.d.). *Pierre Bourdieu A Three Capital Theory - What is Social Capital*. https://1library.net/article/pierre-bourdieu-capital-theory-social-capital.y8gmer2z

Burt, R. S. (2000). The network structure of social capital. In *Research in Organizational Behavior* (Vol. 22). Elsevier Masson SAS. https://doi.org/10.1016/s0191-3085(00)22009-1

Cahayo, F. (2022). Kepemimpinan Meraje Keluarge Semende Di Desa Rejanglebongdan Relevansinya Dengan Ajaran Islam. *Manthiq : Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam*, *7*(1).

Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human development. *The American Journal of Sociology*, *94*, 95–120.

Collier, D., & James E. Mahon, J. (1993). Conceptual "Stretching" Revisited: Adapting Categories in Comparative Analysis. *The American Political Science Review*, *87*(4), 845–855. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/293881

Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (2 C.E.). *Adat dalam Politik Indonesia* (Yayasan Ob).

Deivid, J., & Palenewen, O. (2021). POLITIK ETNISITAS : SURVIVALITAS ETNIS MELAYU MELALUI MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU. *JISPAR*, *10*(2), 14–23. file:///C:/Users/USER/Downloads/4115-Article Text-12139-3-10-20230331.pdf

Dewi, N. Y. (2023). Matrilineal Masyarakat Minangkabau Dalam Novel Perempuan Batih Karya a . R . Rizal. *Bapala*, *10*(1), 197–207.

Disanto, E. (2019). Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah. In *ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*. http://repository.radenintan.ac.id/6994/1/SKRIPSI.pdf

Disyacitta, F. (2019). Melawan Diam-Diam di Tengah Dominasi: Kajian Strategi Penerimaan Sosial Politik Kelompok Minoritas Syiah di Kabupaten Jember. *233Jurnal PolGov*, *I*(1), 231–262. file:///C:/Users/USER/Downloads/60199-186921-1-PB.pdf

Earl, R. (2020). *The Exploitative Use of Women in Contemporary Liberal Development Agendas*. *16*(1), 12–31.

Edward Aspinall, & Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia: patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014* (1st ed.). PolGov : Yogyakarta., 2015.

Edward Aspinall, W. B. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesi*. Yayasan Obor Indonesia.

Efrianto, A. (2017a). Struktur Masyarakat 1 Semende Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Semende And Society Structure In Ogan Komering Ulu Selatan Regency. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, *3*(1).

Einestein, Z. (1999). Constructing A Theory Of Capitalist Patriarchy And Socialist Feminism. *Crisis*, *25*(2–3), 196–217.

Elma, H. (2019). INTOLERANSI DAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP KEMAJEMUKAN : STUDI KASUS KERUKUNAN BERAGAMA DI KOTA BOGOR , JAWA BARAT INTOLERANCE AND RESISTANCE OF COMMUNITIES AGAINST PLURALISM : A CASE STUDY OF RELIGIOUS HARMONY IN THE CITY OF BOGOR , WEST JAVA. *Multikultural Dan Multireligius*, *18*(2), 282–299. file:///C:/Users/USER/Downloads/aris,+Journal+manager,+4.+Elma+Haryani.pdf

Erdward Aspinall dan Ward Berenschot. (2019). Democracy for sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. In *Journal politic science* (pp. 30–31). https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qvqTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=klientelisme&ots=GSqYSiXvzv&sig=zckAidXbZkTvb0BplDfy2b2JtXc

Ette, M., & Akpan-Obong, P. (2023). Negotiating Access and Privilege: Politics of Female Participation and Representation in Nigeria. *Journal of Asian and African Studies*, *58*(7), 1291–1306. https://doi.org/10.1177/00219096221084253

Farida, L., & Yoedtadi, M. G. (2019). Jurnal Lailia-Gafar-Politik Identitas. *Koneksi*, *3*(2), 358–365.

Fathudin, Tharim, A., & Ihya, N. H. (2020). PATRONASE, KLIENTELISME DAN POLITIK IDENTITAS DALAM PERHELATAN DEMOKRASI AKAR RUMPUT (Studi Tentang Pemilihan Kepala Desa Pada Masyarakat Multietnis di Sulawesi dan NTB) Tim. In *Laporan Akhir Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional Anggaran 2020* (pp. 12–26).

Fauzi, F. (2016). *Bourdieu: Penyingkap Kuasa Simbolik*. JALASUTRA (Anggota IKAPI).

Field, J. (2010). *Social Capital* (I. R. Muzir (Ed.); Indonesia).

ttps://1library.net/article/pierre-bourdieu-capital-theory.
ttps://1library.net/article/pierre-bourdieu-capital-theory

Firdaus, M. N., & Andriyani, L. (2021). Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, *2*(2), 47. https://doi.org/10.24853/independen.2.2.47-52

Frenki. (2021). Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, *1*(1), 30–49. http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8540

Gerring, J. (2012). What Makes a Concept Good ? A Criterial Framework for Understanding in the Social Sciences. *Polity*, *XXXI*(2). file:///C:/Users/USER/Downloads/Gerring1999-WhatMakesaConceptGood-ACriterialFrameworkforUnderstandingConceptFormatio.pdf

Gunanto, D., Andriyani, L., & Sahrul, M. (2020). Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Terpilih Dprd Tangerang Selatan Dalam Pemilu Tahun 2019 (Fraksi Partai Solidaritas Indonesia). *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, *4*(2), 131. https://doi.org/10.24853/pk.4.2.131-136

Haboddin, M. (2012). Menguatnya politik identitas di ranah lokal. In *Jurnal Studi Pemerintahan*. journal.umy.ac.id. http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/viewFile/152/495

Haksar, N. (1986). Women and Violence Author. *Economic and Political Weekly*, *21*(49), 2126–2127. https://www.jstor.org/stable/4376412

Halim, D., & Wedhaswary, I. D. (2019). Buka-bukaan-caleg-soal-penentuan-nomor-urut-di-partainya. *Kompascom*.

Hargens, B. (2015). Demokrasi Radikal. In *Paradoks Demokrasi Liberal* (Pertama, p. 77). PARRHESIA.

Harianto, Rahardjo, M., & Baru, B. M. (2018). Politik uang dan konflik horisontal dalam pemilihan kepala desa, di kabupaten magetan, jawa timur 1). In *SENASIF 2018*.

Haris, S. (2014). *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia,. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=876204

Harjanta, S. L. (2021). Meningkatkan Pemahaman Kalangan Pemilih Pemula Tentang Bahaya Politik Uang dalam Pilkada Sleman. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.398

Harsuno, S., Ekwandari, Y. S., Unila, F., Prof, J., No, S. B., & Lampung, B. (2018). *Makna Simbol Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo di Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong*. *01*.

Hartoyo. (2019). Muakhi (Persaudaraan) dan Praktiknya untuk Mencegah Konflik Komunal dalam Masyarakat Multikultural. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, *32*(3), 227–239.

Heller, A. (2001). Cultural memory, identity and civil society. *Internationale Politik Und Gesellschaft/International Politics and Society*, *2*, 139–143.

Herianto, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *5*(1), 53–64. https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.39581

Hertanto. Sulaiman Ahmad, N. (2009). *KOALISI TRANSAKSIONAL PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI LAMPUNG Oleh: Hertanto * dan Nidzammuddin Ahmad Sulaiman **.*

Hertanto, H., Haryanto, S., & Maryanah, T. (2021). Strategi Pemenuhan Hak Elektoral Kelompok Minoritas Suku Anak Dalam Sub-Etnis Orang Rimba Oleh Kpu Batanghari, Jambi, Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, *6*(1), 84. https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.32262

Hikmawan, M. D. (2017). Politik Perbedaan: Minoritas Dalam Implementasi Kebijakan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, *1*(1). https://doi.org/10.31506/jipags.v1i1.1268

Hilgers, M. (2009). *Habitus, Freedom, and Reflexivity*. *19*(6). https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0959354309345892

Hilgers, T. (1999). *1 Clientelism and conceptual stretching: differentiating among concepts and among analytical levels forthcoming in*.

Horowitz, D. L. (1986). Ethnic Groups in Conflict. In *Contemporary Sociology* (Vol. 15, Issue 4, p. 642). https://doi.org/10.2307/2069338

Huda, N. (2010). *Ilmu Negara*. Raja Grafindo Persada.

Hutchcroft, P. D. (2016). Linking Capital and Countryside: Patronage and Clientelism in Japan, Thailand, and the Philippines. *Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy*, *16*(17), 174–203.

Idris, I. K., Elizarni, Ariyanti, R., Sudarmanti, R., & Krismantari, I. (2021). Roller Coaster Kepemimpinan Perempuan. In *Structural Engineer* (1st ed., Vol. 90, Issue 3). PT Rajawali Buana Pusaka. https://doi.org/10.1145/1163514.1163516

Incamilla, A., Arifin, B., & Adia, N. (2015). Keberlanjutan Usahatani Komi Agroforestri di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. *JIIA*, *3*(3), 260–267.

Intentilia, A. A. M. (2020). Analyzing Patriarchy, Political Participation, and Active Citizenship in ASEAN. *Intermestic: Journal of International Studies*, *5*(1), 12. https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.2

Irving M Zeitlin. (1995). *Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Gadjah Mada University Press.

Ismiati. (2018). Pengaruh stereotype gender terhadap konsep diri perempuan. *TAKKAMUL*, *7*(1), 33–45. file:///C:/Users/USER/Downloads/2460-10610-1-PB.pdf

Januar, E. (1984). Pola Rekrutmen Partai Politik di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh dan Kota Sabang). *AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Sciences*, *3*(1), 1–14.

Juliantono, F. J. (2016). Fenomena Kemiskinan Nelayan : Perspektif Teori Strukturasi Fishermen Poverty Phenomenon : Structuration Theory Perspective. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, *12*(02), 1857–1866.

Kaligis, R. (2014). Nasionalisme dan kelas sosial: Ideologi dan praktik partai nasionalis di Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, *27*(2), 83. https://doi.org/10.20473/mkp.v27i22014.83-95

Kayatu, D. (2022). Rivalitas Politik : Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel. *Musamus Journal Of Public Administration*, *IV*(2), 91–100. file:///C:/Users/USER/Downloads/4115-Article Text-12139-3-10-20230331.pdf

Khoerrunnisa, D. A., Sjoraida, D. F., & ... (2020). PERSONAL BRANDING POLITISI GENERASI MILLENNIALS STUDI DESKRIPTIF PERSONAL BRANDING FALDO MALDINI SEBAGAI POLITISI GENERASI …. In *JRK (Jurnal Riset …*. scholar.archive.org.

Koentjaraningrat. (2007). *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jambatan.

Kshitij, P., & Garima, N. (2018). Issues & Challenges Related To Marital Rape in India. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, *7*(04), 58–69.

Kurniadi, B. D. (2022). *Praktik Patronase dan Klientelisme dalam Distribusi Program Pemerintah (Studi Kasus: Calon Legislatif Petahana Partai Gerindra DPRD Provinsi DIY pada Pemilihan Legislatif 2019) NABIL FIADY, Bayu Dardias Kurniadi, S.IP, M.A, M.Pub.Pol, Ph.D.* Universitas

Gadjah Mada.

Ladini, M., & Yuwanto, Y. (2019). Perilaku Memilih Pemegang Kartu Tani pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 Kabupaten Semarang. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, *7*(2), 102. https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2887

Lawang, R. (1994). *Pengantar Sosiologi.* universitas terbuka.

Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Jurnal Of Politics and Polycy*, *1*(1), 57–68. https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2769

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2019). *No TitleBagaimana Demokrasi Mati*. Gramedia Pustaka Utama.

Liata, N., & Fazal, K. (2021). Multikultural Perspektif Sosiologis. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, *1*(2), 188. https://doi.org/10.22373/arj.v1i2.11213

Louis, R. (1994). Civil society, patronage and democracy. *International Journal of Comparative Sociology*, *3*(1). https://www.proquest.com/openview/4e64a98db8ca3e425d9de3e03b771191/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1819659

Lumban Gaol, A. (2023). *Peran Politik Kekerabatan Dalam Kemenangan Kepala Desa di Desa Simamora Kecamatan Taruntung Kabupaten TapanuliUtara Pada Polkades 2021*. https://repository.unja.ac.id/56477/

Mahdiana, N. (2018). Politisasi Korpri pada Pemilu Orde Baru Tahun 1970-1998 di Jawa Timur. *AVATARA. e-Journal Pendidikan Sejarah*, *6*(3), 48–62.

Mahsun, M. (2020). Demokrasi Patronase dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Pelembang, Sumatera Selatan. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, *2*(1), 13–26. https://doi.org/10.21580/jpw.2020.2.1.1996

Makhasin, L. (2016). Orientasi ideologi dan pragmatisme politik model pembentukan koalisi dalam pilkada serentak di Jawa Tengah 2015. In *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. academia.edu. https://www.academia.edu/download/54959005/JSP_19.3.2016_luthfi.pdf

Makhya, S. (2015). *STUDY OF IDENTIFICATION ISSUES OF DEMOCRACY IN LAMPUNG)*. *5*(3), 1–8.

Manangin, M. S., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). PENGALIHAN ATAS HARTA WARISAN DI INDONESIA. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(2), 177–189.

Mark, P. (1997). Defining Political Corruption. *Political Insight*, *XLV*, 436–462. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-9248.00090

Meliala. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Penerapan Strategi Bertahan Dan Menyerang Untuk Memenangkan Persaingan. *Jurnal Citizen Education*, *2*(2), 12–24. https://unimuda.e-journal.id/jurnalcitizen/article/view/617/491

Milka. (2018). *Caleg Muda Nomor Urut Satu*. Rumah Pemilu.org. https://rumahpemilu.org/caleg-muda-nomor-urut-1-pemilu-2019/

Mufrikhah, S. (2020). Keterbatasan Kuota Perempuan di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah. *JPW (Jurnal Politik Walisongo*, *2*(2), 47–66. https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070

Muhammad, H. A., Bafadhal, F., & Anggara, D. (2022). Kuasa Etnisitas Dalam Meret Politik Konsumen Kabupaten Tebo di Era Reformasi. *NOKEN*, *7*(2), 234–248.

Narwoko, J. D., & Bagong Suyanto, S. T. (2005). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana Prenada Media Group.

Naser, R. (2014). *Aktor Politik Sebagai Salah Satu Kekuatan Politik*. https://www.academia.edu/15225896/Aktor_politik_sebagai_salah_satu_kekuatan_politik?auto=download

Nasution, R. F. (2021). Perilaku Memilih Masyarakat Mandailing Natal Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Usm Law Review*, *4*(1), 263. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3346

Nawir, M. (2019). Identitas Etnis Dalam Ranah Politik (Studi Kasus Pilkades Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat). *Jurnal Administrasi Pubik*, *02*(2), 112–117.

Nimrah, S., & Sakaria. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislative 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, *1*(2), 2407–9138.

Nisa, N. I., Na'im, M., & Umamah, N. (2017). Strategy of Golongan Karya to be Winner in Election Year 1971-1997. *Jurnal Historica*, *1*(1), 141–151.

Noor, R. (2011). *Pesan Nenek Moyang Suku Semende*. https://www.blogger.com/profile/00057917705531794905

Norris, W. P. (1984). Patron-Client Relationships in the Urban Social Structure: A Brazilian Case Study. *Human Organization*, *14*(1), 16–26.

Novareza, A., Makhya, S., & Kurniawan, R. C. (2023). Analisis Keputusan KPU Ogan Ilir Terhadap Pembatalan Pencalonan Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020. *Jurnal*

Pemerintahan Dan Politik, *8*(1), 42–48. ttps://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2890

Novi Rahmawanta. (2004). *Siapa mau Jadi Presiden*. Kompas.

Nugroho, W. B., & Sushanti, S. (2019). Kekerasan dalam Pacaran: Anatomi Konflik dan Penyelesaiannya. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, *3*(2), 145–162. https://doi.org/10.21580/jsw.2019.3.2.3928

Nuryana, M. (2002). Multikulturalisme Dalam Pembangunan Ekonomi. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial Dan Udaha Kesejahteraan Sosial*, *7*(1).

Ocantos, E. G., Jonge, C. K. de, & Nickerson, D. (2014). Who Stigmatizes Vote Buying? *The American Journal of Political Science (AJPS)*.

Okhtariza, N. (2019). Petahana, Patronase, dan Politik Uang di Jawa. *Centre for Strategic and International Studies*, *3*, 1–10.

Pahlawan, R. (2019a). Ini Tradisi Adat Tunggu Tubang Semende. *Lentera Pendidikan.Com*. http://www.lenterapendidikan.com/berita/muara-enim/view/ini-tradisi-adat-tunggu-tubang-semende.html

Pandiangan, L. V. (2017). Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik : Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik. *Jurnal Politik Muda*, *6*(2), 148–155.

Paradita, W. D., & Lestari, P. (2020). Kontestasi Calon Legislatif Perempuan Kabupaten Batang pada Pemilu 2019. *Unnes Political Science Journal*, *4*(1), 12–15. https://doi.org/10.15294/upsj.v4i1.43627

Perdana, I. K. H., & Surya, I. B. K. (2017). Pengaruh Servant Leadership Dan Trust in Leadership Terhadap Organizational Citizenship Behaviour. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, *6*(6), 3225–3251.

Peters, K. (2012). Politics and patriarchy: Barriers to health screening for socially disadvantaged women,. *Contemporary Nurse*, *42*(2). https://doi.org/DOI: 10.5172/conu.2012.42.2.190

Pillado, K. A. (2023). Patriarchy and Women's Struggle in Selected Boom and Post-Boom Novels. *Journal of Language and Literature*, *23*(2), 234–244. https://doi.org/10.24071/joll.v23i2.3925

Pradana, M. Y. A. (2020). Elite Rationality, Traditions and Pragmatic Politicians. *Journal Of Politics And Policy*, *2*(2), 153–172. https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/29

Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi Indonesia Dalam Masyarakat Multikultural. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, *3*(1), 1–12. https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.01.1

Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, *1*(1). https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10

Puspito, K. (2021). *Strategi Pemenangan Caleg Dalam Pemilu Legislatif 2019*. *10*(3). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/31456/25623

Putri Anzari, P., & Sarwono, B. K. (2018). Social Construction of Women Holding the Position of Tunggu Tubang in South Sumatra. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, *7*(2). https://doi.org/10.7454/jki.v7i2.9693

Putri, D. K., Sardini, N. H., & Astuti, P. (2022). Budaya Matrilineal Dalam Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Daerah Kota Bukittingi. *E-Journal UNDIP*, *5*(3), 248–253.

Rahman, A., Bahri, & Donald, Q. T. (2022). Desakralisasi Partai Politik Islam Pada Awal Reformasi Di Indonesia. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, *8*(1), 47–59. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Candrasangkala/article/view/14354

Rahmat, A., & Iskandar, J. (2015). Semende Darat Tengah. *Kawistara*, *5*(3), 287–297.

Ratnasari, Y., Bartoven Vivit, B. V., Novita, R., Fatimaningsih, E., & Sidemen, I. G. (2020). NGEBETTEN Rekonstruksi Identitas dan Juluk Adok pada Masyarakat Adat Keratuan Melinting Lampung. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, *22*(1), 1–23. https://doi.org/10.23960/sosiologi.v22i1.45

Rauf, M. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,.

Riawati, N. (2015). *Potensi Korupsi dalam Keb ij akan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur*. *19*(November), 154–168.

Ricky, T. P. (2014). Konstruksi Sosial Mahasiswa Terhadap Gaya Hidup Metroseksual (Studi Pada Mahasiswa Metroseksual di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Airlangga). *Komunitas*, *3*(1), 2303–1166. http://journal.unair.ac.id/downloadfull/Kmnts6586-c7ce760ea5fullabstract.pdf

Risal, S., Herry Bajari, A., & Hergianasari, P. (2022). Sumber Daya Alam Dalam Pusaran Pilkada Serentak. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *6*(02), 135–148. https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i02.3948

Romli, L. (2011). Reformasi partai politik dan sistem kepartainan di Indonesia. *Politica*, *2*(2), 199–220.

Romli, L. (2017). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik di Era Reformasi di Indonesia. *Politica*, *8*(2), 95–118. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/7237/4298

Roniger, L., Briquet, J.-L., Sawicki, F., Auyero, J., & Piattoni, S. (2004). Political Clientelism, Democracy, and Market Economy. *Comparative Politics*, *36*(3), 353. https://doi.org/10.2307/4150135

Roryan, K., Herawan, Sauni, & Harijanto, A. (2020). *Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Semende Di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim*. http://repository.unib.ac.id/20823/

Rosyid, M. (2016). Perempuan Samin Dalam Tantangan Politik Lokal Di Kudus Jawa Tengah. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, *7*(2), 397–418.

Sampe, M. D. (2022). Rejection against the Patriarchal Society in Stephen Chbosky and Evan Spiliotopoulos Beauty and The Beast. *Journal of Language and Literature*, *22*(1), 115–124. https://doi.org/10.24071/joll.v22i1.3582

Santoso, T. (2020). *Memahami Modal Sosial* (1st ed.). CV Saga Jawadwipa PUSTAKA SAGA.

Saputra, R. P. (2019). *Patronase dan klientelisme: strategi penggunaan jaringan botoh dalam kemenangan syahri mulyo pada pilkada kabupaten tulungagung 2018*. Gadjah Mada.

Saragintan, A., & Hidayat, S. (2017). Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011. *Jurnal Politik*, *2*(1), 137. https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.85

Sari, I., & Rochmiatun, E. (2020). Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, *1*(1), 38–48. https://doi.org/10.19109/ampera.v1i1.5203

Schedler, A., & Schaffe, F. C. (2002). *What Is Vote Buying?* https://www.researchgate.net/publication/45432597_What_Is_Vote_Buying

Scott, J. C. (1976). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES.

Setiadi, E. M., & Usman Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Kencana Prenada Media Group.

Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, *15*(3),

249–262. file:///C:/Users/USER/Downloads/234-822-1-PB.pdf

Setiawan, H., Widyana, M. R., & Widyana, R. (2022). *High-Cost Democracy : Stimulus Ijon Politik dalam Pemilu Lokal di Region Kaya Sumber Daya Alam*. *5*(1), 1–18.

Sidik, S., Hasrin, A., Fathimah, S., Hamsah, & Carolina, S. S. (2023). Perjuangan Perempuan Kota Tomohon Pada Kontestasi Politik Loka. *Padaringan: Jurnal Pendidikan Sosio Antropologi*, *05*(1), 76–92.

Singlemann, P., Tapia, S. Q., & Jesus. (1982). Land without Liberty: Continuities of Peripheral Capitalist Development and Peasant Exploitation among the Cane Growers of Morelos, Mexico. *JSTORE*, *9*(3). https://www.jstor.org/stable/2633423

Siregar, S. N. (2020). Patronage Democracy in Indonesia. In *Journal of Indonesian Social Sciences and …*. jissh.journal.lipi.go.id. http://jissh.journal.lipi.go.id/index.php/jissh/article/download/158/177

Siswanto, A., Wicaksono, A., & Wardhani, L. C. (2022). Pengajuan Bakal Calon Perempuan Untuk Memenuhi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, *23*(1), 119–131. https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8559

Sitorus, W. I., & Sojanah, J. (2018). Pengaruh Manajemen Sumber Daya Berbasis ISO 9001:2008 Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, *3*(2), 2018. https://doi.org/10.17509/jpm.v3i2.11769

Snanfi, F. L., Darwin, M., Setiadi, & Ikhwan, H. (2018). The Identity Politics of Papuan Indigenous Ethnics in Contestation of Regional Chief Election in Sorong City. *Sosiohumaniora*, *20*(2), 122–131.

Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi Isu Politik Identitas terhadap Identitas Politik pada Generasi Milineal Indonesia di Era 4.0. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, *4*(2), 187–217. https://doi.org/10.21580/jish.42.5223

Soetomo, M. S. dan P. (1995). *Masalah Sosial dan Pembangunan*. PT. Dunia Pustaka Jaya.

Stokes, S. (2009). Pork, by Any Other Name ... Building a Conceptual Scheme of Distributive Politics. *APSA, Toronto, Canada*.

Subakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo. https://doi.org/Subakti, R . (1992) . Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT Grasindo

Sukarni, N. F., Avondita, W., Islami, D. I., & Saifulloh, M. (2022). Personal Branding Agus Harimurti Yudhoyono Melalui Media Sosial Instagram @agusyudhoyono. *Jurnal Cyber PR*, *2*(1), 25–48.

https://doi.org/10.32509/cyberpr.v2i1.2124

Sukmajati, M., & Aspinal, E. (2015). *dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia" dalam buku Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

Sulaeman, M. M., & Homzah, S. (n.d.). *Development (Modification) Theory of Social Capital and Community-Based Applications The Peasant Farmers (Sociological Approach Case Study On The Organization And Farm- Dairy Cattle in the Pangalengan District of Bandung Regency)*. 1–13.

Sumaryono, Niken, F. E., & Prisanto, G. F. (2021). Strategi personal branding dalam pemenangan pemilu legislatif (studi kasus Ir. Ridwan Bae di Sulawesi Tenggara). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, *5*(1), 64–82.

Sumerno, Damardjati, D. S., Syam, M., & Hermanto (Eds.). (2013). *Sorgum: Inovasi Teknologi dan Pengembangan* (2013th ed.). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. https://agroswamp.com/wp-content/uploads/2014/07/Sorgum.pdf

Suteki, S. (2022). Hegemoni Oligarki Dan Ambruknya Supremasi Hukum. *Crepido*, *4*(2), 161–170. https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.161-170

Syahrial, E., Jalal, A., Studi, P., Ilmu, M., Sekolah, P., & Nasional, U. (2023). *KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK : STUDI PARTAI DEMOKRAT PERIODE 2020-2021*. *44*, 111–121.

Syama, J. (2015). Peran Kepala Suku Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Politico: Jurnal Ilmu Politic*. https://media.neliti.com/media/publications/1128-ID-peran-kepala-suku-dalam-meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat1.pdf

Syani, A. (2021). Strategi Pelestarian Makna dan Fungsi Kearifan Lokal Nengah-nyappur pada Masyarakat Adat Marga Legun. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, *23*(2), 226–243. https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/162

Syani, A., Pairulsyah, P., Suwarno, S., & Damayantie, A. (2020). Nilai Kearifan Lokal Sakai Sambayan (Studi Pada Kehidupan Masyarakat Adat Di Desa Maja, Kecamatan Kalianda Lampung Selatan). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, *22*(1), 91–105. https://doi.org/10.23960/sosiologi.v22i1.50

Tamma, S., & Nadir, S. (2013). KOALISI POLITIK DI INDONESIA PASCA SOEHARTO Sukri Tamma dan Sakinah Nadir. *Review Politik*, *03*(02), 256–278.

Tarzi, M. (2019). Cebong Dan Kampret Dalam Pespektif Komunikasi Politik

Indonesia. *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Dan Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta*, *3*(1), 1–7.

Taufik, M. (2018). Faktor Penghambat Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan: Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Besar. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, *10*(1), 24–30.

Tome, A. H., Rusman, M. Z., & ... (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, *6*, 37–50. https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/1103

Triana, rviza F., Hasanuddin, T., & Nurmayasari, I. (2019). Persepsi Petani Kopi Terhadap Program Sertifikasi Rainforest Alliance (RFA) di Kecamatan Pulau Panggung. *JIAA*, *7*(3), 397–404. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1489957&val=12576&title=PERSEPSI PETANI KOPI TERHADAP PROGRAM SERTIFIKASI RAINFOREST ALLIANCE COFFEE RFA DI KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS

Triana, R., & Liska, R. (2020). Politik Identitas: Apakah Politik Identitas Akan Mempengaruhi Popularitas? (Kajian Politik Identitas Dalam Pilkada Kalteng). *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *VIII*(2), 163–171.

Trihadi, J. (2021). Pengaruh Dukungan Orang Tua terhadap Keputusan Memilih Pemilih Pemula pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(3), 6332–6336.

Tutukansa, A. F. (2022). Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, *14*(1), 20–30. https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss1.art3

Utama, A. S. (2016). *DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN*.

Velinda, A., Wilodati, & Kosasih, A. (2017). Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende. *SOSIETAS*, *7*(2).

Vita Rahayu, & Hamidah, S. (2013). Peran Kekerabatan Terhadap Keterpilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.

Wahyudi. (2009). Model Resolusi Konflik Pilkada. *Jurnal Salam*, *12*(2), 141–162.

Wahyudi, L. (2018). Politisasi Birokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. *Paradigma*, *7*(3), 155–164.

Widiastuti, W., & Yuliawati, F. (2018). Resistensi Pemilih Perempuan Terhadap Caleg Perempuan Di Kota Banjar Pada Pemilu Legislatif Periode 2014-2019. *Journal of Politics and Policy*, *1*(1), 49–68.

Winanti, S. A. (2020). Analisis Patronase Politik Terhadap Birokratisasi Pemerintahan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang. *Dinamika Sosial Budaya*, *22*(2), 222–233. file:///C:/Users/USER/Downloads/2710-8023-4-PB.pdf

Yusuf, M. (2016). Perkembangan Budaya Politik Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu*, *24*(1), 28–34.

Zaenal, A. (2019). Matrilineal Paradox in Semende and Minangkabau Culture. *Komunitas*, *11*(2).

Zainal Arifin, M. D., & Pujiharjo, S. (2017). Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *162*.